

MANAJEMEN KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN

KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN



Dra. Hj. Wiji Hidayati, M.Ag. || Syaefudin, M.Pd. || Umi Muslimah, M.Pd.

MANAJEMEN
KURIKULUM DAN
PROGRAM PENDIDIKAN
(Konsep dan Strategi Pengembangan)

Dra. Hj. Wiji Hidayati, M.Ag.
Syaefudin, M.Pd.
Umi Muslimah, M.Pd.

**MANAJEMEN KURIKULUM DAN PROGRAM PENDIDIKAN
(Konsep dan Strategi Pengembangan)**

Penulis:

Dra. Hj. Wiji Hidayati, M.Ag.

Syaefudin, M.Pd.

Umi Muslimah, M.Pd.

Layout & Desain Cover:

Syaefudin, M.Pd.

Cetakan I, Mei 2021

ISBN: 978-623-6256-26-8

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis.

Diterbitkan Oleh:

Semesta Aksara

Jalan Garuda, Kepanjen Banguntapan, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat selesai. Buku ini menyajikan sebagian regulasi, konsep, dan pemikiran dari beberapa tokoh yang dikenal mendalami persoalan manajemen kurikulum dan program pendidikan. Mengenai tokoh, masing-masing tentunya menggunakan asumsi dasarnya sebagai alat dalam upaya untuk memahami manajemen kurikulum dan program pendidikan. Penggunaan sudut pandang yang berbeda menghasilkan konsep dan pengertian yang berbeda pula. Mungkin itu yang menjadikan pembahasan tentang kurikulum dan pendidikan terus berlangsung hingga kini dan masa mendatang. Kami mengajak pembaca sekalian untuk melihat cuplikan pembahasan tersebut melalui buku ini.

Buku ini mencoba menganalisis dan menguraikan hasil analisis tersebut. Dengan berbagai keterbatasan, kami harus meringkas banyak bahan, sehingga buku ini jauh dari kata lengkap. Kami hanya mengambil bahan yang kami persepsi sebagai pokok pembahasan manajemen kurikulum dan program pendidikan. Sementara itu, pembahasan lain secara lebih lengkap masih tersimpan dalam berbagai literatur seperti tercantumkan dalam daftar pustaka. Selain itu, tentu masih banyak literatur terkait manajemen kurikulum dan program pendidikan yang tidak tercantum dalam daftar pustaka buku ini. Masih banyak uraian yang perlu dikemukakan dan kami berharap di lain waktu dapat melakukan kajian mendalam.

Kami berharap buku ini dapat memberikan pengantar dan tambahan pemahaman bagi pembaca sekalian, untuk mempelajari ilmu manajemen kurikulum dan program pendidikan secara lebih seksama.

Semoga buku ini juga dapat memancing diskusi tentang manajemen kurikulum dan program pendidikan sehingga akan memperluas dan memperdalam bidang kajiannya di Indonesia.

Buku ini terbit melalui perjuangan yang tidak mudah. Kami harus berjuang keras meluangkan waktu menulis di tengah kesibukan studi, mengajar, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Menulis buku memang bukanlah suatu hal yang mudah, butuh semangat yang harus terus dijaga. Oleh sebab itu, selesai dan terbitnya buku ini merupakan suatu kegembiraan bagi kami. Serta, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini hingga dapat dinikmati pembaca sekalian.

Kami menyadari bahwa tidak ada tulisan yang sempurna, begitu pun dengan buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon maaf kepada pembaca yang budiman bilamana menemukan kekeliruan dari buku ini. Kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka, sebagai wujud keinginan kami untuk berusaha dan belajar untuk mengasikkan tulisan yang lebih baik. *Selamat Membaca.*

Yogyakarta, Mei 2021

Syaefudin, M.Pd

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	iii
BAB I MANAJEMEN KURIKULUM	1
A. Konsep Dasar Manajemen Kurikulum	1
1. Konsep manajemen kurikulum	1
2. Ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen.....	3
3. Karakteristik manajemen kurikulum	7
4. Ruang lingkup program pendidikan.....	11
B. Landasan dan Kebijakan Pelaksanaan Kurikulum di Indonesia (2006-2013)	17
1. Landasan pelaksanaan kurikulum di indonesia	17
2. Kebijakan pelaksanaan kurikulum di indonesia	21
3. Peranaan dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan.....	24
4. Anatomi kebijakan pendidikan di indonesia.....	27
BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM	32
A. Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum	32
B. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum	36
1. Landasan Agama	38
2. Landasan Filosofis	39
3. Tiga dimensi epistemologi dalam tradisi keilmuan Islam	42
4. Model integrasi interkoneksi epistemologi.....	47
5. Landasan psikologis.....	48
6. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi	53
7. Landasan organisatoris	55
C. Komponen Kurikulum	57

D. Komponen Kurikulum dalam konteks Kurikulum 2013...	63
E. Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum	65
1. Pendekatan subjek akademis	65
2. Pendekatan Humanistik	69
3. Kurikulum Rekonstruksi Sosial	74
4. Pendekatan Teknologi	77
5. Pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan guru/pendidik	81
BAB III FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN KURIKULUM	86
A. Perencanaan Kurikulum.....	86
1. Pengertian, Fungsi dan Landasan Perencanaan Kurikulum	86
2. Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Perencanaan Kurikulum	88
3. Komponen Perencanaan Kurikulum.....	91
4. Pihak yang terlibat dalam Perencanaan Kurikulum.....	92
B. Pengorganisasian Kurikulum.....	94
1. Pengertian pengorganisasian kurikulum	94
2. Tujuan pengorganisasian kurikulum.....	97
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian kurikulum.....	98
4. Jenis pengorganisasian kurikulum	100
C. Pelaksanaan/Implementasi Kurikulum	112
1. Pengertian pelaksanaan/implementasi kurikulum	112
2. Pendekatan dan model implementasi kurikulum.....	113
3. Tahap-tahap pelaksanaan/implementasi kurikulum	118
4. Administrasi pelaksanaan /implementasi kurikulum....	119
D. Pemantauan/Monitoring Kurikulum.....	121
1. Pengertian pemantauan/monitoring kurikulum	121
2. Tujuan dan urgensi pemantauan/monitoring kurikulum	122
3. Sasaran kegiatan pemantauan/monitoring kurikulum .	124

E. Evaluasi Kurikulum	125
1. Pengertian, tujuan dan fungsi evaluasi kurikulum	125
2. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum	128
3. Prosedur evaluasi kurikulum	129
4. Model-model evaluasi kurikulum	130
BAB IV: SUMBER DAYA PENDUKUNG MANAJEMEN KURIKULUM	134
A. Pengertian dan Komponen Sumber Daya Pendukung Kurikulum	134
B. Manajemen Sekolah	137
C. Pemanfaatan Sumber-Sumber Belajar	141
D. Kinerja dan Kompetensi Guru	143
BAB V: PROGRAM PENDIDIKAN	159
A. Program Pendidikan Nasional	159
1. Pengertian program pendidikan	159
2. Visi-Misi-Tujuan Pendidikan Nasional	165
3. Program pendidikan nasional	168
B. Program Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	174
1. Program pendidikan	174
2. Program pendidikan bidang kurikulum provinsi & kabupaten	182
3. Program pendidikan bidang keuangan dan sarpras provinsi & kabupaten	186
4. Kewenangan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten	190
C. Program Bidang Pendidikan pada Satuan Pendidikan	194
1. Program bidang pendidikan/kurikulum dan pembelajaran	194
2. Program Pendidikan Bidang Muatan Lokal dan Ekstra- kurikuler	198

3. Sarana prasarana pendukung program pendidikan atau kurikulum dan pembelajaran	209
D. Program Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling.....	213
1. Program pendidikan bidang kesiswaan	213
2. Program Pendidikan Bidang Bimbingan Konseling	219
E. Program Pendidikan Bidang Pengembangan SDM	222
1. Tenaga pendidik.....	222
2. Tenaga kependidikan.....	229
3. Program adiwiyata.....	231
4. Program penguatan karakter.....	234
BIOGRAFI PENULIS	241

BAB I

MANAJEMEN KURIKULUM

A. Konsep Dasar Manajemen Kurikulum

1. Konsep manajemen kurikulum

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu *manus*, yang berarti tangan, dan *agree*, yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut adalah *managere* yang berarti mengendalikan (A. Rusdiana & Qiqi Yuliaty Z, 2014: 4). Menurut John M. Echols & Hassan, manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Adapun menurut W. J. S. Poerwadarminta, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang *manajer* (pengatur/pemimpin) berdasarkan urutan manajemen (Badrudin, 2013: 1).

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Jaja Jahari & Amirulloh Syarbini, 2013: 2). Manajemen adalah

suatu hal penting yang menyentuh, memengaruhi dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia.

Sedangkan kurikulum secara etimologis *curriculum* yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “**pelari**” dan “*curere*” yang berarti “**tempat berpacu**”. Jadi istilah kurikulum pada zaman romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai garis *finish*. Baru pada tahun 1855, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan yang mengandung arti sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi. Disebutkan juga dalam kamus *Webster* kurikulum diartikan dalam dua macam, yaitu:¹

- a. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari murid di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu.
- b. Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau departemen.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar, baik dalam ruangan kelas, maupun di luar sekolah. Sementara itu, Harold B. Albery (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*).²

1 Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), hlm. 19-20

2 Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), hlm. 3

R. Ibrahim mengelompokkan kurikulum menjadi tiga dimensi yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem dan kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi pertama memandang bahwa kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa disekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang berisi tentang rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dan masyarakat.

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berkembang sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen

a. Ruang lingkup manajemen kurikulum

Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Kegiatan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (SK atau KD) dengan kebutuhan daerah

dan kondisi sekolah yang bersangkutan hingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan dimana sekolah itu berada.³

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Lingkup manajemen kurikulum, meliputi:⁴ perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

Kegiatan kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan dimana sekolah itu berada.

b. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum

Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum yaitu sebagai berikut:⁵

- 1) *Produktivitas*, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- 2) *Demokratisasi*, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subyek didik pada posisi yang

3 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 20

4 *Ibid...*, hlm. 4

5 Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 4

seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

- 3) *Kooperatif*, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- 4) *Efektivitas dan efisiensi*, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
- 5) *Mengarahkan visi, misi dan tujuan*, yang di tetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional, seperti UUSPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah, kebijaksanaan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang bersangkutan.

Proses pendidikan perlu adanya manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen

kurikulum diantaranya sebagai berikut:⁶

- 1) *Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum*, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- 2) *Meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal*, Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
- 3) *Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik*, Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- 4) *Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran*, Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
- 5) *Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar*, Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Ketidak-sesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Guru dan siswa akan termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan

6 Rusman, *Manajemen...*, hlm. 4-5

efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

- 6) *Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum*, Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

3. Karakteristik manajemen kurikulum

Manajemen kurikulum karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di sekolah/madrasah dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Berikut ini akan dipaparkan karakteristik manajemen kurikulum:⁷

a. Karakteristik perencanaan kurikulum

Karakteristik perencanaan kurikulum terdiri dari pengertian perencanaan kurikulum, fungsi perencanaan kurikulum, model perencanaan kurikulum, dan desain kurikulum.

Perencanaan kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang lebih baik, dan menilai hingga sejauh mana perubahan yang terjadi pada peserta didik.

Pimpinan perlu menyusun perencanaan secara cermat, teliti, menyeluruh dan rinci, karena memiliki multi fungsi sebagai berikut: a) perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaianya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana

7 Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2104), hlm. 22-27

yang diperlukan, *system control* dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi; b) berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dan oleh karenanya perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, disamping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimilikinya; c) sebagai motivasi untuk melaksanakan *system* pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.⁸

Beberapa model perencanaan, yaitu:⁹ *Pertama*, model perencanaan rasional deduktif atau rasional *tyler*, menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (*goals and objectives*), tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model itu dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan, misalnya rasionalisasi proyek pengembangan guru, atau menentukan kebijakan suatu *planning by objectives* di lingkungan departemen. Model ini cocok untuk *system* perencanaan pendidikan yang sentralistik yang menitik-beratkan pada *system* perencanaan pusat, dimana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan/mencapai maksud-maksud di bidang *social* ekonomi.

Kedua, model interaktif rasional (*the rational interactive model*), memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda, yang tidak mengikuti urutan *logic*. Perencanaan kurikulum dipandang

8 Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Cet. IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2010), hlm. 152.

9 Ibrahim Nasbi, *Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis*, dalam *JURNAL IDAARAH*, VOL. I, NO. 2, DESEMBER 2017, hlm. 318-330.

suatu masalah lebih “perencanaan dengan” (*planning with*) daripada perencanaan bagi (*planning for*). Sering kali model ini dinamakan model situasional, asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon *fleksible* kurikulum yang tidak memuskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal. Hal ini mungkin merupakan suatu refleksi suatu keyakinan ideologis masyarakat demokrasi atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Implementasi rencana merupakan fase krusial dalam pengembangan kurikulum, dimana diperlukan saling beradaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum.

Ketiga, the diciplines model, perencanaan ini menitik-beratkan pada guru-guru, mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan filosofis, (isu-isu pengetahuan yang bermakna), sosiologi (argumen-argumen kecenderungan sosial), psikologi (untuk memberitahukan tentang urutan-urutan materi pelajaran).

Keempat, model tanpa perencanaan (*non-planning model*), adalah suatu model berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan, hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual.

b. Karakteristik pengorganisasian kurikulum

Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Menurut Rusman ada faktor yang mempertimbangkan dalam organisasi kurikulum, yaitu: urusan bahan (*sequence*), kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan

arahnya berkaitan dengan lingkup (*scope*).

Menurut Evelyn J. Sowell, konsep pengorganisasian kurikulum di antaranya: Pertama, *subject matter designs* yang meliputi: 1) *single subject designs*, 2) *correlated subjects*, 3) *broad fields*, 4) *interdisciplinary integrated studies*, 5) *thematic instruction*; Kedua, *society-culture-based designs/social function and activities designed*; Ketiga, *learner based designed*, yang meliputi: 1) *organic curriculum*, 2) *development curriculum*; Keempat, *other designs*, yang meliputi: 1) *technology as curriculum*, 2) *school-to-work curriculum*, 3) *core curriculum*.¹⁰

c. Karakteristik pelaksanaan kurikulum

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Perbedaan tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu pada tingkat kelas dan tingkat sekolah. Namun, antara kedua tingkat tersebut senantiasa bergandengan dan bersama bertanggung-jawab melaksanakan proses administrasi kurikulum.

Pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat *statistic* dan menyusun laporan.

Kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian

10 Sowell, Evelyn J., *Curriculum an Integrative Introduction*, Edisi III; (New York: Pearso Education, Inc., t.t.), hlm. 135.

tugas-tugas tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi, yaitu: 1) pembagian tugas mengajar 2) pembagian tugas pembinaan ekstra kurikuler 3) pembagian tugas bimbingan belajar.

Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu: pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum terdiri atas tiga faktor, yaitu: 1) karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup bahan ajar; tujuan, fungsi, sifat dan sebagainya; 2) strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum; 3) karakteristik penggunaan kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran.

d. Karakteristik evaluasi kurikulum

Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut: tujuan tertentu, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisiensi, dan berkesinambungan.

4. Ruang lingkup program pendidikan

Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.¹¹ Sedangkan menurut Dr. Farida Yusuf Tayibnapi, M.Pd mengartikan program adalah segala sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan

11 W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 769

hasil atau pengaruh.¹² Adapun program yang dimaksud adalah rancangan usaha-usaha yang akan dijalankan seseorang baik itu berbentuk nyata (*tangible*) seperti materi atau yang berbentuk abstrak (*intangible*), seperti: prosedur, jadwal, dan sederetan kegiatan untuk meningkatkan sikap, dengan harapan usaha itu mendatangkan hasil atau pengaruh.

Secara bahasa, prosedur dapat diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Jadwal juga dapat diartikan secara bahasa sebagai pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, atau daftar/tabel kegiatan/rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Sedangkan untuk kegiatan, dapat diartikan sebagai aktivitas; usaha; pekerjaan, atau kekuatan dan ketangkasan (dalam berusaha); kegairahan.¹³

Sebagai contoh, prosedur program pendidikan inklusi yang dilakukan di SMAN 2 Metro, sebagai berikut:¹⁴

a. Identifikasi kebutuhan anak

Seluruh anggota tim perlu memahami secara tepat apa yang menjadi kebutuhan anak. Orang tua diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai keberadaan anak mereka. Informasi yang tepat akan sangat membantu terhadap ketepatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

b. Identifikasi sumber-sumber pendukung

12 Farida Yusuf Tayipnaps, *Evaluasi Program*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 9

13 Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

14 Nofita Sari Astanu, Sowiyah, Irawan Suntoro, Implementasi Program Pendidikan Inklusif (Studi Evaluatif Metode Cipp di SMA Negeri 2 Metro), dalam *JMMP: Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, Vol 3, No 2, (2015).

Setelah kebutuhan anak telah teridentifikasi kemudian tim membuat daftar semua hal yang bisa mendukung berhasilnya pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak.

c. Memilih kelas untuk anak

Setelah diidentifikasi secara tepat kebutuhan anak dan sarana pendukung yang ada, tim kemudian dapat menentukan kelas yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus.

d. Menyiapkan program pembelajaran

Materi yang diberikan nantinya harus sesuai dengan kebutuhan anak dan sarana yang ada.

e. Membuat jadwal kegiatan

Jadwal kegiatan sehari-hari meliputi: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tempat pembelajaran, dan sumber-sumber yang dibutuhkan.

f. Pelatihan bagi guru

Setiap guru perlu diberikan pelatihan menyangkut cara menangani anak berkebutuhan khusus dan cara menciptakan kelas yang kondusif. Jadi, melalui manajemen pendidikan inklusif, anak akan merasa percaya diri, bangga terhadap diri sendiri serta mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat umum. Guru akan dapat meningkatkan kemampuan mengajar dengan berbagai model sesuai kebutuhan masing-masing anak. Orang tua akan merasa bangga karena anaknya memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Masyarakat akan merasa dihargai karena dilibatkan dalam proses pendidikan inklusi.

Selanjutnya, jadwal dirancang untuk pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, dengan bentuk

daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci, pada penyelenggaraan program pendidikan inklusi di SMAN 2 Metro.

Aktivitas yang dapat dilakukan untuk mendukung program pendidikan inklusi di SMAN 2 Metro adalah sebagai berikut: 1) memberikan guru khusus pada anak sesuai kebutuhannya, misalnya terapis okupasi untuk anak dengan gangguan sensori motorik, atau guru piano untuk anak berbakat musik; 2) pembetulan kesalahan dengan segera setelah kesalahan terlihat (diadakanya pembelajaran remedial agar anak paham dan mapu melanjutkan kemateri selanjutnya); 3) mengadaptasi, memodifikasi, atau memberikan materi/kurikulum khusus, sesuai dengan kemampuan anak; 4) mengajarkan strategi yang efektif dalam pembelajaran, seperti membuat jembatan keledai, membuat pembelajaran untuk menghafal; 5) penambahan waktu atau mengurangi jumlah soal yang akurat dalam melakukan penilaian seperti dari waktu 1 jam bisa digunakan untuk mengerjakan 10 soal kita kurangi menjadi 5 soal untuk anak ABK.

Pemaparan tersebut merupakan salah satu contoh program pendidikan. Program ini memuat rancangan usaha-usaha yang dijalankan seseorang, seperti: prosedur, jadwal, dan sederetan kegiatan untuk meningkatkan sikap, dengan harapan usaha itu mendatangkan hasil atau pengaruh.

Pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara.¹⁵

Sehingga, dapat dipahami bahwa program pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Wajib belajar juga termasuk program pendidikan, yang menyebutkan bahwa pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Indonesia adalah sembilan tahun. Program pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan wajib yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Jenjang ini berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat. Serta, sekolah menengah pertama (SMP) atau madrasah tsanawiyah (MTs), atau yang sederajat. Program pendidikan sekolah atau madrasah di lembaga pendidikan meliputi:¹⁶

- a. Bidang kesiswaan.
 - 1) Lembaga menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan calon peserta didik yang meliputi:
 - a) Kriteria calon peserta didik yang akan direkrut secara detail.
 - b) Penerimaan peserta didik sekolah/madrasah dilakukan secara obyektif, transparan, bertanggung jawab, dan tanpa diskriminasi serta kriteria tambahan lain sesuai kebutuhan, dan sesuai

15 Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 3

16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.47 tahun 2008, *tentang Wajib Belajar*, hlm. 1

dengan daya tampung sekolah/madrasah.

- c) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengalaman lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.

2) Lembaga pendidikan

- a) Memberikan layanan konseling kepada peserta didik.
- b) Melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk peserta didik.
- c) Melakukan pembinaan prestasi unggulan.
- d) Melakukan pelacakan terhadap alumni.

b. Bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

Menyusun menetapkan kurikulum dengan:

- 1) Memperhatikan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan pengaturan pelaksanaannya.
- 2) Dikembangkan sesuai dengan kondisi lembaga/ sekolah/madrasah potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.

c. Pendayagunaan sarana dan prasarana

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pembelajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus

lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.¹⁷

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi: kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.

B. Landasan dan Kebijakan Pelaksanaan Kurikulum di Indonesia (2006-2013)

1. Landasan pelaksanaan kurikulum di indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab.

Tercantum dalam UU SISDIKNAS bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁸

17 Mulyasa, *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm, 87

18 Kadek Sandi Arsana, dkk, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pembelajaran Akuntansi di SMK N 1 Singaraja Tahun Ajaran 2013/2014*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Vol: 4 No: 1 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 36 menyebutkan bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa”.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa “kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan siswa”. Selanjutnya pada ayat 2 ditegaskan bahwa “sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan SKL, dibawa supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bawah pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.¹⁹

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standarisasi. Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.²⁰

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah diatur berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP.00/50/2013 yang

19 Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 20

20 Chafid Rosyidi, *Manajemen Implementasi Kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Rosyid Bojonegoro, Jawa Timur*, (Fakultas Pendidikan: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 10

ditandatangani Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli 2013, yang menetapkan bahwa pelaksanaannya dimulai pada tahun pelajaran 2014/2015. Tahun pelajaran tersebut, untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah, implementasi kurikulum 2013 direncanakan akan dilaksanakan hanya untuk kelas I dan IV. Sedangkan pada tahun pelajaran 2013/2014, Kementerian Agama melakukan persiapan implementasi kurikulum 2013 dalam bentuk pelatihan kepala madrasah, pengawas madrasah, pendidik serta pengadaan bahan ajar dan buku pedoman guru. Sebagai salah satu acuan dari SE Dirjen Pendis tersebut yaitu Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81A Tahun 2013 tentang *Implementasi Kurikulum*. Pasal 1 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa, “implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014”.

Sementara itu, Pasal 2 Permendikbud No. 81A Tahun 2013 mengatur bahwa implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup: *Pertama*, pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. *Kedua*, pedoman pengembangan muatan lokal. *Ketiga*, pedoman kegiatan ekstrakurikuler. *Keempat*, pedoman umum pembelajaran. *Kelima*, pedoman evaluasi kurikulum. Proses implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah juga tidak begitu berbeda dengan proses implementasi yang berlangsung di Sekolah Dasar, yakni merujuk pedoman implementasi yang dikembangkan oleh Permendikbud

tersebut, meskipun pada beberapa aspek dilakukan penyesuaian, seperti di antaranya pada aspek standar isi mata pelajaran pendidikan agama islam, mata pelajaran bahasa arab dan pengadaan buku ajar serta buku pegangan bagi guru.²¹

Sementara landasan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum terdiri dari: 1) landasan filosofis; 2) landasan psikologis; 3) landasan sosiologis; dan 4) landasan teknologis. Sedangkan Hamalik (2006: 30-32), menyebutkan tujuh landasan manajemen kurikulum yaitu:²²

- a. Filsafat, melakukan kajian sampai ke akar-akarnya tentang hakikat manusia yang mencakup pandangan hidup. Secara filsafat ditentukan nilai-nilai luhur dan digambarkan manusia yang ideal menurut pandangan masyarakat.
- b. Psikologi, berkenaan dengan studi tentang tingkah laku manusia, psikologi mempelajari interaksi antara individu dan lingkungannya. Psikologi memberikan sumbangan penting terhadap ilmu manajemen.
- c. Pendidikan, merupakan keseluruhan upaya yang dilaksanakan dalam bentuk pengajaran, pelatihan, bimbingan, untuk mencapai tujuan pendidikan (nasional, institusional, kurikulum, instruksional)
- d. Sosiologi, obyek studi sosiologi adalah masyarakat dan gejala-gejala sosial serta sistem sosial secara keseluruhan. Studi sosiologi mengembangkan berbagai teori, dan masing-masing teori mengajukan konsep yang berbeda.

21 Andi Prastowo, *Paradigma Baru Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Islam, Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435), hlm. 95

22 Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 30-32

- e. Ekonomi, Ilmu ekonomi sangat erat kaitannya dengan ilmu manajemen, bahkan ekonomi memberikan sumbangan yang sangat berharga, bagi pengayaan teori-teori dan konsep-konsep manajemen. Masalah seperti perencanaan ketenagaan, kesempatan kerja, manajemen industri, peningkatan produktivitas, *cost benefits analysis* dan *cost effectiveness analysis*, masalah pemasaran, dan sebagainya.
- f. Sosial budaya, merupakan lingkungan nonpersonal berupa obyek dan nilai. Lingkungan kultural dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, baik secara individual maupun kelompok.
- g. Teknologi, teknologi bukan hanya sebagai penerapan ilmu kealaman (*science*), tetapi juga merupakan proses dan alat untuk melakukan perbaikan generasi, yakni proses manajemen.

2. Kebijakan pelaksanaan kurikulum di Indonesia

Kebijakan (*policy*) sering kali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi dan rencana strategis.

a. Kebijakan negara

Kebijakan negara merupakan sebuah konsep yang berlaku dalam sebuah negara (*nation*). Menurut W.I Jenkins (1978) definisi pertama dari kebijakan negara yaitu seperangkat keputusan-keputusan yang saling berhubungan antar satu sama lainnya, dibuat oleh para pelaku politik atau sekelompok politisi menyangkut pemilihan tujuan dan orientasi pencapaian tujuan tersebut dalam situasi khusus di mana keputusan itu berada, secara prinsipil berada dalam kekuasaan para politis ini.

Definisi kedua kebijakan negara adalah sebuah rangkaian keputusan dalam hal pelaksanaan yang ditujukan untuk sebagian masalah atau sekelompok masalah-masalah (yang saling berkaitan) di mana seluruh masalah itu mempengaruhi masyarakat banyak.

b. Kebijakan pendidikan

Kebijakan suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasioanal, yang diopesikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.

Hal menarik lainnya dapat disimak dalam sebuah konstitusi Jepang, yakni undang-undang pendidikan yang ditetapkan pada tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut adalah: 1) prinsip legalisme; 2) prinsip administrasi yang demokratis; 3) prinsip netralitas; 4) prinsip penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan; 5) prinsip desentralisasi.

Prinsip pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebelum Perang Dunia II masalah pendidikan diputuskan oleh peraturan kekaisaran dan pendapat perlemen dan warga negara diabaikan. Namun setelah reformasi, pendidikan pasca perang urusan pendidikan diatur oleh undang-undang dan peraturan di parlemen. Prinsip kedua mengindikasikan bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsesus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. Prinsip ketiga menjamin bahwa kewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik.

Prinsip keempat mengindikasikan bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan merupakan fungsi dari pemerintah lokal.²³

Usaha yang dilakukan pemerintah adalah memperbaharui kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Konsep baru yang muncul dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karenanya, kurikulum 2013 diarahkan pada pencapaian kompetensi dan pelaksanaannya tetap berorientasi pada 8 standar nasional pendidikan.

Implementasi kurikulum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian tugas dalam implementasi kurikulum 2013 adalah:²⁴

- 1) pemerintah pusat bertanggung-jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum;
- 2) pemerintah pusat bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional;
- 3) pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait;
- 4) pemerintah kabupaten/kota bertanggung-jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.

23 Din Wahyuddin, *Manajemen...*, hlm, 37-39

24 Lambang Subagiyo, Safrudiannur, Jurnal Penelitian, *Implementasi Kurikulum 2013 pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014*, (Pancaran, Vol. 3, No. 4, hal 131-144, Nopember 2014), hlm. 131-132

Penyempurnaan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 sebenarnya bukan suatu perubahan yang drastis. Implementasi kurikulum 2013 juga hampir mirip dengan kurikulum KTSP, yaitu menggunakan prinsip yang:²⁵ 1) berpusat pada peserta didik; 2) mengembangkan kreatifitas peserta didik; 3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang; 4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika; dan 5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Langkah-langkah pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah.

3. Peranaan dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

25 Lambang Subagiyo, Safrudiannur, Jurnal Penelitian, *Implementasi Kurikulum 2013 pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014*, (Pancaran, Vol. 3, No. 4, hal 131-144, Nopember 2014), hlm. 131-132

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dan fungsi kurikulum terkait dengan komponen-komponen yang mengarah pada tujuan pendidikan sebagai salah satu komponen dalam pendidikan. Hamalik dalam Sanjaya menjelaskan ada tiga peran kurikulum, yaitu:²⁶ peran konservatif, peran kreatif, serta peran kritis dan evaluatif.

- a. Peran konservatif; menekankan bahwa kurikulum harus mampu melestarikan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini dikaitkan dengan era global sebagai akibat kemajuan IPTEK yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya-budaya asing menggrogoti budaya-budaya lokal. Melalui pesan konservatif, kurikulum berperan menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat sehingga mampu mempengaruhi dan membina perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di lingkungannya.
- b. Peran kreatif; menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang agar pendidikan tidak tertinggal. Maksudnya, apa yang diajarkan di madrasah pada akhirnya akan bermakna dan relevan dengan kebutuhan dan tuntunan sosial masyarakat.
- c. Peran kritis dan evaluatif; adalah peran dimana kurikulum tidak hanya mewariskan budaya-budaya masa lalu, namun disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini secara selektif. Kurikulum berperan untuk menilai dan memilih

26 Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 10

nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan serta aktif dalam kontrol dan filter sosial.

Sesuai dengan peran kurikulum yang “dimainkan” maka kurikulum yang dikembangkan harus sejalan, seimbang dan harmonis dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan pemahaman yang telah diuraikan di awal, Nazhary mengatakan bahwa:²⁷ 1) kurikulum berkedudukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkat dan lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan; 2) kurikulum berkedudukan sebagai bahan dari program pendidikan seperti bahan pengajaran, yang dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu seperti catur wulan, semester, kelas, maupun level atau tingkatan tertentu; 3) kurikulum berfungsi sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya dilaksanakan di ruang kelas maupun di luar kelas.

Berbicara pendidikan sesungguhnya adalah sedang membahas tentang masa depan. Sedangkan masa depan bangsa direncanakan melalui kurikulum yang digunakan dalam pendidikan saat ini, karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan dan masa depan bangsa yang dilakukan melalui pendidikan. Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan, kurikulum harus adaptif terhadap perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, serta canggihnya teknologi.²⁸

Kurikulum memang memiliki posisi yang sangat strategis khususnya pada lembaga pendidikan sekolah. Menurut Nana

27 Nazhary, *Pengorganisasian Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Brita Aksara, 1986), hlm. 30

28 Rahmat Raharjo, *Pengembangan & Inovasi Kurikulum*, (Yogyakarta: Baituna Publishing, 2012), hlm. 22-25

Syaodih, kurikulum adalah syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah. Kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Tanpa kurikulum yang jelas, pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah akan kacau dan tanpa tujuan yang jelas. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum bertujuan sebagai arah pedoman, atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran (belajar mengajar). Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum merupakan suatu bidang studi, yang dikenal oleh ahli atau spesialis kurikulum, yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoretis bagi pengembangan kurikulum sebagai institusi pendidikan.²⁹

Kurikulum adalah syarat mutlak ada di sekolah. Bagaimana seandainya jika di sekolah tidak terdapat kurikulum? Kurikulum mempunyai kedudukan sentral, sebagai pusat proses pendidikan sehingga apabila tidak ada kurikulum, maka proses belajar mengajar tidak akan tercapai tujuan dengan baik karena kurikulum berisi rencana pendidikan sebagai pedoman dan juga sebagai bidang studi yang menjadi sumber konsep dan landasan bagi institusi pendidikan.

4. Anatomi kebijakan pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia, dapat dilihat melalui peraturan-peraturan berikut ini: Kebijakan Pemerintah Indonesia

29 Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 8

tahun 2004 sampai dengan 2009 yang memiliki orientasi basis ekonomi sesuai dengan rencana strategis pendidikan nasional 2005-2009 mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke-4 Pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen; PP Nomor 20 Tentang 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat makro (nasional), tingkat meso (daerah), maupun tingkat mikro (satuan pendidikan).

Keberadaan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia (MPR RI) sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan proses pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam dan luar negeri. Kemudian keberadaan dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh presiden sebagai eksekutif nomor satu yang dibantu oleh wakil presiden,

jajaran kementerian, dan jajaran badan/lembaga kelengkapan eksekutif negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia.

Namun, khususnya pada tingkat makro, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah komisi X DPR RI, Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (Pemimpin Departemen Pendidikan Nasional). Jadi, segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adapun peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah (Pemda).³⁰ Khusus dalam masalah pendidikan, posisi komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil permusyawaratan (*policy maker*) tingkat nasional.

30 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 41

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Sholeh, *Pengembangan Kurikulum Baru*, Bandung: PT Rosdakarya, 2013.
- Mulyasa, *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.47 tahun 2008, *Tentang Wajib Belajar*.
- Prastowo, Andi, Paradigma Baru Madrasah dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume III, Nomor 1, Juni 2014/1435).
- Rosyidi , Chafid, *Manajemen Implementasi Kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Rosyid Bojonegoro, Jawa Timur*, Fakultas Pendidikan: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Nazhary, *Pengorganisasian Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Brita Aksara, 1986.
- Raharja, Rahmat, *Pengembangan & Inovasi Kurikulum*, Yogyakarta: Baituna Publishing, 2012.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012
- Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* , Jakarta: Kencana, 2009.
- Sandi Arsana, Kadek, dkk, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pembelajaran Akuntansi di SMK N 1 Singaraja Tahun Ajaran 2013/2014, *Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja*, Vol: 4 No: 1 Tahun 2014.
- Subagiyo, Lambang, Safrudiannur, *Jurnal Penelitian, Implementasi*

Kurikulum 2013 pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014,(*Pancaran*, Vol. 3, No. 4, hal 131-144, Nopember 2014).

Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Wahyudin, Dinn, *Manajemen Kurikulum*, Bandung: PT Rosda Karya, 2104.

W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yusuf, Tayipnaxis, Farida, *Evaluasi Program*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

BAB II

PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum

Pembahasan konsep dasar pengembangan kurikulum ini, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengembangan kurikulum. Pertama, *curriculum development* merupakan proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal. Kedua, istilah pembinaan kurikulum memiliki sinonim dengan *curriculum building*, yang merupakan upaya atau kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum potensial (program kurikulum) dengan maksud memperoleh hasil yang semakin baik.³¹ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto mendefinisikan pengembangan merupakan kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara baru, dan selama kegiatan pengembangan, dilakukan penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut. Setelah dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirilah kegiatan pengembangan kurikulum sesuai dengan rancangan

31 Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, hal. 9. Baca juga: Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 43.

yang telah dipilih, disusun ditentukan oleh satuan pendidikan dasar, menengah dan atas.³²

Menurut Winarno Surahmad, kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan.³³ Pengembangan kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengembangan kurikulum yang mencakup kegiatan penyusunan untuk menghasilkan dokumen kurikulum, implementasi atau pelaksanaan di madrasah/sekolah, penilaian pelaksanaan secara intensif melalui monitoring, dan komponen-komponen kurikulum. Jika terjadi kekurangan maka akan terjadi penyesuaian dan dilanjutkan penyempurnaan meliputi tujuan, dan isi. Jika kurikulum tersebut sudah dianggap cukup mantap, setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirilah tugas pengembangan kurikulum tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan secara berkala dan berkelanjutan.³⁴ Menurut Burhan Nurgiantoro, kedua istilah tersebut harus dibedakan karena keduanya menunjuk pada dua kegiatan yang berbeda. Pengembangan kurikulum menunjuk pada kegiatan menghasilkan kurikulum.³⁵ Sedang pembinaan melaksanakan kurikulum itu sebaik-baiknya, melengkapi alat-alat yang ada dari segi jumlah maupun mutunya, meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dituntut oleh kurikulum yang bersangkutan, memilih dan menggunakan metode secara tepat, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis, itu semua termasuk dalam usaha pembinaan kurikulum.

Meskipun makna istilah pembinaan kurikulum dan pengembangan

32 Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan...*, hal. 45.

33 Winarno Surahmad, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Buku Sekolah Pendidikan Guru, 1977), hal. 15.

34 *Ibid.*

35 Burhan Nurgiantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah Pengantar Teoretis dan Pelaksanaan*, (Yogyakarta: BPF, 1988), hal. 11.

kurikulum itu berbeda, namun keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Hasil dari kegiatan pembinaan kurikulum merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum, dan hasil dari kegiatan pengembangan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan harus didukung dengan kegiatan pembinaan.

Adapun pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB X Pasal 36, 37, dan 38, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 36 memuat:

- 1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- 2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik
- 3) kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan:
 - a) Peningkatan iman dan taqwa
 - b) Peningkatan akhlak mulia
 - c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
 - d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan
 - e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
 - f) Tuntutan dunia kerja
 - g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
 - h) Agama
 - i) Dinamika perkembangan global

- j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- 21) Ketentuan pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- 2. Pasal 37 memuat:
 - 1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
 - a) Pendidikan agama
 - b) Pendidikan kewarganegaraan
 - c) Bahasa
 - d) Matematika
 - e) Ilmu pengetahuan alam
 - f) Ilmu pengetahuan sosial
 - g) Seni dan budaya
 - h) Pendidikan jasmani dan olahraga
 - i) Ketrampilan/kejuruan dan
 - j) Muatan lokal
 - 2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a) Pendidikan agama
 - b) Pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c) Bahasa
 - 3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- 3. Pasal 38
 - 1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.
 - 2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau

satuan pendidikan.

- 3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- 4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.³⁶
5. Tingkat pengembangan kurikulum (pengembangan kurikulum tingkat nasional)

Pengembangan kurikulum tingkat nasional dibahas dalam lingkup nasional, baik meliputi jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional.

Secara vertikal berkaitan dengan kontinuitas pengembangan kurikulum antara berbagai jenjang pendidikan (pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi) sedangkan secara horizontal berkaitan dengan keselarasan antar berbagai jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

B. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum

Secara bahasa kata Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan landasan. Adapun landasan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana dikemukakan Nana Syaodih Sukmadinata mengatakan bahwa landasan adalah bidang-bidang yang dapat dijadikan dasar pokok keputusan tentang kurikulum. Berdasarkan landasan-landasan

36 Baca UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional, Bab X Pasal 36,37 dan 38

tersebut, dapat dijawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti: 1) bagaimanakah tujuan hidup manusia, 2) hal-hal apakah yang harus diajarkan kepada generasi muda agar dapat membimbing mereka ke kehidupan yang baik, 3) seberapa jauh peranan dan tanggung jawab sekolah dalam hal ini, 4) relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dan struktur masyarakat, 5) peranan teknologi dan struktur keluarga terhadap praktek kependidikan di sekolah, 6) pemenuhan kebutuhan dasar manusia lewat jalur pendidikan, 7) relevansi struktur kurikulum dengan tahap-tahap perkembangan kedewasaan anak didik, dan masih banyak lagi pertanyaan yang relevan, 8) peranan teknologi dan struktur keluarga terhadap praktek kependidikan di sekolah, 9) pemenuhan kebutuhan dasar manusia lewat jalur pendidikan, 10) relevansi struktur kurikulum dengan tahap-tahap perkembangan kedewasaan anak didik, dan masih banyak lagi pertanyaan yang relevan.

Beberapa Asas/landasan yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, beragam pendapat ahli tentang asas-asas pengembangan kurikulum, menurut Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany menyebutkan empat dasar umum yang menjadi landasan kurikulum pendidikan meliputi dasar agama, falsafah, sosial.³⁷

Menurut James A. Beane, et al. menyebutkan adanya tiga fondasi atau landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filsafat, sosiologi, dan psikologi.³⁸ Senada dengan ini, Nana Sudjana menyebutkan ada tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosial budaya dan landasan psikologis³⁹. Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan ada empat landasan, yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya dan

37 Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam, Terjemah: Hasan Langgulung*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 523.

38 James A. Beane, et al., *Curriculum Planning and Development*, (New York: Macmillan Company, 1944), hal. 73.

39 *Ibid.*

perkembangan ilmu dan teknologi.⁴⁰ S. Nasution menyebutkan ada empat asas kurikulum yaitu asas filosofis, psikologis, sosiologis dan asa organisatoris.⁴¹

Beberapa pendapat ahli di atas, terlihat saling melengkapi, bahwa asas atau landasan dalam pengembangan kurikulum mencakup enam landasan, yaitu: landasan agama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan perkembangan ilmu dan teknologi serta landasan organisatoris. Berikut diuraikan masing-masing asas/landasan:

1. Landasan Agama

Landasan agama ini muncul terutama dari pemikir pendidikan Islam, yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran agama (baca Islam). Islam, sumber ajaran agama yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber lainnya adalah ijtihad. Berdasar sumber-sumber inilah aspek/unsur pendidikan dikembangkan, seperti perumusan tujuan pendidikan, materi, dan strategi pelaksanaannya.⁴²

Dasar berpikir bagi landasan agama ini adalah seperti dalam landasan filsafat, bahwa dalam kegiatan pendidikan akan muncul persoalan-persoalan yang sangat mendasar seperti ke arah mana pendidikan harus diarahkan, siapakah peserta didik itu, apa yang harus diajarkan ke peserta didik, dan sebagainya, yang semua ini memerlukan jawaban-jawaban mendasar. Agama dan filsafat akan saling melengkapi dalam memberikan jawaban-jawaban tersebut.

40 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 58.

41 S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum, Edisi Kedua, Cet. Kelima*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 14.

42 Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, hal. 524.

Agama yang bersumber pada wahyu yang sifat kebenarannya mutlak akan mampu memberikan jawaban dan arahan yang tidak bisa diberikan oleh filsafat. Sementara filsafat yang sumber utamanya adalah hasil perenungan pemikiran manusia akan memberikan perincian lebih lanjut atas jawaban yang diberikan agama yang mungkin masih bersifat global.⁴³

2. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mengkaji tentang urgensi atau pentingnya filsafat dalam mengembangkan kurikulum di lembaga pendidikan.⁴⁴ Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Interaksi tersebut banyak persoalan-persoalan yang bersifat mendasar, seperti apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban mendasar, esensial merupakan jawaban-jawaban filosofis.

Filsafat berasal dari kata-kata *philein* yang berarti cinta atau suka sekali akan sesuatu. Kata *shopia* berarti kebijaksanaan atau kebijaksanaan. Orang yang mempelajari filsafat akan menjadi orang bijaksana dalam tingkah laku dan perbuatannya.⁴⁵ Orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan berbuat secara bijak. Agar manusia dapat mengerti kebijaksanaan dan berbuat secara bijak, ia harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam, pola berfikir seperti ini disebut pemikiran radikal, atau berpikir sampai

43 Mulyadhi Kartanegara, *Pengantar Epistemologi Islam*, hal. 16.

44 Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, hal. 10.

45 Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2002),

ke akar-akarnya (*radic* berarti akar).⁴⁶ Sebagaimana dijelaskan Imam Barnadib bahwa; filsafat adalah ilmu yang menjadikan segala sesuatu sebagai objek materi, dan hakikat sebagai objek formal atau sudut pandang terhadap objeknya. Jadi, bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, terdapat kesamaan pada objek materi.

Namun pada ilmu-ilmu yang lain, objek tersebut hanya dapat diambil secara terbatas, sedangkan pada ilmu filsafat, semua objek diambil sebagai keseluruhan. Sebagai penjelasan, berikut ini dikemukakan beberapa contoh. Ilmu psikologi yang menjadi objek materi adalah gejala-gejala kejiwaan yang ada pada manusia. Sedangkan pada filsafat, bila yang diambil sebagai objek adalah manusia maka yang menjadi ruang lingkup telaaahnya ialah manusia sebagai keseluruhan. Metode yang digunakan pada keduanya juga berbeda. Ilmu psikologi, metode yang digunakan bervariasi, misalnya deskripsi dan eksperimen yang pada dasarnya bersifat empirik atau berdasar pengalaman. Namun, pada filsafat yang menonjol adalah perenungan terhadap objeknya, yang pada dasarnya dapat bersifat tanpa bersandikan pada pengalaman (*apriori*) atau bersandikan atas pengalaman (*aposteriori*).⁴⁷

Berdasar kutipan di atas, dapat dipahami bahwa filsafat berbeda dengan cabang pengetahuan lainnya (ilmu pengetahuan), meski ada persamaannya. Perbedaannya adalah filsafat berupaya untuk menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan secara komprehensif tentang alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa filsafat merupakan cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Berfilsafat berarti menangkap sinopsis

46 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 39.

47 Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan*, hal. 3.

peristiwa-peristiwa yang ragam dalam pengalaman manusia. Sementara suatu cabang ilmu pengetahuan mengkaji satu bidang pengetahuan manusia yang daerah cakupannya terbatas.

Ilmu pengetahuan berkenaan dengan fakta-fakta sebagaimana adanya (*Das Sein*), berusaha melihat segala sesuatu secara objektif, menghilangkan hal-hal yang bersifat subjektif. Filsafat melihat segala sesuatu dari sudut bagaimana seharusnya (*Das Sollen*), faktor-faktor subjektif dalam filsafat sangat berpengaruh. Namun demikian antara filsafat dan ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang saling mengisi dan melengkapi (komplementer). Filsafat memberikan landasan-landasan dasar bagi ilmu pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan dapat memberikan bahan-bahan untuk perenungan filsafat. Keduanya dapat memberikan bahan-bahan bagi manusia untuk membantu memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya.

Filsafat, sebagai pengetahuan yang mengadakan tinjauan dan mempelajari obyeknya dari sudut hakekat ini, berhadapan dengan beberapa problema utama, yaitu:⁴⁸ 1) Realita, ialah mengenai kenyataan, yang selanjutnya menjurus kepada masalah kebenaran. Kebenaran akan timbul bila orang telah dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang dimiliki ini telah nyata. Realita atau kenyataan ini dipelajari oleh metafisika; 2) Pengetahuan, yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan itu, dan jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan dipelajari oleh epistemologi; dan 3) Nilai, yang dipelajari oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Pertanyaan-pertanyaan

48 Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*, Cet. Kesembilan, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal. 20.

yang dicari jawabnya antara lain adalah seperti: nilai-nilai yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya.

John S. Brubacher sebagaimana dikutip oleh Imam Barnadib, menunjukkan bahwa filsafat dan pendidikan itu mempunyai hubungan yang erat satu sama lain karena problema-problema tersebut berada dalam lingkungan dua disiplin ini.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum lembaga pendidikan, hendaknya mempertimbangkan hasil-hasil yang dicapai oleh cabang-cabang di atas sesuai dengan jenis atau aliran filsafat yang dianut. Metafisika akan memberikan pandangan mengenai dunia yang bagaimanakah yang diperlukan.

Epistemologi akan memberikan gambaran mengenai hakekat pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Hal ini sangat diperlukan dalam hubungan dengan penyusunan dasar-dasar kurikulum. Epistemologi pendidikan islam yang khas untuk pemikiran Islam, disebut oleh Muhammad Abid Al Jabiri sebagai *epistemology* bayani, irfani, dan burhani.

3. Tiga dimensi epistemologi dalam tradisi keilmuan islam

a. Dimensi epistemologi bayani

Menurut al-Jabiri dengan mengutip dari lisan al-Arab kata *bayan* terdiri dari huruf ba-ya-nun secara lughawi memiliki lima pengertian, yaitu: 1) *al-washl* (kesinambungan); 2) *al-fasl*, *al-bu'du* dan *al-firaq* (keterpilahan); 3) *al-zuhur wa al-wuduh* (jelas dan terang); 4) *al-fashah wa al-qudrah 'ala al-tabligh wa al-iqna'* (fasih dan memiliki kemampuan dalam menyampaikan pesan atau maksud dengan terang atau jelas); 5) *al-Insan hayawan mubin* (manusia yang mempunyai kemampuan berbicara

49 *Ibid.*, hal. 21.

fasih dan mengesankan).⁵⁰ Sedangkan untuk mendapatkan pengetahuan *episteme* bayani menempuh dua jalan: *Pertama*, berpegang pada redaksi teks (*nash*) dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, seperti *nahwu* dan *sharaf* sebagai alat analisis. *Kedua*, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika, penalaran atau rasio sebagai sarana analisis.⁵¹

Berdasar ragam arti ini, menurut Mahmud Arif, makna generik yang terkandung dalam bayan adalah keterpilahan dan kejelasan. Sebagai sebuah *episteme*, keterpilahan dan kejelasan terwujud dalam bayan ibarat perspektif dan metode yang sangat menentukan pola pemikiran tidak hanya dalam lingkup estetetik-susastra, melainkan juga dalam lingkup logik-diskursif.⁵²

Episteme bayani teks mempunyai peran yang penting dalam *epistemologi bayani*, maka tidak aneh jika iklim intelektual semacam itu melahirkan agamawan-intelektual yang menempati posisi otoritatif dalam ranah keagamaan dan keilmuan. Cara berfikir demikian kemudian melahirkan ulama' *bayani*. Menurut al-Jabiri, *episteme bayani* melahirkan beberapa disiplin keilmuan, seperti *nahwu*, *balaghah*, fikih, dan kalam.⁵³ Menurut al-Jabiri epistemologi *bayani* merupakan *episteme* yang muncul paling awal dalam pemikiran Arab. *Episteme* ini muncul sebagai kombinasi dari pelbagai aturan dan prosedur dalam

50 Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-aql al-Arabi: Dirasah Tabliliyah Naqdiyyah li Nudlumi al-Ma'rifah fi al-tsaqafah al-arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990) hlm. 16-19

51 Ibid, hlm. 530

52 Mahmud Arif, "Epistemologi Pendidikan Islam Kajian atas Nalar Masa Keemasan Islam dan Implikasinya di Indonesia", *Disertasi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006) hlm. xii, Sembodo Ardi Widodo, Nalar Bayani, Irfani dan Burhani Dan Implikasinya Terhadap Keilmuan Pesantren", dalam *Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner... hlm. 88*

53 *Ibid.*, hlm. 13.

menafsirkan sebuah wacana (*interpreting of discourse*).

Bayani yang secara prioriti telah menjadikan realitas kewahyuan (al-Qur'an dan Hadits) terkemas dalam wacana bahasa dan agama sebagai acuan berpijak memperoleh pengetahuan.

b. Epistemologi 'Irfani

'Irfani berasal dari al-'Irfan dalam bahasa Arab dari kata 'arafa dan ma'rifah, satu makna dengan 'Irfan, kata 'Irfan muncul dari sufi yang merujuk pada suatu bentuk pengetahuan yang tinggi, terhunjam dalam hati dalam bentuk *kasyf* atau *ilham*.⁵⁴ *Ilham* di sini bukan dalam pengertian *ilham* kenabian, tetapi merupakan intuisi seketika yang biasanya ditimbulkan oleh praktik-praktik rohani. Kata "*ilham*" ini populer di kalangan sufi untuk menunjukkan arti: pengetahuan termulia yang dihunjamkan ke lubuk hati melalui cara *kashf* (penyingkapan mata batin) atau *ilham*.⁵⁵ *Epistemologi irfani* dalam hal ini dipakai pula dengan istilah *gnostik* yang dinisbatkan pada sebuah aliran kebatinan yang muncul pada abad ke-2 M yaitu *gnostiksisme*.⁵⁶

Sebagai lapangan kognitif, *gnostik* adalah kepercayaan dan mitos yang berbaju agama yang dijadikan alat untuk melegetimasi apa yang diyakini oleh pemeluknya sebagai pengertian yang *esoteris* dari yang *eksoteris*. *Epistemologi irfani* sangat dipengaruhi oleh tradisi Persia Kuno, Hermenetisme, dan Neo-Platonime, sebagai sumber mata air pemikirannya. Hal tersebut terbukti pada corak pemikiran kaum *Syi'ah* (khususnya

54 Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-aql al-Arabi ...*, hlm 251

55 Pendapat Aljabiri dikutip Mahmud Arif dalam, "Epistemologi Pendidikan Islam Kajian atas Nalar Masa Keemasan Islam dan Implikasinya di Indonesia", *Disertasi...*, hlm. 63

56 Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-aql al-Arabi...*, hlm. 254.

syi'ah ismailiyah) dan pada kalangan sufisme. Oleh al-Jabiri *episteme irfani* disebut sebagai *al-la ma'qul al-'aqli* (irasionalitas yang rasional).

Sumber dari *epistemologi irfani* adalah *kasyf*, sebagaimana dijelaskan pula oleh Amin Abdullah; sumber pokok ilmu pengetahuan dalam tradisi *episteme irfani* adalah *experience* (pengalaman), pengalaman hidup otentik sesungguhnya merupakan pelajaran yang tidak ternilai harganya. Lebih lanjut dijelaskan pula pengalaman konkrit diantaranya; pahitnya konflik, kekerasan, dan disintegrasi sosial. Akibat yang ditimbulkannya dapat dirasakan oleh siapapun tanpa harus dipersyaratkan mengenal jenis teks keagamaan yang biasa dibaca.⁵⁷ Prinsip memahami keberadaan orang, kelompok dan penganut sesama pemeluk agama yang berbeda aliran atau berbeda agama (*verstehen, understanding others*), dengan cara menumbuhkan-suburkan sikap empati, simpati, *social skill*. Hal ini akan mengantarkan tradisi *epistemology irfani* pada pola pikir yang lebih bersifat *unity in difference, tolerant, dan pluralist*,⁵⁸ dengan mencairnya batas-batas formal antar agama, etnis, kelamin, dan ras.

Hubungan antar subyek dan obyek dalam epistemologi *irfani* adalah inter-subyektif. Apa yang dirasakan oleh penganut suatu kultur, ras, agama, kulit, bangsa tertentu dengan sedikit perbedaan yang juga dirasakan oleh orang lain dalam kultur, ras, agama, kulit, dan bangsa yang lain.⁵⁹ Validitas kebenaran *epistemology irfani* hanya dapat dirasakan dan dihayati secara langsung (*al-ru'yah al-mubasyirah, direct experience*), intuisi, *al-dzauq* atau *psiko-gnosis*.

57 M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi...*, hlm. 208-209.

58 *Ibid*, hlm. 209-210.

59 *Ibid*, hlm. 211.

Pengalaman-pengalaman batin yang amat mendalam, otentik, fitri, *hanafiyyah sahmah* yang tidak terkatakan oleh logika dan tidak terungkap oleh bahasa ini disebut sebagai (*al-ilm al-hudury*), (*direct experience*) oleh tradisi *isyraqy* atau *preverbal*, sehingga semua pengalaman otentik dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh manusia.

c. Epistemologi burhani

Epistemologi burhani, dalam bahasa Arab kata *al-burhan* berarti argumen yang tegas dan jelas, burhan adalah satu jenis dari logika (*qiyas*) kalau logika bersifat umum, burhan bersifat khusus yang merupakan bagian dari logika yakni suatu rasionalitas yang mengantarkan kepada ilmu yakin.⁶⁰

Burhani adalah *qiyas* yang disusun dari premis-premis yang pasti untuk menghasilkan kesimpulan yang pasti meliputi asumsi dasar “akaliah”, hasil eksperimentasi yang sudah teruji, warta mutawatir dan hasil serapan inderawi.⁶¹ Al-burhani adalah sebutan bagi sistem epistemik dalam tradisi pemikiran “arab-islam” yang dicirikan adanya pemikiran tertentu dan perspektif realitas tertentu, secara genealogis berhubungan erat dengan tradisi pemikiran Aristotelian. Sistem epistemologi betumpu pada seperangkat kemampuan intelektual manusia, baik berupa indera, pengalaman, maupun rasio untuk mendapatkan pengetahuan.

Menurut Amin Abdullah, pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri dengan epistemologi bayani, irfani dan burhani cukup *representative* untuk melihat struktur fundamental kefilosofan

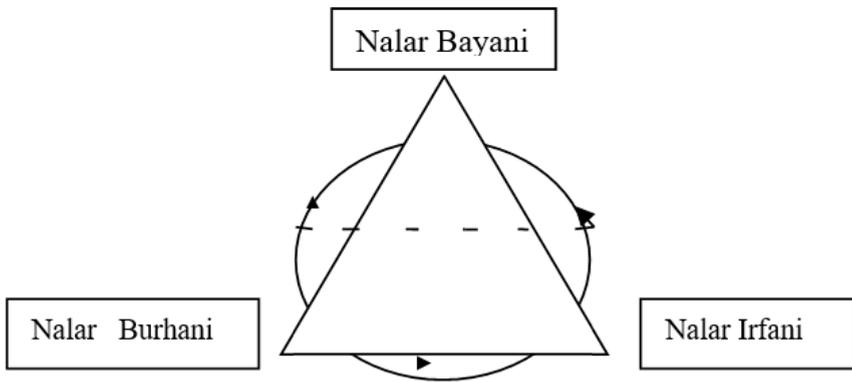
60 Sembodo Ardi Widodo, Nalar Bayani, Irfani dan Burhani Dan Implikasinya Terhadap Keilmuan Pesantren”, dalam *Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner...*, hlm. 78

61 Mahmud Arif dalam, “Epistemologi Pendidikan Islam Kajian atas Nalar Masa Keemasan Islam dan Implikasinya di Indonesia”, *Disertasi...*, hlm. 74

ilmu kajian-kajian keislaman dalam dataran humanities dalam pemikiran keislaman.⁶²

4. Model integrasi interkoneksi epistemologi

Menurut Amin Abdullah, ketiga tradisi *epistemology* keislaman *bayani*, *irfani*, dan *burhani* jika diintegrasikan-interkoneksi, maka hubungannya berbentuk sirkular yang dapat digambarkan berikut ini:⁶³



Model sirkular ini, model kerjanya dengan memanfaatkan gerak putar hermeneutis antara ketiga corak tradisi epistemologi keilmuan yang telah baku bayani, irfani, dan burhani dapat memahami keterbatasan, kekurangan dalam kelemahan yang melekat pada corak masing-masing, dengan menggunakan *al-takwil*, *al-ilmi*, kekakuan, kekeliruan, ketidak-tepatan, anomali-anomali, dan kesalahan dari masing-masing epistemologi dapat dikurangi dan diperbaiki.⁶⁴ Setelah mendapat masukan baik dari epistemologi *bayani*, *irfani*, maupun *burhani*, corak hubungan yang

62 M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 194

63 *Ibid*, hlm. 223

64 *Ibid*.

berputar melingkar sirkular tidak menunjukkan adanya finalitas, eksklusifitas, serta hegemoni.⁶⁵ Eksklusifitas dan finalitas menepikan kenyataan bahwa, keberagamaan Islam bukan merupakan peristiwa yang sekali jadi, tetapi merupakan proses panjang menuju pada sikap beragama seseorang.

Kurikulum yang lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, dapat diumpamakan sebagai jalan raya yang perlu dilewati oleh peserta didik dalam usahanya untuk mengenal dan memahami pengetahuan. Agar mereka berhasil dalam mencapai tujuan ini, perlu mengenal hakekat pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya.

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai sangat penting dalam penentuan tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi tersebut banyak persoalan-persoalan yang bersifat mendasar, seperti apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan jawaban yang mendasar dan esensial atau jawaban-jawaban filosofis.

5. Landasan psikologis

Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yang dimaksudkan adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum.⁶⁶ Kurikulum sebagai program pendidikan secara umum terdiri dari empat unsur, yaitu: tujuan, materi atau bahan pelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, landasan

65 *Ibid.*, hlm. 224

66 Suharsimi Arikunto, dkk., *Manajemen Kurikulum*, (Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY, 2000), hal. 48

psikologis ini sangat diperlukan dalam merumuskan semua unsur kurikulum di atas, baik perumusan tujuan, materi, strategi pembelajaran maupun teknik-teknik penilaiannya.⁶⁷ Menurut S. Nasution, landasan psikologis ini dalam pengembangan kurikulum sangat diperlukan, terutama dalam:⁶⁸ 1) seleksi dan organisasi bahan pelajaran; 2) menentukan kegiatan belajar yang paling serasi; dan 3) merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai.

Menurut kedua pendapat di atas, dapatlah dipahami bahwa landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum dapat memberikan acuan dalam merumuskan keempat unsur kurikulum. Akan tetapi, yang paling pokok dari keempat unsur tersebut adalah dalam kaitannya dengan pemilihan dan penentuan bahan atau materi pelajaran dan strategi pembelajaran. Pemilihan dan penentuan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Sehingga, bahan atau materi pelajaran dan strategi pembelajaran akan fungsional dalam upaya membantu perkembangan peserta didik. Demikian pula, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, harusnya disesuaikan dengan taraf perkembangan mereka. Menurut Nana Sudjana, ada dua cabang psikologi yang penting sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: psikologi perkembangan dan psikologi pembelajaran.⁶⁹

Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan *spermatozoid* dengan sel telur sampai dengan dewasa. Psikologi perkembangan diperlukan

67 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 46.

68 S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, hal. 57.

69 Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, hal.14.

terutama dalam menetapkan isi kurikulum yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalaman bahan pelajaran sesuai dengan taraf perkembangan mereka. Adanya jenjang atau tingkat pendidikan dalam sistem persekolahan merupakan satu bukti bahwa psikologi perkembangan menjadi landasan dalam pendidikan, khususnya kurikulum. Ahli psikologi perkembangan mencoba membagi tahap-tahap perkembangan anak dari sudut yang beragam. Namun pada prinsipnya, semua itu akan membantu proses pendidikan termasuk dalam pengembangan kurikulumnya.

Psikologi pembelajaran pada prinsipnya adalah suatu cabang psikologi yang mengkaji tentang bagaimana individu itu belajar. Jika sudah diketahuinya secara betul bagaimana proses belajar itu berlangsung, dalam keadaan yang bagaimana belajar itu memberikan hasil yang sebaik-baiknya, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang seefektif-efektifnya.⁷⁰

Apabila psikologi perkembangan bermanfaat bagi penyusunan isi kurikulum agar sesuai dengan taraf perkembangan anak, maka psikologi pembelajaran memberikan sumbangan terhadap kurikulum dalam hal bagaimana kurikulum itu diberikan kepada peserta didik, dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya. Ini berarti, sumbangan psikologi belajar terhadap kurikulum berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah, yakni melalui strategi belajar mengajar. Psikologi pembelajaran berkenaan proses perubahan tingkah laku manusia itu terjadi. Hal ini diperlukan dalam pendidikan, terutama bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sebab, proses belajar mengajar atau pembelajaran pada hakikatnya mengubah tingkah laku baru peserta didik.

70 S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, hal. 13.

Landasan sosial budaya

Landasan sosial budaya adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini berangkat dari satu premis bahwa pendidikan lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat dan budaya. Sehingga, ada hubungan timbal balik yang harmonis antara pendidikan, masyarakat, dan budaya.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, tiga sifat penting pendidikan dalam hubungannya dengan masyarakat. *Pertama*, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Hal itu disebabkan karena pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat. Karena tujuan pendidikan mengandung nilai, maka isi pendidikan harus memuat nilai. Proses pendidikannya juga harus bersifat membina dan mengembangkan nilai. *Kedua*, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat. Generasi muda perlu mengenal dan memahami apa yang ada dalam masyarakat, memiliki kecakapan-kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat. *Ketiga*, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap proses pendidikan, karena pendidikan sangat melekat dengan kehidupan masyarakat. Proses pendidikan merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat, penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial budaya, politik, keamanan, dan lain-lain.⁷¹

71 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 58-59.

Sementara itu keterkaitan antara pendidikan dengan budaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Arti yang lebih mendasar, pendidikan merupakan suatu proses kebudayaan. Ia lahir dari budaya dan dilaksanakan dalam rangka proses pembudayaan. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia berbudaya.⁷²

Kondisi sosial budaya dalam masyarakat dengan segala aspek yang ada di dalamnya selalu berubah dan berkembang terutama akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga merupakan hasil budaya manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus mengantisipasi tuntutan perkembangan tersebut sehingga mampu menyiapkan anak didik untuk dapat hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kurikulum dalam konteks ini sebagai program pendidikan yang harus dapat menjawab tantangan/tuntutan tersebut. Bukan hanya dari segi isi programnya, tetapi juga pendekatan dan strategi pelaksanaannya.

Isi pendidikan (kurikulum) adalah kebudayaan manusia yang senantiasa berkembang, baik kebudayaan *universal* seperti bahasa, sistem pengetahuan, agama/sistem *religi*, sistem mata pencaharian/teknologi, organisasi sosial, kesenian maupun kebudayaan khusus yang sesuai dengan masyarakat setempat. Kebudayaan *universal* terutama bahasa, *religi*, dan sistem pengetahuan serta teknologi, adalah unsur-unsur utama isi kurikulum secara *universal*. Sedangkan unsur kebudayaan khusus masuk sebagai isi kurikulum dalam

72 Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, hal.12.

bentuk kurikulum *muatan lokal*.⁷³

6. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi

Landasan IPTEK ini berkenaan dengan pengembangan kurikulum memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat memberi sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nana Syaodih Sukmadinata,⁷⁴ menjelaskan bahwa sejak abad pertengahan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Masa setelah abad pertengahan sering disebut zaman modern, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini banyak dipengaruhi filosof, seperti: Thales, Phytagoras, Leucipos, Demokritos, Socrates, Plato, Aristoteles, Archimides yang hidup sebelum masehi, sampai kepada Al-Khowarizmi yang hidup pada abad ke-9. Ilmu pengetahuan modern tidak dapat dilepaskan dari peranan ilmuwan muslim, seperti yang dikatakan Briffault dalam *making of Humanity* (Qodir, 1995:2):

”Orang Yunani mengadakan sistematisasi, generalisasi dan menyusun teori, namun ketekunan melakukan pengamatan dan penyelidikan eksperimental yang saksama dan lama bukanlah watak mereka... apa yang kita sebut ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat metode eksperimen baru, yang diperkenalkan ke Eropa oleh orang Arab... ilmu pengetahuan modern merupakan sumbangan paling penting bagi peradaban Islam”.

Ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan ahli diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan atau ilmu lainnya. Sumbangan berupa penggunaan atau penerapan

73 *Ibid.*

74 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan praktik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 64-65

suatu bidang ilmu pengetahuan terhadap bidang-bidang lain disebut teknologi, seperti dinyatakan Kast dan Rosenweig (1962:11), *Technology is the art of utilizing scientific knowledge*. Menurut Iskandar Alisyahbana (1980:1), yang merumuskan teknologi, yaitu:

”Cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal (*hardware dan software*), sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca-indera, dan otak manusia”.

Ada beberapa bidang ilmu dan teknologi yang mempunyai pengaruh terhadap pendidikan, diantaranya: bidang komunikasi, transportasi, dan mekanisasi industri. Kemajuan bidang komunikasi sangat berpengaruh terhadap pendidikan, melalui media massa dapat berlangsung proses pendidikan, baik tayangan yang berbentuk informasi ataupun tayangan yang bersifat hiburan tentu mempunyai nilai-nilai pendidikan. Bagaimana media massa mempunyai fungsi pendidikan? Saat ini, media televisi, radio, surat kabar, dan majalah dapat menambah pengetahuan pendengar, penonton, atau pembacanya. Memberikan kecakapan atau keterampilan serta membina sikap tertentu, meski ada sisi negatif dari media televisi untuk pendidikan anak. Kecenderungan anak untuk meniru dan pada masa tertentu terutama pada awal masa pubertas ada masa anak untuk beridentifikasi, anak suka meniru tokoh-tokoh pujaannya. Tokoh yang menjadi idola anak adalah tokoh-tokoh terkenal. Apa yang dilakukan oleh tokoh idolanya selalau dinilai baik. Padahal, mungkin saja tidak semua tingkah laku tokoh tersebut baik.

Perkembangan teknologi di bidang industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan secara langsung atau tidak langsung akan dibutuhkan dalam

pendidikan. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti komputer, televisi, radio, *cassete tape recorder*, *video tape*, buku-buku, gambar-gambar, peta, berbagai bentuk alat peraga, alat-alat permainan, alat-alat tulis menulis, alat-alat berhitung dan sebagainya. Untuk peningkatan pendidikan sangat membutuhkan bantuan hasil-hasi teknologi industri tidak hanya bersifat *hardware*, tetapi juga membutuhkan bantuan penggunaan hasil pengembangan teknologi yang bersifat *software*. Sudah tentu penggunaan alat-alat hasil industri maju dalam bidang pendidikan, berarti menuntut peningkatan, penguasaan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia baik para guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga administrasi sebagai tenaga kependidikan karena penggunaan alat-alat belajar modern dalam pendidikan akan mempengaruhi proses belajar, dengan menggunakan alat-alat belajar yang modern anak akan lebih aktif belajar. Aktivitas belajar anak akan tergantung metode dan media yang digunakan oleh guru, juga layanan-layanan disekolah dapat cepat dan lebih baik.

7. Landasan organisatoris

Landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk *broad-field*. Hubungan diusahakan secara lebih mendalam, dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum yang terpadu.⁷⁵

Adapun jenis organisasi kurikulum sebagaimana dikemukakan

75 S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, hal. 14.

oleh S. Nasution, yang mengelompokkan organisasi kurikulum menjadi dua kelompok besar, yaitu:⁷⁶

- a. kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*Subject curriculum*), yang meliputi:
 - 1) kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah (*separate subject curriculum*)
 - 2) Kurikulum mata pelajaran gabungan (*correlated curriculum*)
- c. Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*), yang antara lain meliputi:
 - 1) kurikulum inti (*core curriculum*)
 - 2) kurikulum pengalaman (*activity curriculum*)

Jenis organisasi yang akan digunakan dipengaruhi oleh aliran psikologi (khususnya psikologi belajar) yang dianut. Bagi yang mengikuti paham psikologi asosiasi yang berpendirian bahwa keseluruhan sama dengan jumlah bagiannya, akan cenderung memilih kurikulum yang *subject-centered*, atau yang berpusat pada mata pelajaran, yang dengan sendirinya akan terpisah-pisah. Sebaliknya, psikologi Gestalt lebih mengutamakan keseluruhan, karena keseluruhan itu bermakna dan lebih relevan dengan kebutuhan anak dan masyarakat. Aliran psikologi memilih kurikulum terpadu atau *integrated curriculum*.

Perlu dipahami bahwa setiap jenis organisasi kurikulum mempunyai kebaikan. Akan tetapi, tidak terlepas dari kekurangan yang ditinjau dari segi-segi tertentu. Selain itu, bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di satu sekolah, bahkan yang satu dapat membantu atau melengkapi yang

76 S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, hal. 107-108.

satu lagi.

Sebagai penutup dari uraian tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum ini perlu ditekankan bahwa semua landasan di atas secara sendiri-sendiri cukup kompleks dan selain itu dapat mengandung hal-hal yang saling bertentangan, sehingga harus diadakan pilihan sesuai dengan kebutuhan, cita-cita pendidikan yang diharapkan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Setiap pilihan tentu akan menghasilkan kurikulum yang berbeda-beda. Kompleksitas masing-masing landasan tersebut menyangkut landasan filsafat. Banyak aliran atau cabang filsafat yang masing-masing mempunyai faham dan pandangan yang berbeda menyangkut aspek metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Aliran rasionalisme akan mempunyai pandangan yang berbeda dengan empirisme atau pragmatisme. Perbedaan-perbedaan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap bentuk kurikulum yang dihasilkan baik terkait dengan rumusan tujuan, pengorganisasian materi, strategi pembelajaran, maupun sistem penilaiannya.

Demikian pula kondisi sosial budaya antara satu masyarakat antara satu bangsa dengan yang lainnya. Bahkan, satu masyarakat dalam kurun yang berbeda juga akan berbeda situsai dan kondisinya. Hal ini akan berpengaruh terhadap bentuk kurikulum yang dihasilkan.

Idealnya landasan-landasan di atas dijadikan pertimbangan secara keseluruhan dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan, yang mencakup komponen-komponen kurikulum.

C. Komponen Kurikulum

Komponen kurikulum adalah unsur-unsur yang harus ada dalam bangunan sebuah kurikulum. Akan dijelaskan dalam tulisan ini terkait dua pendapat yang membahas komponen kurikulum; pertama, pendapat

Nana Syaodih Sukmadinata, dan kedua penadapat Nana Sujana.

Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan komponen kurikulum meliputi tujuan, bahan ajar, strategi mengajar, media mengajar, evaluasi pengajaran dan penyempurnaan pengajaran. Sedangkan, menurut Nana Sujana yang menyebutkan bahwa komponen kurikulum meliputi tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi, dan evaluasi. Masing-masing dapat dijelaskan berikut ini:

Pertama, komponen kurikulum menurut Nana Syaodih Sukmadinata meliputi: tujuan, bahan ajar, strategi mengajar, media mengajar, evaluasi pengajaran, dan penyempurnaan pengajaran.⁷⁷ Berdasar unsur-unsur yang ada dalam komponen itu, dapat dikatakan bahwa Nana Syaodih Sukmadinata dalam menjelaskan komponen kurikulum mencakup lingkup sempit, yaitu; kurikulum sebagai program pengajaran. Secara lebih rinci, komponen kurikulum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan memegang peranan penting, akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya, tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal: *Pertama*, perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. *Kedua*, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis. Nana Syaodih lebih menekankan bagaimana mengembangkan tujuan dalam proses pembelajaran bahwa dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, tujuan khusus lebih diutamakan, karena lebih jelas dan mudah mencapainya. Tujuan-tujuan mengajar dibedakan atas beberapa kategori, sesuai dengan perilaku yang menjadi sarannya Bloom mengemukakan tiga domain perilaku individu, yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif berkenaan dengan penguasaan

77 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 102-112

kemampuan-kemampuan intelektual atau berpikir. Domain afektif berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan perasaan, sikap, minat dan nilai-nilai. Domain psikomotor menyangkut penguasaan dan pengembangan ketrampilan-ketrampilan motorik.

2. Bahan ajar

Pembahasan bahan ajar ini ada dua istilah yang perlu diperhatikan *scope* dan *sequence*. *Scope* berkenaan dengan apa yang akan diajarkan, yaitu ruang lingkup atau luas bahan pelajaran, jenis dan bentuk pengalaman-pengalaman belajar, pada berbagai tingkat, sedangkan *sequence* adalah urutan pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik.⁷⁸ Nana Syaodih Sukmadinata lebih memfokuskan pada pembahasan *Sequence* bahan ajar, dimana untuk mencapai tujuan mengajar yang telah ditentukan, diperlukan bahan ajar yang tersusun atas topik-topik dan sub topik, tiap topik dan sub topik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang ditetapkan. Ada beberapa cara untuk menyusun *Sequence* bahan ajar yaitu: a) sekuen kronologis; b) sekuens kausal; c) sekuen structural; d) Sekuen logis dan psikologis; e) sekuen spiral, f) rangkaian kebelakang, dan g) sekuens berdasarkan hierarki belajar

3. Strategi Mengajar

Penyusunan sekuens bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar, ketika guru menyusun sekuen bahan ajar, juga harus memikirkan strategi mengajar yang sesuai dengan penyajian bahan ajar. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar Rowntree (1974:93-9) strategi mengajar meliputi: *Exposition-Discovery Learning* dan *Group-Individual learning*, Ausubel and Robinson (1969: 43-45) membaginya atas *strategi Reception Learning-Discovery Learning* dan *Rote Learning-*

78 Nasution, *Asas-Asas kurikulum*, (Bandung: Jemmars, 1982), hal. 189-190

Meaningful Learning.⁷⁹

4. Media Mengajar

Media mengajar secara luas dapat diartikan segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar, berbagai bentuk media mengajar *audio visual, film, audio cassette, video cassette, televisi* dan *computer*, sebagaimana pendapat Rowntree (1974:104-113) dalam Nana Syaodih Syukmadinata. Ia mengelompokkan media mengajar menjadi lima macam, yaitu: *interaksi insani, realita, pictorial, simbol tertulis, rekaman suara*, juga pendapat Gagne (1969) mengemukakan lima macam perangsang belajar disertai alat-alat untuk menyajikannya

Perangsang	Alat
1. Kata-kata tertulis	1. Buku pengajaran berprogram, bagan, <i>proyektor slide</i> , poster, <i>checklist</i>
2. Kata-kata lisan	2. Guru, <i>tape recording</i>
3. Gambara dan kata-kata lisan	3. <i>Slide-tapes</i> , slide bersuara, ceramah dan poster
4. Gambara bergerak, kata-kata dan suara lain	4. Proyektor film bergerak, televisi demonstrasi
5. Konsep-konsep teoretis melalui gambar	5. Film bergerak, permainan boneka/wayang

5. Evaluasi pengajaran

Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan, kegiatan evaluasi akan memberikan umpan balik, teutama untuk mengetahui pencapaian tujuan-tujuan belajar

79 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan kurikulum Teori dan Praktik...*, hal. 107-108

dan proses pelaksanaan mengajar, kemudian digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, strategi dan media mengajar. Evaluasi mengajara meliputi dua jenis evaluasi pertama evaluasi hasil belajar mengajar dan kedua evaluasi pelaksanaan mengajar.⁸⁰

6. Penyempurnaan Pengajaran

Hasil-hasil evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pelaksanaan mengajar secara keseluruhan, merupakan umpan balik bagi penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Kedua, menurut Nana Sudjana ada empat komponen kurikulum yakni tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi dan evaluasi. Kurikulum diartikan secara luas, masing-masing komponen kurikulum sebagai berikut:⁸¹

7. Tujuan Kurikulum

Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik, mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan.

8. Isi dan struktur kurikulum

Isi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup pembahasan isi dan struktur kurikulum menurut Nana Sujana meliputi: a) kriteria pemilihan isi kurikulum; b) mata pelajaran sebagai isi kurikulum; c)

80 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan kurikulum Teori dan Praktik...*, hal. 109-111

81 Nana Sudjana, *Pembinaan dan pengembangan kurikulum di sekolah...*, hal. 21-50

kriteria memilih mata pelajaran; dan d) silabus pelajaran.⁸² Struktur kurikulum terdiri dari struktur vertikal dan struktur horizontal.

9. Strategi pelaksanaan kurikulum

Komponen strategi pelaksanaan memberi petunjuk bagaimana kurikulum dilaksanakan, ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum, yakni; a) tingkat dan jenjang pendidikan; b) proses belajar mengajar; c) bimbingan penyuluhan; d) administrasi supervisi; e) sarana kurikuler; dan f) evaluasi atau penilaian.

10. Evaluasi kurikulum

Evaluasi kurikulum dimaksudkan menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan.

Menurut Nana Sujana kurikulum sebagai program pendidikan untuk peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dapat dievaluasi dari sudut sistem, kurikulum sebagai sistem, dalam evaluasi dapat diidentifikasi: a) masukan atau *input* program; b) proses pelaksanaan program; c) hasil atau *output/outcome* program; dan d) dampak dari program. Ruang lingkup atau objek evaluasi kurikulum adalah *input*, proses, *output/outcome* dan dampak.

Evaluasi terhadap *input* kurikulum mencakup evaluasi semua sumber daya yang dapat menunjang program pendidikan seperti dana, sarana, tenaga, konteks sosial dan siswa sebelum menempuh program. Evaluasi proses mencakup penilaian terhadap strategi pelaksanaan kurikulum mencakup proses belajar mengajar, bimbingan penyuluhan, administrasi *supervise*, sarana instruksional, penilaian hasil belajar. Evaluasi *output/outcome* adalah penilaian terhadap lulusan pendidikan baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, sesuai dengan program yang ditempuh.

82 *Ibid.*, hal. 2-3

Evaluasi dampak kurikulum, artinya penilaian terhadap kemampuan lulusan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab yang dibebankan keadaanya sesuai dengan profesi yang disandang.

D. Komponen Kurikulum dalam konteks Kurikulum 2013

Komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam kurikulum 2013 sebagaimana digariskan dalam salinan Permendikbud No. 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, bahwa setiap satuan pendidikan dalam pengembangan dokumen kurikulum madrasah atau sekolah memuat komponen sebagai berikut:⁸³

Pertama Visi, Misi, dan Tujuan. Visi mendeskripsikan cita-cita yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan; misi mendeskripsikan indikator-indikator yang harus dilakukan melalui rencana tindakan dalam mewujudkan; visi satuan pendidikan. Tujuan pendidikan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

Kedua, muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), bahwa muatan KTSP terdiri atas muatan kurikulum pada tingkat nasional, muatan kurikulum pada tingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan.

Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana diatur dengan ketentuan:⁸⁴ a) untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD/MI; b) untuk SMP/MTs mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP/MTs; c) untuk SMA/MA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA/MA; dan

83 Salinan Permendikbud no 81A Tahun 2013, hlm. 6

84 *Ibid.*

d) untuk SMK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK/MAK.

Muatan kurikulum tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas:⁸⁵ sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan, kondisi setiap daerah, provinsi maupun kabupaten/kota.

Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan berdasar peraturan Gubernur. Sedangkan muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota ke dalam dokumen KTSP.

Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran muatan lokal, serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

Ketiga,⁸⁶ pengaturan beban belajar dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester.

Keempat,⁸⁷ kalender pendidikan kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis, jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

Permulaan tahun pelajaran dimulai pada setiap awal tahun pelajaran; minggu efektif belajar minimum terdapat 34 minggu dan maksimum terdapat 38 minggu. Sedangkan hari libur meliputi libur jeda tengah

85 *Ibid.*, hlm. 7

86 *Ibid.*

87 *Ibid.*, hlm. 8

semester, jeda antar semester, libur akhir tahun, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan libur khusus.

E. Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum

Menurut ahli kurikulum, terdapat empat pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: pendekatan subjek akademis, pendekatan humanistis, pendekatan teknologis, dan pendekatan rekonstruksi sosial.⁸⁸ Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan subjek akademis

Pendekatan subjek akademis, berpandangan bahwa pengembangan kurikulum didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu, karena setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi ciri tertentu.⁸⁹ Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik, yang diperlukan untuk (persiapan) pengembangan disiplin ilmu. Pendekatan ini berpijak pada teori pendidikan klasik yang mempunyai asumsi bahwa semua ilmu pengetahuan, ide-ide dan nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikir terdahulu.

Pendidikan berfungsi memelihara, mengawetkan, dan meneruskan semua warisan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Guru atau pendidik tidak perlu susah-susah mencari dan menciptakan pengetahuan, konsep, dan nilai-nilai baru, sebab semuanya telah tersedia, tinggal menguasai dan mengajarkan kepada peserta didik. Isi pendidikan atau materi ilmu tersebut diambil

88 John D. Mc. Neil, *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif, Terjemah: Subandijah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1988), hal. 5. Baca juga: Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 81.

89 Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif, Edisi V Cet. Kedua*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), hal. 78.

dari khazanah ilmu pengetahuan, berupa disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh ahli terdahulu telah tersusun secara logis dan sistematis.⁹⁰

Tugas guru/pendidik dan pengembang kurikulum adalah memilih dan menyajikan materi ilmu tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Menurut konsep pendidikan klasik, guru atau pendidik adalah ahli dalam bidang ilmu dan juga contoh atau model nyata dari pribadi yang ideal.⁹¹

Kurikulum subjek akademis komponen kurikulum meliputi: tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi.⁹²

a. Tujuan

Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian.⁹³ Berdasar pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, peserta didik diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Peserta didik harus belajar menggunakan pemikiran dan dapat mengontrol dorongannya. Lembaga pendidikan harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merealisasikan kemampuan mereka menguasai warisan budaya dan jika mungkin memperkayanya.

b. Metode

Metode yang digunakan dalam kurikulum subjek akademis

90 Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, hal. 8.

91 *Ibid.*, hal. 8.

92 John D. Mc. Neil, *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif*, hal. 93.

93 *Ibid.*

adalah metode ekspositori dan penyelidikan (inkuiri).⁹⁴ Ide-ide diberikan guru kemudian dielaborasi (dilaksanakan) peserta didik sampai mereka kuasai. Konsep utama disusun secara sistematis, dengan ilustrasi yang jelas untuk selanjutnya dikaji. Materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting, kemudian dirumuskan dan dicari pemecahannya.

c. Organisasi isi

Ada beberapa pola organisasi isi (materi pelajaran) kurikulum subjek akademis. Pola-pola organisasi yang terpenting di antaranya: 1) *correlated curriculum* adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya; 2) *unified* atau *concentrated curriculum* adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu, yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu; 3) *integrated curriculum*. Jika dalam *unified* masih tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang *integrated* warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan atau segi kehidupan tertentu; dan 4) *problem solving curriculum* adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu.⁹⁵

d. Evaluasi

Tentang kegiatan evaluasi, kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat bahan pelajaran. Bidang studi sosial lebih

94 *Ibid.*, hal. 94.

95 Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 84-85.

banyak digunakan bentuk uraian daripada tes objektif. Bidang studi tersebut membutuhkan jawaban yang merefleksikan logika, koherensi, dan integrasi secara menyeluruh. Bidang studi seni yang sifatnya ekspresi membutuhkan penilaian subjektif yang jujur, di samping standar keindahan dan cita rasa. Lain halnya dengan matematika, nilai tertinggi diberikan bila peserta didik menguasai landasan aksioma serta cara penghitungannya benar. Ilmu kealaman penghargaan tertinggi bukan hanya diberikan kepada jawaban yang benar tetapi juga pada proses berpikir yang digunakan peserta didik.⁹⁶

Sebagai sebuah pendekatan pengembangan kurikulum, subjek akademik tidak lepas dari kritikan-kritikan yang hal ini sekaligus menunjukkan kekurangannya. Kritikan-kritikan yang dilontarkan kepada pendekatan pengembangan kurikulum subjek akademik ialah:⁹⁷ 1) kurikulum itu terlampaui mengutamakan aspek kognitif dan tidak menghiraukan aspek afektif, perkembangan emosional; 2) kurikulum itu hanya memperhatikan soal-soal akademis akan tetapi tidak turut memperbaiki kehidupan sosial. Selanjutnya kurikulum yang disusun oleh ilmuwan belum tentu cocok bagi anak-anak. Mereka menyangsikan asumsi ilmuwan bahwa semua anak dapat dan harus memahami metode ilmiah untuk mempelajari disiplin ilmu. Mereka juga kurang dapat menerima bahwa setiap anak akan menjadi ilmuwan professional; 3) pengembangan kurikulum subjek akademik ini bertujuan menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi dengan mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental disiplin ilmu, menganjurkan proses penelitian dan penemuan, dan

96 *Ibid.*

97 S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum, Cet. Keenam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 27.

memberikan kurikulum yang didasarkan atas disiplin ilmu yang tersendiri-sendiri, karena tiap disiplin mempunyai metode penelitian yang khusus. Pelaksanaan jenis kurikulum ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sebagai halnya dengan tiap inovasi kurikulum keberhasilannya selalu bergantung pada guru. Guru sendiri tidak pernah terlibat dalam penelitian, tidak menguasai metode penemuan untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu. Mereka hanya pemakai ilmu yang tersedia untuk keperluan pendidikan. Mereka tidak dapat diharapkan akan mampu membimbing siswa mengadakan penemuan karena mereka sendiri tidak bisa.

2. Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide “memanusiakan manusia”. Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi dan dasar pengembangan program pendidikan humanistik.⁹⁸

Pendekatan pengembangan kurikulum humanistik berpijak pada teori pendidikan pribadi (*personalized education*) yang antara lain dipelopori oleh John Dewey (*progressive education*) dan JJ. Rousseau (*romantic education*). Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa anak atau peserta didik adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Mereka percaya bahwa peserta didik mempunyai potensi, punya kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang

98 Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial...*, hal. 78.

menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh bukan saja segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif (emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain).⁹⁹

Teori pendidikan humanistik menekankan bahwa tugas pendidikan yang utama ialah mengembangkan anak sebagai individu selain sebagai makhluk sosial. Hal ini dapat dilakukan bila dalam pendidikan dikembangkan kemampuan dan potensi anak, khususnya imajinasinya yang kreatif. Perlu diberikan kepada anak didik kebebasan, kemandirian, hak untuk menemukan diri serta pengembangan kemampuan fisik dan emosionalnya, jadi perkembangan anak itu sebagai keseluruhan. Kurikulumnya sering berdasarkan konsepsi "child-centered" yang mengutamakan ekspresi diri secara kreatif, individualitas, aktivitas pertumbuhan dari dalam, bebas dari paksaan dari luar. Kurikulum ini memelihara keutuhan anak sebagai "keseluruhan". Khususnya mengenai kreativitas dan spontanitasnya.¹⁰⁰

Konsep kurikulum yang humanistik ini memindahkan titik berat pendidikan dari bahan pelajaran kepada anak sebagai individu keseluruhan. Diusahakan integrasi antara aspek afektif (perasaan, sikap, nilai-nilai) dengan aspek kognitif (pengetahuan dan kemampuan intelektual), sehingga apa yang dipelajari mempunyai makna pribadi bagi anak. Karena itu, lebih banyak diberi kesempatan kepada anak untuk memilih dari berbagai alternatif sesuai dengan maknanya bagi kehidupannya dengan bertanggung jawab atas pilihannya itu.¹⁰¹

Kurikulum humanistik memandang aktualisasi diri sebagai

99 Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 86.

100 Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice*, hal. 28.

101 S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, hal. 21.

suatu kebutuhan asasi. Setiap anak mempunyai "self" masing-masing yang sering tidak dikenal dan disadarinya, yang tersembunyi atau tertekan dan karena itu perlu dibangkitkan dan dikembangkan. Psikologi yang mereka anut merupakan reaksi terhadap aliran behaviorisme yang dianggap mekanistik dan mengabaikan aspek afektif dan kebebasan. Selain itu juga merupakan reaksi terhadap psikologi Freud yang terlampau memandang manusia sebagai makhluk yang dikuasai oleh daya-daya emosional "pathologis" dari alam tidak sadar.¹⁰²

Psikologi Gestalt diinginkan integrasi perasaan, pikiran, dan perbuatan yang memberikan kebulatan pengalaman yang menyenangkan sesuai dengan keinginan anak. Sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan yang membangkitkan motivasi intrinsik karena bahan pelajaran bermakna bagi mereka. Sekolah "tradisional" mematikan spontanitas, kegembiraan belajar serta kepribadian anak. Kalangan humanis timbul kecaman bahwa sekolah dan masyarakat "sakit" yang dapat dilihat dari berkecamuknya gejala-gejala persaingan, ketidak-adilan, manipulasi manusia, dan ketiadaan peri-kemanusiaan. Kurikulum humanistik diharapkan dapat mengatasi penyakit-penyakit itu.¹⁰³

Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik, berkenaan dengan tujuan dan fungsi, metode, organisasi isi, dan evaluasi.¹⁰⁴ Masing-masing karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan dan fungsi

102 *Ibid.*, hal. 22.

103 *Ibid.*, hal. 23.

104 John D. Mc. Neil, *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif...* hal. 20. Baca juga: Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 90-91.

Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman (pengetahuan) berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik. Tujuan pendidikan bagi mereka adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Semua itu merupakan bagian dari cita-cita perkembangan manusia yang teraktualisasi (*self actualizing person*). Seseorang yang telah mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang telah mencapai keseimbangan (harmoni) perkembangan seluruh aspek pribadinya baik aspek kognitif, estetika, maupun moral. Seorang dapat bekerja dengan baik bila memiliki karakter yang baik pula.

b. Metode

Kurikulum humanistik menuntut konteks hubungan emosional yang baik antara pendidik dan peserta didik. Pendidik/guru selain harus mampu menciptakan hubungan yang hangat dengan peserta didik, juga mampu menjadi sumber. Ia harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar. Pendidik harus memberikan dorongan kepada peserta didik atas dasar saling percaya. Peran mengajar bukan saja dilakukan oleh pendidik tetapi juga oleh peserta didik. Pendidik tidak memaksakan sesuatu yang tidak disengani peserta didik.

c. Organisasi isi

Salah satu kekuatan besar kurikulum humanistik terletak di dalam tekanannya pada integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual tetapi juga emosional dan tindakan. Kurikulum humanistik juga menekankan keseluruhan. Kurikulum harus mampu memberikan pengalaman yang

menyeluruh, bukan pengalaman yang terpenggal. Kurikulum ini kurang menekankan sekuens, karena dengan sekuens par karena dengan sekuens peserta didik kurang mempunyai kesempatan untuk memperluas dan memperdalam aspek-aspek perkembangannya.¹⁰⁵

d. Evaluasi

Evaluasi ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Kurikulum konvensional, subjek akademik penilaian ditentukan secara objektif dan mempunyai kriteria pencapaian. Sedangkan dalam kurikulum humanistik tidak ada kriteria. Ahli humanis lebih tertarik dalam pertumbuhan tanpa memperhatikan tentang bagaimana pertumbuhan diukur atau ditentukan. Sasaran mereka adalah perkembangan anak supaya menjadi manusia yang lebih terbuka, lebih berdiri sendiri. Kegiatan yang mereka lakukan hendaknya bermanfaat bagi peserta didik. Kegiatan belajar yang baik adalah yang memberikan pengalaman yang akan membantu peserta didik memperluas kesadaran akan dirinya dan orang lain dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Ketika diminta untuk mempertimbangkan efektifitas kurikulum mereka, ahli humanis biasanya percaya kepada penilaian subjektif oleh guru dan peserta didik.¹⁰⁶

Pendekatan pengembangan kurikulum humanistik seperti halnya pendekatan-pendekatan lainnya, juga tidak lepas dari adanya kritikan yang menunjukkan akan kelemahannya. Sebagai contoh adalah kritikan bahwa konsep aktualisasi diri tidak jelas, bahwa aktualisasi diri belum tentu akan membawa kebaikan

105 John D. Mc. Neil, *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif...* hal. 22

106 *Ibid.*, hal. 23. Baca juga: Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 91.

bagi masyarakat umum, bahwa pendekatan itu terlampaui mengutamakan diri individu. Karena itu, pendekatan aktualisasi diri atau humanistik perlu dikaitkan dengan pendekatan rekonstruksi sosial dalam kurikulum.¹⁰⁷

3. Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Pendekatan rekonstruksi sosial dalam pengembangan kurikulum atau program pendidikan bertolak dari problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat, untuk selanjutnya dengan memerankan ilmu-ilmu dan teknologi, serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif akan dicarikan upaya pemecahannya menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.¹⁰⁸

Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Aliran pendidikan tersebut berpijak pada asumsi bahwa pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerja sama. Kerja sama atau interaksi bukan hanya terjadi antara peserta didik dengan pendidik, tetapi juga antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerja sama ini peserta didik berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.¹⁰⁹ Menurut teori pendidikan ineteraksionis, manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selalu hidup bersama, berinteraksi dan bekerja sama. Melalui kehidupan bersama dan kerja sama itulah manusia dapat hidup, berkembang

107 S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 23.

108 Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 173.

109 Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 91.

dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Tugas pendidikan terutama membantu agar peserta didik menjadi cakap dan selanjutnya mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakatnya.

Menurut teori pendidikan ini, isi pendidikan terdiri atas problem-problem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Proses pendidikan atau pengalaman belajar peserta didik berbentuk kegiatan-kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerja sama, baik antar peserta didik, peserta didik dengan pendidik, maupun antara peserta didik dan pendidik dengan sumber-sumber belajar yang lain.

Ada beberapa ciri dari desain kurikulum rekonstruksi sosial berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi.¹¹⁰

a. Tujuan

Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan studi sosial, yang perlu didekati dari bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, bahkan pengetahuan alam, dan matematika. Masalah-masalah masyarakat bersifat universal dan hal ini dapat dikaji dalam kurikulum.

b. Metode

Pengajaran rekonstruksi sosial pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional

110 *Ibid.*, hal. 92-93. Baca Juga: John D. Mc. Neil, *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif*, hal. 37-40.

dengan tujuan peserta didik. Pendidik berusaha membantu peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya. Sesuai dengan minat masing-masing peserta didik, baik dalam kegiatan pleno maupun kelompok-kelompok berusaha memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Kerja sama baik antara individu dalam kegiatan kelompok, maupun antarkelompok dalam kegiatan pleno sangat mewarnai metode rekonstruksi sosial. Kerja sama ini juga terjadi antara peserta didik dengan manusia sebagai sumber dari masyarakat. Belajar bagi rekonstruksi sosial merupakan kegiatan bersama, ada kebergantungan antara seorang dengan yang lainnya. Kegiatan belajar tidak ada kompetisi yang ada adalah kooperasi atau kerja sama, saling pengertian dan konsensus. Anak-anak sejak sekolah dasar pun diharuskan turut serta dalam survai kemasyarakatan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sebagai kelas-kelas tinggi, selain mereka dihadapkan kepada situasi nyata juga mereka diperkenalkan dengan situasi-situasi ideal. Berdasar hal tersebut peserta didik diharapkan dapat menciptakan model-model kasar dari situasi yang akan datang.

c. Pola organisasi

Pola organisasi dalam kurikulum rekonstruksi sosial disusun seperti sebuah roda. Tengahnya sebagai poros, dipilih suatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Berdasar tema utama, dijabarkan sejumlah topik yang dibahas dalam diskusi kelompok, latihan-latihan, kunjungan dan lain-lain. Topik-topik dengan berbagai kegiatan kelompok ini merupakan jari-jari. Semua kegiatan jari-jari tersebut dirangkum menjadi satu kesatuan sebagai bingkai atau *frame*.

d. Evaluasi

Kegiatan evaluasi, peserta didik juga dilibatkan.

Keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai lebih dulu baik ketepatan maupun keluasan isinya, juga kemampuan menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai peserta didik, tetapi juga menilai pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut terutama menyangkut perkembangan masyarakat dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

4. Pendekatan Teknologis

Pengembangan kurikulum pendekatan teknologik bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas (*job analysis*). Pendidikan dengan menggunakan pendekatan teknologik bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas (*job analysis*) tersebut.¹¹¹ Model pengembangan kurikulum dengan pendekatan teknologik bertolak dari prinsip efisiensi dalam pemilihan materi program dan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan program sehingga lulusan pendidikan model ini akan mampu melaksanakan tugas dengan sempurna.¹¹² Kurikulum atau program pendidikan dikembangkan melalui beberapa kegiatan uji-coba dengan sampel-sampel dari suatu populasi yang sesuai, direvisi beberapa kali sampai standar yang diharapkan dapat dicapai. Model pengajaran ini tingkat penguasaan peserta didik

111 Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial...*, hal. 78.

112 *Ibid.*, hal. 79.

dalam standar konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lain. Apalagi kalau digunakan program-program yang lebih berstruktur seperti pengajaran berprogram, pengajaran modul atau pengajaran dengan bantuan *video* dan komputer, yang dilengkapi dengan sistem umpan balik dan bimbingan yang teratur dapat mempercepat dan meningkatkan penguasaan peserta didik.¹¹³

Kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan, memiliki beberapa ciri khusus, yaitu:

a. Tujuan.

Kurikulum rekonstruksi sosial, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus, yang disebut objektif atau tujuan instruksional atau indikator. Objektif atau indikator ini menggambarkan perilaku, perbuatan atau kecakapan keterampilan yang dapat diamati atau diukur. Oleh karena itu tujuan pembelajaran sistem teknologi cenderung memperkuat pentingnya gagasan konvensional dan bagian tradisional dari subjek akademik.¹¹⁴

b. Metode

Belajar dipandang sebagai proses mereaksi terhadap rangsangan, memperhatikan dan merenungkan petunjuk-petunjuk yang relevan dan apabila terjadi respons yang diharapkan maka respons tersebut diperkuat.¹¹⁵ Tujuan-tujuan pengajaran telah ditentukan sebelumnya. Pengajaran bersifat

113 Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 98.

114 John D. Mc. Neil, *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif*, hal. 64.

115 Menurut Silverman, pembelajaran dengan pendekatan teknologik berbasis pada model ilmu behavior, yakni yang menekankan pada teori hubungan stimulus-respon (S-R). Baca: Robert E. Silverman, "Using the S-R Reinforcement Model",

individual, tiap peserta didik menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakannya, dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Setiap peserta didik harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan program pengajaran. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.¹¹⁶

1) Penegasan tujuan.

Peserta didik diberi penjelasan tentang pentingnya mempelajari tujuan dan bahan tertentu. Atau, paling tidak mereka diberi uraian secara jelas tentang hal yang harus mereka pelajari.

2) Pelaksanaan pengajaran

Peserta didik belajar secara individual melalui media buku-buku ataupun media elektronik. Kegiatan belajar mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar atau perilaku yang dinyatakan dalam tujuan program. Mereka belajar dengan cara memberikan respon secara cepat terhadap persoalan-persoalan yang diberikan.

3) Pengetahuan tentang hasil.

Kemajuan peserta didik dapat segera diketahui oleh peserta didik sendiri, sebab dalam model kurikulum ini umpan balik selalu diberikan. Peserta didik dapat segera mengetahui apa yang telah mereka kuasai dan apa yang masih harus dipelajari lebih serius.

c. Organisasi bahan ajar

Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari

in Elliot W. Eisner and Elizabeth Vallance, *Conflicting Conceptions of Curriculum*, (Berkeley: MrCutrhan Publishing Corporation, t.t.), hal. 64.

116 Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 97. Juga: John D. Mc. Neil, *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif*, hal. 65.

disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Tujuan akhir program dinyatakan secara tepat dan operasional dan tujuan ini merupakan dasar untuk mengorganisasikan bahan pembelajaran. Bahan ajar atau kompetensi yang luas/besar dirinci menjadi bagian-bagian atau sub-kompetensi yang lebih kecil, yang menggambarkan objek atau indikator. Urutan dari objektif-objektif atau indikator-indikator ini pada dasarnya menjadi inti organisasi bahan.¹¹⁷

d. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, dan pada suatu unit atau semester. Fungsi evaluasi ini bermacam-macam, sebagai umpan balik bagi peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan satuan pelajaran (evaluasi formatif), umpan balik bagi peserta didik pada akhir program atau semester (evaluasi sumatif). Evaluasi juga dapat menjadi umpan balik bagi pendidik dan pengembang kurikulum untuk penyempurnaan kurikulum. Evaluasi yang mereka gunakan umumnya berbentuk tes objektif. Sesuai dengan landasan pemikiran mereka, bahwa model pengajarannya menekankan sifat ilmiah, bentuk ini tes dipandang yang paling cocok.¹¹⁸

Pendekatan pengembangan kurikulum teknologis tidak terlepas dari beberapa keterbatasan atau kelemahan. Model ini terbatas kemampuannya untuk mengajarkan bahan ajar yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi (analisis, sintetis, evaluasi) juga bahan-bahan ajar yang bersifat afektif. Beberapa percobaan menunjukkan kemampuan peserta didik untuk mentransfer hasil belajar yang cukup rendah.

117 *Ibid.*, hal. 66.

118 Nana Syodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hal. 98.

Pembelajaran teknologis sukar untuk dapat melayani bakat-bakat peserta didik belajar dengan metode-metode khusus. Metode pembelajaran mereka cenderung seragam. Keberhasilan belajar peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh sikap mereka, bila sikapnya positif maka peserta didik akan berhasil, tetapi bila sikapnya negatif, tingkat penguasaannya pun relatif rendah. Masalah kebosanan juga berpengaruh terhadap proses belajar.¹¹⁹

5. Pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan guru/pendidik

Bagian ini memuat uraian tentang pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan guru/pendidik, yang selama ini digunakan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) di Indonesia.

Salah satu model pengembangan kurikulum dengan pendekatan teknologik adalah *competency based education* atau *performance based education*. Khusus pendidikan guru disebut *competency based teacher education* (CBTE) atau *performance based teacher education* (PBTE). Pengembangan pendidikan sistem instruksional (PPS1) merupakan salah satu model pendekatan teknologik yang digunakan untuk pengembangan program pendidikan di Dikdasmen. *Applied Approach* yang diperkenalkan di beberapa perguruan tinggi merupakan model lain lagi dari pendekatan teknologik. Menyusun program perkuliahan dengan menetapkan TIU (tujuan instruksional umum) dan TIK (tujuan instruksional khusus) merupakan penerapan parsial dari pendekatan teknologik. Evaluasi hasil belajar dengan *criterion referenced evaluation* atau evaluasi berdasar patokan merupakan model evaluasi dengan pendekatan teknologik.¹²⁰

Menurut ahli teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum

119 *Ibid.*

120 Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial...*, hal. 79.

model lama, penyusunan kurikulum, penyusunan buku-buku, serta perangkat kurikulum lainnya lebih bersifat seni, dan didasarkan atas kepentingan politik, daripada landasan-landasan ilmiah dan teknologis. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah dan keterampilan yang akan menjadi isi kurikulum disusun dengan fokus pada nilai-nilai tersebut.

Pengembangan kurikulum teknologis berpegang pada beberapa kriteria, yaitu: 1) prosedur pengembangan kurikulum dinilai dan disempurnakan oleh pengembang kurikulum yang lain; dan 2) hasil pengembangan terutama yang berbentuk model adalah yang bisa diuji coba ulang, dan hendaknya memberikan hasil yang sama.

Inti dari pengembangan kurikulum teknologis adalah penekanan pada kompetensi. Pengembangan dan penggunaan alat dan media pengajaran bukan hanya sebagai alat bantu tetapi bersatu dengan program pengajaran dan ditujukan pada penguasaan kompetensi tertentu.

Pengembangan kurikulum ini membutuhkan kerjasama dengan penyusun program dan penerbit media elektronik dan media cetak. Sisi lain yang harus dicegah yaitu jangan sampai pengembangan kurikulum menjadi objek bisnis. Pengembangan pengajaran yang betul-betul berstruktur dan bersatu dengan alat dan media membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Inilah hambatan utama pengembangan kurikulum, terutama bagi sekolah atau daerah-daerah yang kemampuan finansialnya masih rendah.

Pemecahan masih dapat dilakukan dengan menerapkan model kurikulum teknologis, yang lebih menekankan pada teknologi sistem dan kurang menekankan pada teknologi alat. Pendekatan ini biaya dapat lebih ditekan, di samping memberi kesempatan kepada

pelaksana pengajaran, terutama guru-guru untuk mengembangkan sendiri program pengajarannya. Model ini dikenal di Indonesia dengan nama satuan pelajaran dalam lingkungan pendidikan dasar dan menengah atau satuan acara perkuliahan pada perguruan tinggi, sebagai bagian dari sistem instruksional atau desain instruksional.

Pengembangan kurikulum teknologis terutama yang menekankan teknologi alat, perlu mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, formulasi perlu dirumuskan terlebih dahulu apakah pengembangan alat atau media tersebut benar-benar diperlukan. Hal ini menyangkut pasaran. *Kedua*, spesifikasi, diperlukan adanya spesifikasi dari alat atau media yang akan dikembangkan, baik dilihat dari segi kegunaannya maupun ketepatan perigunaannya. Spesifikasi juga meliputi spesifikasi situasi lingkungan tempat belajar, standar perilaku belajar, serta keterampilan-keterampilan untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, *prototype* dan *sekuens-sekuens* pengajaran perlu diuji-cobakan dalam bentuk *prototype-prototipe*, demikian juga format-format media, dan organisasi. *Keempat*, unit pengajaran diuji-cobakan pada sejumlah sampel siswa untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahannya. Data tentang kebaikan dan kekurangan-kekurangan sangat diperlukan bagi penyempurnaan. *Kelima*, hasil dari pengembangan dicoba diterapkan di dalam sistem pengajaran yang berlaku. Proses pelaksanaan, hasil dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi dicatat sebagai umpan balik bagi penyempurnaan selanjutnya.¹²¹

Keberhasilan belajar peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh sikap mereka, bila sikapnya positif maka peserta didik akan berhasil, tetapi bila sikapnya negatif, tingkat penguasaannya pun relatif rendah. Masalah kebosanan juga berpengaruh terhadap proses

121 *Ibid.*

belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jabiri, Muhammad, Abid, *Bunyah al-aql al-Arabi: Dirasah Tablilyyah Naqdiyyah li Nudlumi al-Ma'rifah fi al-tsaqafah al-arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyyah, 1990.
- Arikunto, Suharsimi, dkk., *Manajemen Kurikulum*, Yogyakarta: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY, 2000.
- Barnadib, Imam, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2002.
- Beane, James, A., et-al., *Curriculum Planning and Development*, New York: Macmillan Company, 1944.
- Mahmud Arif, "Epistemologi Pendidikan Islam Kajian atas Nalar Masa Keemasan Islam dan Implikasinya di Indonesia", *Disertasi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Nasution, S., *Asas-Asas Kurikulum, Edisi Kedua, Cet. Kelima*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Neil, John, D., Mc., *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif, Terjemah: Subandijah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1988.
- Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam, Terjemah: Hasan Langgulung*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Salinan Permendikbud No 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013

- Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, Cet. Ketiga*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- Sukmadinata, Nana, Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Widodo, Sembodo, Ardi, *Struktur Keilmuan Kitab Kuning Perspektif NU dan Muhammadiyah*, Jakarta: Rakasta Samasta, 2008.

BAB III

FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN KURIKULUM

A. Perencanaan Kurikulum

1. Pengertian, Fungsi dan Landasan Perencanaan Kurikulum

a. Pengertian perencanaan kurikulum

Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa/peserta didik.¹²²

Perencanaan kurikulum merupakan sebuah proses yang komprehensif, ketika tujuan (*end*) dan alat (*means*) belajar diidentifikasi sebagai berikut:¹²³ Perencanaan kurikulum merupakan suatu proses tatkala peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tujuan pembelajaran, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar, serta penelaahan

122 Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Rosda karya, 2006), hlm. 152

123 Mida Latifatul Muzamiroh, *Kupas Tuntas Kurikulum 2013*, (Kata Pena, 2013), hlm.5

keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa adanya perencanaan kurikulum, sebuah sistematika sebagai pengalaman belajar tidak akan pernah saling berhubungan dan tidak akan mengarah pada sebuah tujuan yang benar-benar diharapkan.

b. Fungsi perencanaan kurikulum

Pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh dan rinci, karena memiliki multi fungsi sebagai berikut:¹²⁴

- 1) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.
- 2) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dan oleh karena itu perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, selain seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimilikinya.
- 3) Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal.

Perencanaan kurikulum merupakan sebuah pedoman, penggerak, dan juga sebagai motivasi dalam implementasi kurikulum. Jika sebuah kurikulum dihasilkan tanpa

124 *Ibid...*, hlm. 152

perencanaan yang baik maka ibarat sebuah peta yang dibuat dengan tidak tepat dan dibawa berlayar oleh perahu yang berjalan ditengah samudra, dapat dibayangkan apa yang terjadi. Peta itu akan membawa perahu pada dermaga yang bukan menjadi tujuannya. Pendidikan pun demikian, jika kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum yang tidak direncanakan dengan baik, sudah tentu tujuan pembelajaran tidak akan pernah tercapai dengan baik pula.

2. Prinsip-Prinsip dan Karakteristik Perencanaan Kurikulum

a. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum

Segala bentuk perencanaan kurikulum bisa terjadi pada semua tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan tingkatan kelas. Secara umum sebuah perencanaan kurikulum yang realistis seharusnya disusun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Prinsip pertama, perencanaan kurikulum seharusnya berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa.
- 2) Prinsip kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses.
- 3) Prinsip ketiga, perencanaan kurikulum seharusnya mengandung keputusan-keputusan mengenai berbagai isu dan topik.
- 4) Prinsip keempat, perencanaan kurikulum harus melibatkan banyak kelompok.
- 5) Prinsip kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan dalam segala tingkatan (level).
- 6) Prinsip keenam, perencanaan kurikulum merupakan suatu

125 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 83-84

proses yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pengalaman-pengalaman siswa ketika mengikuti pembelajaran di kelas dan pengalaman siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus dipertimbangkan dalam perencanaan kurikulum. Pembelajaran akan lebih berarti dan lebih menyentuh siswa ketika berkenaan dan berkaitan dengan pengalamannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pengembangan kurikulum di Indonesia diarahkan kepada penguasaan kecakapan hidup (*life skill*) yang sebenarnya jika kita kaji lebih mendalam arahnya kepada penguasaan berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk mempertahankan hidup.

Isu-isu yang “*up to date*” juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan kurikulum, mengingat pengembangan kurikulum diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan dan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Kurikulum akan dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat dan akan bertahan sampai kurikulum tersebut tidak lagi relevan atau tidak mampu lagi menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

b. Karakteristik perencanaan kurikulum

Terdapat beberapa aspek yang harus mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan kurikulum. Adapun aspek-aspek yang menjadi karakteristik perencanaan kurikulum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹²⁶

- 1) Perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada sebuah konsep yang jelas mengenai berbagai hal yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia.
- 2) Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka

126 Mida Latifatul Muzamiroh, *Kupas...*, hlm. 97-79

kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasikan unsur esensial belajar mengajar efektif.

- 3) Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan individual setiap peserta didik, untuk membantu peserta didik tersebut dalam ruang menuju kehidupan yang lebih kondusif.
- 4) Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas terhadap kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu peserta didik dan masyarakat.
- 5) Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkrit, agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif.
- 6) Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditunjukkan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, para pendidiklah yang berkewajiban untuk memberitahukannya.
- 7) Pendidik berhak bertanggung jawab mengidentifikasi program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Masyarakat boleh saja memberikan saran, namun keputusan akhir ada pada pendidik.
- 8) Perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan beragamanya unsur-unsur kurikulum, yang menuntut tentang keahlian secara luas.
- 9) Perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada setiap jenjang dan tingkatan

sekolah. Berkaitan dengan hal ini, kurikulum harus terdiri atas integrasi berbagai pengalaman yang relevan.

- 10) Program sekolah harus dirancang untuk mengoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan.
- 11) Masing-masing sekolah mengembangkan dan memperluas suatu struktur organisasi yang memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum.
- 12) Perlunya penelitian tindakan dan evaluasi, untuk menyediakan revitalisasi rencana dan program kurikulum.
- 13) Partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan situasi belajar mengajar yang spesifik.
- 14) Harus diadakan evaluasi secara kontinu terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kegiatan kurikulum.
- 15) Berbagai jenjang sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan dan perkembangan siswa. Sehingga perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi.

3. Komponen Perencanaan Kurikulum

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa aspek dalam perencanaan kurikulum meliputi perencanaan terhadap desain, implementasi dan evaluasi. Tiga komponen tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan yang disebut produk. Produk inilah yang selanjutnya dijadikan pegangan dan pedoman dalam menjalankan pendidikan di sekolah.

Jika dikaji lebih dalam tentang komponen-komponen apa saja yang perlu direncanakan, secara sederhana dapat dideskripsikan

sebagai berikut:¹²⁷ 1) tujuan, diperlukan untuk memberikan arah pada kegiatan yang dilakukan; 2) isi, merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan; 3) aktivitas belajar, adalah berbagai aktivitas yang diberikan pembelajar dalam situasi belajar mengajar; 4) sumber belajar, sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan antara lain buku dan bahan cetak, perangkat lunak komputer, media audio visual; 5) evaluasi, berguna untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan tujuan, dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terbuka.

4. Pihak yang terlibat dalam Perencanaan Kurikulum

Sebagai Pembahasan lebih lanjut dari perencanaan kurikulum, perlu dikemukakan peran-peran dari pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum, yaitu sebagai berikut:¹²⁸

a. Administrator

Administrator di bawah kepemimpinan kepala sekolah berperan sebagai penyusun kalender pendidikan. Kepala sekolah dalam penyusunan kurikulum ada yang bersifat aktif, ada juga yang pasif dengan memberikan tugas tersebut pada bagian dibawahnya. Sering pula administrator memosisikan diri sebagai pimpinan pembelajaran, tetapi ada juga yang mengakui sebagai manajer utama. Kepala sekolah juga berperan sebagai pemegang tanggung jawab untuk menjalankan semua hal-hal di sekolah, dalam membuat keputusan pelaksanaan program dan administrasi sekolah. Selain itu juga sebagai penasihat dalam hal yang berkaitan dengan kurikulum.

127 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 87

128 *Ibid.*, hlm. 87-89

b. Pelajar/siswa

Pelajar atau siswa dapat memiliki peran langsung dan tidak langsung dalam pengembangan kurikulum. Seperti di beberapa sekolah, siswa dapat disertakan dalam penyusunan kurikulum dengan memasukkannya sebagai anggota penyusun. Namun, hal ini jarang terjadi. Hal ini dilakukan agar materi dari kurikulum dapat diterima dengan baik. Sedangkan peran tidak langsung ada pada keadaan input siswa. Hal terpenting dalam peran siswa dalam memberikan umpan balik tentang kurikulum kepada para penyusun sehingga masukan dari siswa dapat digunakan sebagai petunjuk penyusunan kurikulum.

c. Warga masyarakat

Peran orang tua dan warga masyarakat dalam mengembangkan kurikulum pada saat ini semakin meluas, mereka berperan dengan banyak cara, diantaranya dengan membentuk komite untuk memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum. Tidak jarang pula sekolah meminta mereka sebagai sukarelawan dalam kegiatan tersebut. Seperti di wilayah perkotaan, pada lingkungan bisnis, mereka berperan dalam mengembangkan sekolah dengan menyediakan ahli, bahan, dan biaya. Menurut Saylor, Alexander, dan Lewis; warga masyarakat dapat membantu perencanaan kurikulum dalam menyusun, tujuan, dan rencana, implementasi dan evaluasi.

d. Penyusun kurikulum

Penyusun kurikulum (biasanya berbentuk tim penyusun) merupakan pemegang tanggung jawab terbesar yang bekerja sama satu dengan lain untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum. Kualitas kurikulum

ditentukan kerja mereka sehingga mereka yang menjadi penentu kualitas rancangan kurikulum yang dihasilkan.

e. Guru

Guru merupakan kelompok dominan dalam perencanaan kurikulum. Guru merupakan pihak yang ikut dalam merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan bahkan menerima umpan balik dari siswa. Hingga mereka menemukan ide-ide baru bagi perbaikan program. Guru dapat menempati posisi sebagai inti dalam kelas, *tim/grade/department*, sekolah, dan tingkat distrik atau sektor, juga pada sektor dan tingkatan yang lain.

f. Pimpinan penyusun kurikulum

Pimpinan penyusun kurikulum memegang peran utama dalam kegiatan kurikulum karena kesuksesan sebuah kurikulum merupakan tanggung jawab dari pimpinan kurikulum. Kemampuannya memimpin kegiatan sangat berpengaruh pada hasil yang dicapai dalam menghasilkan kurikulum. Pimpinan penyusun kurikulum dapat berasal dari pengawas, konsultan kurikulum, direktur pembelajaran, dan asisten kepala sekolah yang membidangi kurikulum.

B. Pengorganisasian Kurikulum

1. Pengertian pengorganisasian kurikulum

Setelah menetapkan suatu rencana kurikulum, selanjutnya dilakukan pengorganisasian kurikulum. George R. Terry dalam Rusman (2008), mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan

tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Makna ini memberikan pengertian pengorganisasian dalam konteks manajemen secara umum.¹²⁹

Menurut Hamalik, pengorganisasian dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni:¹³⁰ secara struktural dalam konteks manajemen, dan secara fungsional dalam konteks akademik atau kurikulum. Pengorganisasian kurikulum selayaknya dipandang dari kedua pendekatan tersebut, yaitu konteks manajemen dan konteks kurikulum.

Suatu organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen yaitu:¹³¹ 1) organisasi perencanaan kurikulum yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pengembangan kurikulum atau suatu pengembang kurikulum; 2) organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum, baik pada tingkat daerah maupun tingkat sekolah atau lembaga pendidikan yang melaksanakan kurikulum; 3) organisasi dalam evaluasi kurikulum yang melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi kurikulum.

Masing-masing organisasi tersebut dilaksanakan oleh suatu susunan kepengurusan yang ditentukan sesuai dengan struktur organisasi dengan tugas-tugas pekerjaan tertentu.

Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi yaitu:¹³² 1) kurikulum mata pelajaran, yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran secara terpisah; 2)

129 Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: SPS Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), hlm.

130 *Ibid...*, hlm 75

131 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 75

132 *Ibid.*, hlm. 75

kurikulum bidang studi, yang mengfungsikan beberapa mata pelajaran sejenis; 3) kurikulum integrasi, yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu; 4) *core curriculum*, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.

Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Organisasi kurikulum berhubungan erat dengan kualitas kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Organisasi kurikulum harus dipilih dan diatur sedemikian rupa untuk dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam sehingga peserta didik memperoleh sesuatu yang berharga dari program pendidikan yang telah ditetapkan.¹³³

Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan ataupun pembelajaran yang ditetapkan.¹³⁴ Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, penentuan isi bahan pembelajaran, penentuan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum.

133 Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), hlm. 94

134 Sukiman, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm. 58

2. Tujuan pengorganisasian kurikulum

- a. Mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan. Salah satu dari tujuan organisasi kurikulum tersebut adalah bagaimana mempermudah dalam struktur terhadap bahan dan pendidik. Struktur kurikulum ini diartikan bahwa dalam pembuatan suatu pedoman perencanaan terhadap bahan yang akan diajarkan itu memiliki pembagian yang cukup tertata dalam suatu tingkatan dalam KBM.
- b. Mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek dalam kurikulum adalah berupa penilaian yang dilakukan oleh sekolah itu sifatnya berupa kuantitatif terhadap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sedangkan dalam jangka panjang tujuan tersebut memuat bagaimana daya dan kreasi yang dimiliki yang pernah diajarkan suatu lembaga pendidikan itu dapat diterapkan dengan baik dilingkungannya.
- c. Mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan. Pengkhususan bahan ajar disini diartikan sebagai tindakan dimana bahan yang diajarkan itu lebih terfokus dalam suatu bidang yang menjadi bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa dalam proses KBM.
- d. Mempermudah dalam menggunakan strategi dan metode yang dilakukan oleh para pendidik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh organisasi kurikulum untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan suatu strategi yang sangat penting. Strategi tersebut digunakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- e. Mempermudah dalam koordinasi dan kerja sama antar

bagian baik pendidik maupun mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan koordinasi adalah suatu yang memiliki interaksi satu sama lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi.

3. Prinsip-prinsip pengorganisasian kurikulum

Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, diantaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*), urutan bahan (*sequence*), kontinuitas, keseimbangan dan keterpaduan (*integrated*).¹³⁵

- a. Ruang lingkup (*scope*) dan urutan bahan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu kurikulum. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pembelajaran yang berbeda. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran lingkup materi pelajarannya cenderung menyajikan bahan pelajaran yang bersumber dari kebudayaan dan informasi atau pengetahuan hasil temuan masa lalu yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Sementara itu, organisasi kurikulum integritas lingkup materi pelajarannya diambil dari masyarakat maupun dari aspek siswa (minat, bakat, kebutuhan). Tidak hanya lingkup materi pembelajaran yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum, tetapi bagaimana urutan (*sequence*) bahan tersebut harus disajikan dalam kurikulum.
- b. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya.

135 Tim Pengembang MKPD, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 88

Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam penerapan faktor ini. Artinya materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam yang dikembangkan berdasarkan keluasan secara vertikal maupun horizontal.

- c. Keseimbangan bahan pelajaran perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sosial budaya, maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum. Ada dua aspek yang harus selalu diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum: 1) keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum, dan 2) keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntutan masyarakat maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, religius, seni-apresiasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum.
- d. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus menjadi bahan pertimbangan dalam organisasi kurikulum. Menurut Nana Syaodih S. Salah satu prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum adalah *fleksibilitas*, yaitu kelenturan kurikulum melayani perbedaan kemampuan, minat dan kebutuhan peserta didik dan pengguna. *Fleksibilitas* ini diwujudkan dalam bentuk pengorganisasian kurikulum. Suatu kurikulum yang *fleksibilitas* adalah kurikulum yang memberikan alternatif yang luas sehingga siswa bisa memilih program, mata pelajaran, model pembelajaran, dan latihan yang sesuai dengan kemampuan,

minat, kebutuhan, dan kondisi siswa.¹³⁶

Ada pendapat lain tentang prinsip-prinsip pengorganisasian kurikulum yaitu:¹³⁷ terdapat dua prinsip dalam pengorganisasian kurikulum sekolah atau pengalaman belajar. Pengorganisasian kurikulum harus bersifat kronologis dan aplikatif. Kronologis artinya pengalaman belajar harus diorganisasikan secara bertahap sesuai dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan siswa. Adapun aplikatif berarti pengalaman belajar harus benar-benar dapat diterapkan kepada siswa.

4. Jenis pengorganisasian kurikulum

Kurikulum bermacam-macam bentuknya. Bentuk yang paling dikenal dan sangat meluas pemakaiannya ialah *subject curriculum*. *Subject* berarti mata pelajaran. *Subject* jangan dikacaukan dengan *subject matter*, yang berarti bahan pelajaran. Setiap kurikulum juga *integrated curriculum* mempunyai *subject matter*, yaitu mempunyai bahan pelajaran tertentu. Jadi, *subject curriculum* berarti kurikulum yang terdiri atas sejumlah mata pelajaran, disebut juga *subject centered curriculum* yang artinya kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Karena mata pelajaran itu pada umumnya diajarkan secara terpisah-pisah, maka disebut juga *separate subject-curriculum*. Secara umum ada dua bentuk organisasi kurikulum, yaitu sebagai berikut:¹³⁸

136 Rusman, *Manajemen Kurikulum*,..., hlm. 60-61

137 Rahmat Raharja, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Yogyakarta: Baituna Publishing, 2012), hlm. 73

138 S Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 77

- a. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*)
- 1) Mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subject curriculum*)

Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan dalam dunia pendidikan kita karena memiliki karakteristik yang sangat sederhana dan mudah dilaksanakan. Namun tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. *Subject separated curriculum* bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi terdahulu.

Aktivitas siswa dalam proses pembelajarannya bentuk kurikulum ini cenderung tidak diperhatikan bahkan diabaikan. Karena, yang dianggap penting adalah upaya sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran untuk dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Demikian pula bahan pelajaran yang dipelajari siswa, umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Secara fungsional bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subject curriculum*) adalah sebagai berikut:¹³⁹

- a) Bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, yang menggambarkan tidak ada hubungannya antara materi satu dengan yang

139 Rusman, *Manajemen Kurikulum...*, hlm, 63

lainnya.

- b) Bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual.
- c) Proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif.
- d) Bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat.
- e) Bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang.
- f) Proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat dan kebutuhan siswa.

Sementara itu kelebihan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subject curriculum*) adalah sebagai berikut:¹⁴⁰

- a) Bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana dan mudah dipelajari.
- b) Kurikulum dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu.
- c) Kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan.
- d) Bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada.

Bahan pelajaran yang sifatnya informasi sebagian besar akan diperoleh siswa dari buku pelajaran. Siswa akan lebih

140 *Ibid...*, hlm. 63

banyak menghafal dalam mempelajari pengetahuan yang sifatnya terlepas-lepas sehingga kemampuan siswa kurang berkembang dan cenderung kurang mengoptimalkan potensi siswa sebagai individu.

2) Mata pelajaran gabungan (*correlated curriculum*)

Kurikulum bentuk ini pun sudah lama digunakan dalam pendidikan kita. Korelasi kurikulum atau sering disebut *broad field* pada hakikatnya adalah penyatuan beberapa mata pelajaran yang sejenis, seperti IPA (didalamnya tergabung fisika, biologi, dan kimia) dan IPS. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangannya yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran.

Korelasi kurikulum merupakan penggabungan dari mata pelajaran yang sejenis secara insidental. Bahan kurikulum yang terlepas-lepas ini diupayakan untuk disatukan dengan bahan kurikulum atau mata pelajaran yang sejenis. Sehingga, dapat memperkaya wawasan siswa dari berbagai disiplin ilmu. Namun, kenyataan di lapangan atau di sekolah terbukti bahwa guru-guru masih berpegang pada latar belakang pendidikannya. Umpannya ketika seorang guru sejarah mengajarkan bidang studi IPS, dalam pelaksanaannya masih mengutamakan pelajaran sejarahnya dari pada substansi IPS itu sendiri. Demikian pula dalam penilaiannya cenderung akan banyak mengukur atau menilai substansi sejarahnya dari pada substansi IPS-nya. Salah satu penyebabnya karena guru bersangkutan belum memahami prinsip-prinsip pola penggabungan mata pelajaran tersebut.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pola kurikulum ini. Kekurangannya adalah sebagai berikut:¹⁴¹

- a) Bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam.
- b) Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa.
- c) Kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa.
- d) Apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak.

Sementara itu, kelebihan pola mata pelajaran gabungan (*correlated curriculum*) adalah sebagai berikut:¹⁴²

- a) Bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran.
- b) Memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi.
- c) Menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis.

Bahan pelajaran dalam kurikulum ini memungkinkan substansi pelajarannya memiliki pengertian-pengertian yang lebih mendalam dibanding dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Sebagaimana dalam korelasi kurikulum, masih memungkinkan guru akan lebih banyak memberikan substansi prinsip-prinsip dan generalisasi. Sehingga, guru dapat menyampaikan materi atau membimbing siswa

141 Rusman, *Manajemen Kurikulum...*, hlm. 64

142 *Ibid...*, hlm 64

untuk mempelajari bahan pelajaran secara utuh (dalam lingkup *broad field*), dan dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap pelajaran.

3) Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*)

Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus integred atau terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan.

Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini akan bermanfaat secara fungsional serta dalam pembelajaran akan dapat membentuk kemampuan siswa secara proses maupun produk. Bahan pelajaran selalu aktual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa sebagai individu yang utuh sehingga bahan pelajaran yang dipelajari selalu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa.

Guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai strategi belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik kurikulum tersebut. Pembelajaran yang mungkin banyak digunakan seperti pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit (*unit teaching*), *inkuiri*, *discovery*, dan pendekatan tematik yang

dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Pengembangan program pembelajaran perlu dilakukan secara bersama-sama antara siswa dengan guru, tetapi sebelumnya guru harus menyiapkan draf program pembelajaran sebagai acuan yang perlu dikembangkan bersama-sama dengan siswa atau mungkin dengan masyarakat.

Bahan pelajaran yang dipelajari siswa dirumuskan dalam pokok bahasan berupa topik atau pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Proses pembelajaran lebih bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuan dan potensi siswa, sehingga tidak mengharapakan hasil belajar yang sama dari semua siswa. Jika dilihat dari prosesnya, kurikulum ini dalam pengembangannya lebih banyak dipercayakan pada guru-guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri.

Terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam kurikulum bentuk ini. Kekurangannya adalah sebagai berikut:¹⁴³ 1) ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang *uniform*, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan; 2) kurikulum ini tidak memiliki aturan yang logis dan sistematis; 3) diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok; 4) guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini; 5) masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum.

Kekurangan lain dari kurikulum ini adalah sebagai berikut:¹⁴⁴ 1) kurikulum dibuat oleh guru dan siswa

143 Rusman, *Manajemen Kurikulum...*, hlm. 66

144 *Ibid.*

sehingga memerlukan kesiapan kemampuan guru secara khusus dalam mengembangkan kurikulum seperti ini; 2) bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis; 3) bahan pelajaran tidak bersifat sederhana; 4) memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda secara mencolok; 5) kemungkinan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Oleh karena itu, perlu adanya pengorganisasian yang lebih optimal hingga dapat mengurangi-kekurangan-kekurangan tersebut.

Sementara itu, kelebihan dari kurikulum ini adalah sebagai berikut:¹⁴⁵ 1) mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dan menyelesaikan suatu topik atau permasalahan; 2) memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu; 3) memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama (*cooperative*); 4) mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran; 5) memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal; 6) memberikan kesempatan kepada untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung; 7) membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat; 8) menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain.

Secara ideal hasil dari kurikulum ini diharapkan dapat memberikan kemampuan siswa yang berintegritas, yang menggambarkan manusia yang harmonis sesuai

145 *Ibid.*

dengan kebutuhan masyarakat, maupun sesuai dengan tuntutan potensi siswa. Kemampuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah merupakan bagian dari karakteristik pembelajaran dalam kurikulum ini. Masalah yang diselesaikan biasanya berkaitan dengan masalah sosial, pekerjaan maupun masalah-masalah yang sifatnya aktual. Informasi dan kemampuan yang dipelajari siswa akan selalu sesuai dengan perkembangan sosial budaya maupun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat siswa. Penilaian yang dikembangkan dalam kurikulum ini cenderung lebih komprehensif dan terpadu, yaitu penilaian dilakukan secara utuh terhadap kemampuan siswa selama proses dan setelah pembelajaran selesai.

4) Kurikulum inti (*core curriculum*)

Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu (*integrated curriculum*). Beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah:¹⁴⁶ a) kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan (*continue*) selalu berkaitan dan direncanakan secara terus menerus; b) Isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan; c) isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual; d) isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial; e) isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat

146 Rusman, *Manajemen Kurikulum...*, hlm. 67

problema, pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadu.

Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa aspek lingkungan menjadi bahan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum ini. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa *core curriculum* adalah bagian dari kurikulum integritas atau kurikulum terpadu sehingga program pembelajaran untuk kurikulum ini harus dikembangkan secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Kurikulum terpadu perlu didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan sehingga aktivitas dan substansi materi yang dipelajari siswa menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna. Topik-topik yang dapat diangkat dalam kurikulum ini selalu berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan lingkungan, diantaranya:¹⁴⁷ a) penanggulangan bahaya banjir bagi kehidupan manusia; b) memahami fungsi otak pada manusia; dan c) membiasakan penggunaan media pembelajaran.

Masih banyak topik lain dalam kurikulum ini yang dapat dibahas dan diangkat sebagai topik problema dalam pembelajaran, tetapi dalam implementasinya tidak lepas dari prinsip-prinsip maupun karakteristik yang telah dikembangkan di atas.

5) *Social functions* dan *persistent situation*

Social functions merupakan bagian dari kurikulum terpadu, kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan manusia dalam masyarakat. Kegiatan yang dilakukan

147 *Ibid.*

manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat diantaranya:¹⁴⁸ a) memelihara dan menjaga kemampuan masyarakat; b) Perlindungan dan pelestarian hidup, kekayaan dan sumber alam; c) komunikasi dan transportasi; d) kegiatan rekreasi; e) produksi dan distribusi barang dan jasa; f) ekspresi rasa keindahan; g) kegiatan pendidikan; h) integrasi kepribadian; i) konsumsi benda dan jasa. *Social functions* ini dapat diangkat berbagai kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Kegiatan manusia pada masyarakat setiap saat akan berubah sesuai dengan perkembangan maupun era globalisasi sehingga substansi *social functions* pun harus bersifat dinamis.

Sebagai modifikasi dari *social functions* adalah *persistent life situations*. Kajian substansi dalam kurikulum bentuk ini lebih mendalam dan terarah. *Persistent life situations* karakteristiknya adalah situasi yang diangkat senantiasa yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Secara umum ada tiga kelompok situasi yang akan dihadapi manusia.

- a) Situasi mengenai perkembangan individu manusia, diantaranya adalah kesehatan (manusia perlu memenuhi kebutuhan fisiologis, emosional, sosial, sampai pada pencegahan penyakit); intelektual (manusia memerlukan kemampuan mengemukakan pendapat, memahami pikiran orang lain dan bekerja yang efektif); moral (kebebasan individu, tanggung jawab atas diri dan orang lain); dan keindahan
- b) Situasi untuk perkembangan partisipasi sosial

148 *Ibid...*, hlm. 68

- Hubungan antar pribadi: mengusahakan hubungan sosial dan hubungan kerja yang baik dengan orang lain.
 - Keanggotaan kelompok: memasuki kelompok, partisipasi, dan kepemimpinan dalam kelompok.
 - Hubungan antar kelompok: kerja sama dengan kelompok rasional, agama, dan nasional, kelompok sosio-ekonomi.
- c) Situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor ekonomi dan daya lingkungan.
- Bersifat alamiah: gejala fisik tanaman, binatang, serangga, daya fisik, dan kimiawi.
 - Sumber teknologi: penggunaan serta pengembangan teknologi.
 - Struktur dan daya-daya sosial ekonomi: mencari nafkah, memperoleh barang-barang jasa, mengusahakan kesejahteraan sosial, mempengaruhi pendapat umum, partisipasi dalam pemerintahan lokal maupun nasional.

Pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) merupakan bagian dalam pengembangan kurikulum terpadu karena pengembangan kecakapan hidup seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan disiplin ilmu atau mata pelajaran yang lain. Supaya tidak menjadi dangkal, substansi pengembangan kecakapan hidup harus terpadu dengan beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum disekolah tersebut, jadi bukan sekedar pendidikan keterampilan vokasional dasar yang terpisah-pisah.

6) *Experience* atau *activity curriculum*

Experience curriculum sering disebut juga dengan *activity curriculum*. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini pada hakikatnya siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa.

Salah satu karakteristik dari kurikulum ini adalah untuk memberikan pendidikan keterampilan atau kejuruan, tetapi di dalamnya mencakup pengembangan intelektual dan akademik yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kejuruan.¹⁴⁹ Sehingga, siswa belajar tidak hanya bersifat manual, tetapi bersifat reaktif dan problematik sesuai dengan keterampilan yang sedang dipelajarinya.

C. Pelaksanaan/Implementasi Kurikulum

1. Pengertian pelaksanaan/implementasi kurikulum

Kamus *Oxford Advance Learner's Dictionary* mengemukakan bahwa implementasi adalah:¹⁵⁰ “*outsome thing into effect*” atau penerapan sesuatu yang memberikan efek. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Miller and Seller: bahwa “*in some case implementation has been identified with instructoin*” lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu

149 Rusman, *Manajemen Kurikulum...*, hlm. 62-70

150 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 93-94

penerapan konsep ide program atau tatanan kurikulum kedalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas baru sehingga terjadinya perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.

Fullan mendefinisikan suatu gagasan, program atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau diharapkan untuk berubah.¹⁵¹ Sehingga, implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji-cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisik.

2. Pendekatan dan model implementasi kurikulum

Pengembangan model implementasi kurikulum mengandung maksud upaya-upaya memaksimalkan pelaksanaan kurikulum untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sehingga, pelaksana kurikulum (guru, kepala sekolah, serta manajemen sekolah) dalam penerapannya (dalam bentuk proses belajar mengajar atau proses pendidikan dan latihan) dapat melakukan perubahan (*modification*), penyesuaian (*adaptation*), atau pembaharuan (*innovation*) berdasarkan kondisi kebutuhan, dan tuntutan setempat. Sehingga, pengembangan model implementasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui modifikasi, adaptasi, inovasi atau gabungan dari dua atau ketiganya dalam merancang suatu kurikulum.

Jackson menjelaskan tiga pendekatan dalam implementasi kurikulum yaitu “*fidelity perspective, mutual adaptation, dan enactment curriculum*” yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵²

151 *Ibid...*, hlm. 93-94

152 Jackson.P.W. *Handbook of Reseach on Curriculum*, (New York: Mac Millan

a. *Fidelity perspective*

Jackson menyebutkan bahwa dalam *fidelity perspective* kurikulum dipandang sebagai rancangan (program) yang dibuat di luar ruang kelas, kurikulum menurut perspektif ini juga dipandang sebagai sesuatu yang riil (rencana program) yang diajarkan oleh guru, pengembang kurikulum pada umumnya mempunyai spesialisasi kurikulum di luar sistem sekolah seperti konsultan, akademis atau guru. Namun demikian, ahli kurikulum tersebut dapat dipegang oleh administrator pendidikan atau komite kurikulum.

b. *Mutual adaptation*

Pendekatan ini mempunyai ciri pokok dalam implementasinya, pelaksanaan kurikulum mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi riil, kebutuhan dan tuntutan perkembangan secara kontekstual. Pendekatan berangkat dari asumsi bahwa berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar diimplementasikan sesuai rencana tetapi perlu diadaptasi sesuai kebutuhan setempat.

c. *Enactment curriculum*

Perspektif *enactment curriculum* memandang bahwa rencana program (kurikulum) bukan merupakan produk atau peristiwa (pengembangan) melainkan sebagai proses yang berkembang. Guru menggunakan rencana kurikulum eksternal sebagai acuan agar kurikulum dapat ditetapkan lebih baik dan bermakna, baik untuk dirinya maupun untuk siswa, mereka (guru) adalah *creator* dalam implementasi kurikulum. Perspektif *enactment curriculum*, kurikulum sebagai proses akan tumbuh dan berkembang

Publishing Company, 1991), hlm. 406

dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama dalam membentuk kemampuan berpikir dan bertindak.

Menurut Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins dalam bukunya *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*, dinyatakan bahwa model implementasi kurikulum terdiri atas empat model, di antaranya sebagai berikut:¹⁵³

a. *Overcoming resistance to change* (ORC)

Model penanggulangan resistensi perubahan didasarkan pada asumsi Neal Gross yang menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan upaya perubahan yang terorganisir secara rencana pada dasarnya merupakan fungsi dari kemampuan pemimpin dalam menanggulangi penolakan staf terhadap perubahan pada saat sebelum dan selama inovasi diperkenalkan.

b. *Organization development* (OD)

Model pengembangan organisasi ini menurut Schmuck dan Miles secara khusus diarahkan untuk menjembatani perubahan dan pengembangan dalam suatu organisasi. Berdasar pandangan bahwa kurikulum sebagai pengembangan organisasi, maka penerapan kurikulum memerlukan implementasi yang tidak pernah berakhir. Pendekatan ini selalu muncul gagasan baru yang dibawa ke dalam program baru. Demikian pula materi dan metode uji-coba muncul hal-hal yang baru.

c. Model bagian, unit, dan lingkaran organisasi

Model ini menyadari bahwa sekolah merupakan suatu organisasi yang secara nyata terdiri dari unit-unit seperti jurusan, kelas dan personalia, bagian-bagian ini mempunyai

153 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 97

hubungan yang *fleksibel* walaupun sistem administrasi bersifat sentralistik, kebanyakan sekolah memiliki pengendalian sentralistik demikian kecil khususnya apa yang terjadi di ruang kelas.

d. Model perubahan pendidikan

Seseorang yang akan mengimplementasi kurikulum perlu memahami karakteristik perubahan yang akan dihadapi. Seseorang sering menolak suatu inovasi karena kebutuhan untuk melakukan perubahan tidak dikenalnya, atau apabila ia sudah mengetahui tetapi tidak menerimanya berarti orang tersebut tidak dipengaruhi oleh nilai yang dipegangnya. Ketika orang memandang perubahan sejalan dengan nilai yang ada pada mereka maka mereka akan menerima inovasi tersebut dengan senang hati. Tidak jarang pula orang perlu merasakan tentang kualitas, manfaat, dan kepraktisannya untuk menerima suatu inovasi baru. Kita mengharapkan bahwa inovasi kurikulum akan memiliki kualitas tinggi dan jelas. Namun, dalam praktiknya pengembang sering kali melakukan kesalahan.

Berkenaan dengan model-model implementasi kurikulum ini, Miller and Seller menggolongkan model dalam implementasi menjadi tiga, yaitu:¹⁵⁴ *The concerns-based adaption model, model leithwood, dan model TORI.*

a. *The concerns-based adaption model (CBAM)*

Model CBAM ini adalah sebuah model deskriptif yang sikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi. Perubahan dalam inovasi ini ada dua dimensi, yakni tingkatan-tingkatan penggunaan inovasi. Perubahan yang terjadi

154 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 94-98

merupakan suatu proses bukan peristiwa yang sering terjadi ketika program baru diberikan kepada guru, merupakan pengalaman pribadi, dan individu yang melakukan perubahan.

b. Model leithwood

Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi yang mendasari model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda, implementasi merupakan proses timbal balik, serta pertumbuhan dan perkembangan memungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Intinya membolehkan guru dan pengembang kurikulum mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Model ini tidak hanya menggambarkan hambatan dalam implementasi, tetapi juga menawarkan cara dan strategi para guru dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya tersebut.

c. Model TORI

Model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Model ini diharapkan adanya minat (*interest*) dalam diri guru untuk memanfaatkan perubahan. Esensi dari model TORI adalah: a) *trusting*, menumbuhkan kepercayaan diri, b) *opening*, menumbuhkan dan membuka keinginan; c) *realizing*, mewujudkan, dalam arti setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan; d) *interdepending*, saling ketergantungan dengan lingkungan. Inti dari model ini memfokuskan pada perubahan personal dan perubahan sosial. Model ini menyediakan suatu skala yang membantu guru mengidentifikasi, bagaimana

lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktik serta menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan.

3. Tahap-tahap pelaksanaan/implementasi kurikulum

Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi:¹⁵⁵

a. Tahap perencanaan implementasi

Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi (operasional) yang ingin dicapai. Setiap penetapan sebagai elemen yang akan dipergunakan dalam proses implementasi kurikulum terdapat tahapan proses pembuatan keputusan yang meliputi: identifikasi masalah yang dihadapi (tujuan yang ingin dicapai), pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran dan waktu, evaluasi setiap alternatif tersebut, penentuan alternatif yang paling tepat.

b. Tahap pelaksanaan implementasi

Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan *blue print* yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dilakukan oleh suatu tim terpadu, menurut departemen/divisi/seksi masing-masing atau gabungan, tergantung pada rencana sebelumnya, hasil dari pekerjaan ini adalah tercapainya tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.

c. Tahap evaluasi implementasi

Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal, yaitu: 1)

155 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 103

melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan; 2) melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran proposal dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan.

4. **Administrasi pelaksanaan /implementasi kurikulum**

Sondang P. Siagian mengemukakan definisi administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisme tertentu untuk menghasilkan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Rumusan ini terkandung lima konsep pokok yakni:¹⁵⁶ a) administrasi sebagai konsep keseluruhan dimana terdapat sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya; b) manusia terlibat sebagai proses administrasi; c) proses administrasi senantiasa bertujuan; d) prinsip administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sama; e) proses administrasi memerlukan dukungan peralatan dan perlengkapan.

Administrasi pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua perilaku yang bertalian dengan semua tugas yang memungkinkan terlaksananya kurikulum. Tujuan administrasi tersebut adalah agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik. Administrasi bertugas menyediakan atau mempersiapkan fasilitas material, personal, dan kondisi-kondisi agar kurikulum dapat dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan dalam administrasi kurikulum antara lain

156 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 104

sebagai berikut:¹⁵⁷ a) menyusun rencana kegiatan tahunan; b) menyusun rencana pelaksanaan program/unit; c) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan; d) melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar; e) mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan pribadi; f) melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler; g) melaksanakan evaluasi belajar tahap akhir; h) mengatur alat perlengkapan pendidikan; i) melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan; j) merencanakan usaha-usaha peningkatan mutu guru.

Pokok-pokok kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sembilan pokok kegiatan saja, yakni:¹⁵⁸ a) kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah; b) kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru; c) kegiatan yang berhubungan dengan siswa; d) kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar; e) kegiatan ekstrakurikuler; f) kegiatan pelaksanaan evaluasi belajar; g) kegiatan pelaksanaan pengaturan alat perlengkapan sekolah; h) kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan; i) kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesional guru.

Kegiatan kepala sekolah sesuai dengan perannya sebagai pemimpin sekolah dalam pelaksanaan kurikulum hendak menitik-beratkan pada: penyusunan perencanaan untuk melaksanakan kurikulum dalam sistem sekolah yang dipimpinnya, melakukan koordinasi kegiatan guru-guru, menata dan membina organisasi guru, dan organisasi pembelajaran siswa, membina sistem komunikasi yang efektif di lingkungan sekolah antar sekolah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga lainnya, melakukan supervisi, bagi guru-guru bidang studi dan menilai kegiatan guru-guru serta melaksanakan penilaian secara keseluruhannya.

157 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 104-105

158 *Ibid...*, hlm. 104-105

Guru juga bertugas untuk menyusun perencanaan kegiatan tahunan, triwulan, dan mingguan yang terkait dalam pelaksanaan intruksional dalam bidang studi atau kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kegiatan yang berkenaan dengan siswa, disamping bidang pembelajaran juga dalam bidang ekstra dan kemasyarakatan. Kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran menyangkut bidang kegiatan guru, kepala sekolah, dan siswa sendiri. Kegiatan ekstrakurikuler berkenaan dengan penyusunan program penyediaan peralatan dan pembiayaan dan keterkaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan dalam evaluasi menjadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah tetapi terkait dengan siswa dan orang tua siswa keseluruhan.

D. Pemantauan/Monitoring Kurikulum

1. Pengertian pemantauan/monitoring kurikulum

Berikut ini ada beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan yang berhubungan dengan pemantauan kurikulum, yakni supervisi, inspeksi, evaluasi, dan *monitoring* kurikulum.

Supervisi kurikulum merupakan serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya, dan mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan pengawasan kurikulum merupakan suatu kegiatan pemantauan untuk melihat orang yang melaksanakan kurikulum di lapangan, untuk selanjutnya dilakukan pembina di saat itu juga.

Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses untuk mengumpulkan berbagai informasi dalam rangka membuat suatu keputusan tentang program pendidikan, apakah program pendidikan itu perlu ditambahkan, dikurangi bahkan mungkin

diganti.

Sedangkan untuk pemantauan atau *monitoring* kurikulum merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai dimana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut.

Pemantauan atau *monitoring* dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah kurikulum yang telah disusun sudah digunakan, bagaimana kegiatan kurikulum dilaksanakan, dan apakah *output* yang telah dihasilkan sesuai rencana. Sehingga, *monitoring* berfokus secara khusus pada *efisiensi*. Sumber data yang penting untuk *monitoring* adalah alat verifikasi pada tingkat proses dan *output* yang umumnya merupakan dokumen internal dari kurikulum. Monitoring dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan, apakah dari perencanaan ataupun setelah bagian pekerjaan tertentu diselesaikan.¹⁵⁹

Selain itu, *monitoring* juga merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/proram sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan selanjutnya.

2. Tujuan dan urgensi pemantauan/monitoring kurikulum

Secara umum tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan, selanjutnya untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum.

159 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 138-139

Implementasi kurikulum (pembelajaran), secara umum perlu dilakukan pemantauan dengan tujuan untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar sehingga diharapkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru semakin meningkat, baik dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan komitmen yang dimiliki guru.

Peter Cuttance dalam bukunya “*education management*”, menyebutkan bahwa tujuan utama dari sistem pemantauan adalah untuk melaporkan kinerja sehubungan dengan praktik-praktik tertentu di seluruh sistem secara keseluruhan untuk memantau efektivitas program dan kebijakan dalam mencapai hasil yang direncanakan.¹⁶⁰

Secara khusus Hamalik menguraikan beberapa tujuan dari pemantauan atau *monitoring* kurikulum, antara lain memberikan umpan balik baik bagi ketercapaian tujuan kurikulum, memberikan umpan balik terhadap metode perencanaan, memberikan umpan balik terhadap sistem penilaian kurikulum, memberikan bahan kajian untuk mengatasi masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan.¹⁶¹

Selain itu Rusman menguraikan beberapa tujuan dari kegiatan pemantauan kurikulum (pembelajaran), antara lain menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan,

160 Peter. F.Olivia, *Developing The Curriculum*, (USA: Harpencollin Publishers, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 1992), hlm. 20

161 Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 220

mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama guru dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan, menyumbang pada akuntabilitas, supervisor perlu mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, sesuai kurikulum dan sesuai dengan tujuan pada tingkat satuan pendidikan, menyediakan sumber informasi kemajuan/prestasi utama bagi para pengambil keputusan, memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan *revisi* dalam kegiatan pembelajaran.¹⁶²

Kegiatan pemantauan kurikulum bertujuan untuk:¹⁶³ 1) mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum dilapan telah sesuai dengan rencana; 2) mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan (sekolah) agar langsung dapat diatasi; 3) melakukan penelitian pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 4) mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan; 5) menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah tanpa menyimpang dari tujuan.

3. Sasaran kegiatan pemantauan/monitoring kurikulum

Sasaran *monitoring* kepada guru untuk memantau aktivitasnya meliputi: sikap, perhatian, minat, dan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum. *Monitoring* terhadap materi pembinaan maksudnya untuk melihat materi pelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran apakah sesuai tidak

162 Rusman..., hlm. 363

163 Dinn Wahyudin, *Manajemen...*, hlm. 139-140

dengan kompetensi yang ingin dicapai. *Monitoring* terhadap sarana pembinaan maksudnya adalah bahwa media yang digunakan guru, apakah sesuai atau sebaliknya kontra produktif terhadap tujuan yang telah ditetapkan. *Monitoring* terhadap kurikulum adalah memantau sejauh mana efektivitas dan relevansinya dengan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. *Monitoring* terhadap strategi pembina maksudnya adalah bagaimana melihat berbagai metode dan strategi serta model yang digunakan guru dalam implementasi pembelajaran.

E. Evaluasi Kurikulum

1. Pengertian, tujuan dan fungsi evaluasi kurikulum

a. Pengertian evaluasi kurikulum

Evaluasi merupakan suatu proses terus menerus sehingga di dalam proses kegiataanya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu kesalahan.¹⁶⁴ Menurut Tyler (1949) menyebutkan; *evaluation is the process for determining the degree to which these changes in behavior are actually taking place*. Sedangkan, Orint. M (1993) menyebutkan; *evaluation is concerned with making judgment about thing*.¹⁶⁵

Evaluasi mencakup kegiatan yang sangat luas, kompleks, dan terus menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi juga meliputi rentangan yang cukup luas, mulai dari yang bersifat informal sampai dengan yang sangat formal.¹⁶⁶

164 Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 12

165 Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 35

166 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*,

Menurut Hamid Hasan evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan merupakan karakteristik yang tidak terpisahkan. Karakteristik itu adalah lahirnya berbagai definisi untuk suatu istilah teknis yang sama. Demikian pula dengan evaluasi yang diartikan oleh berbagai pihak dengan pengertian yang berbeda.

Adapun dalam buku “*Curriculum Planning and Development*”, dinyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menilai kinerja pelaksana suatu kurikulum yang didalamnya terdapat tiga makna, yaitu:¹⁶⁷ 1) Evaluasi tidak akan menjadi kecuali telah mengetahui tujuan yang akan dicapai; 2) Harus diperiksa hal-hal yang telah dan sedang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut; dan 3) Evaluasi harus mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasar beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa evaluasi lebih bersifat komprehensif yang didalamnya meliputi pengukuran. Selain itu, evaluasi pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan evaluasi tidak hanya didasarkan pada pengambilan hasil pengukuran, dapat pula didapatkan dari hasil pengamatan, baik yang didasarkan pada hasil pengukuran maupun yang bukan pengukuran sehingga menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program atau kurikulum yang dievaluasi.

b. Tujuan evaluasi kurikulum

Tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 172

167 Dinn Wahyudin, *Manajemen,...*, hlm. 148

kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, kelayakan program. Sementara itu menurut Ibrahim diadakannya evaluasi kurikulum untuk keperluan sebagai berikut:¹⁶⁸

1) Perbaikan program

Evaluasi kurikulum lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan.

2) Pertanggung jawaban kepada berbagai pihak

Setelah pengembangan kurikulum dilakukan, perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencakup pihak yang mensponsori pengembangan kurikulum tersebut atau pihak yang menjadi konsumen pengembangan kurikulum tersebut. Pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, pelaksana pendidikan, dan pihak-pihak lain yang ikut mensponsori pengembangan kurikulum.

3) Penentuan tindak lanjut pengembangan

Tindak lanjut pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. *Pertama*, apakah kurikulum baru tersebut Manajemen akan atau tidak akan disebar luaskan ke dalam sistem yang ada? *Kedua*, dalam kondisi yang bagaimana dan cara yang bagaimana kurikulum baru tersebut akan

168 Dinn Wahyudin, *Manajemen,....*, hlm. 149-150

disebarluaskan dalam sistem yang ada.

2. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum

Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut:¹⁶⁹

- a. Tujuan tertentu, artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik.
- b. Bersifat obyektif, dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat, yang diperoleh melalui instrumen yang handal.
- c. Bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum.
- d. Kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan siswa itu sendiri, selain merupakan tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan.
- e. Efisien, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang.
- f. Berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari dalam dan luar sistem sekolah, yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum.

169 Wiji Hidayati, *Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2012), hlm.118-119

3. Prosedur evaluasi kurikulum

Prosedur dalam evaluasi kurikulum meliputi:¹⁷⁰

a. Evaluasi kebutuhan dan *feasibility*

Evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan; 2) Menetapkan program yang dibutuhkan; 3) Menilai (*assess*) data setempat berdasarkan tes buku, tes intelegensi, dan tes sikap yang ada; 4) Menilai riset yang telah ada, baik riset setempat maupun riset tingkat nasional yang sama atau berhubungan; 5) Menetapkan *feasibility* pelaksanaan program sesuai dengan sumber-sumber yang ada (manusiawi dan materi); 6) Mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan; 7) Menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat.

b. Evaluasi Masukan (*Input*)

Evaluasi masukan melibatkan supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini harus dilihat dalam hubungannya dengan hambatan (misalnya penerimaan, pemecahan masalah tersebut oleh guru dan siswa), kecakapan kerja (pelaksanaan pemecahan masalah dalam kelas atau sekolah), kemampuan (sejauh mana usaha pemecahan masalah tersebut), dan biaya ekonomi (kaitan antara biaya pemecahan masalah dengan hasil yang diharapkan).

Jadi, evaluasi masukan menuju ke arah pengembangan berbagai strategi dan prosedur, yang dalam pembuatan keputusannya sangat dibutuhkan informasi yang akurat. Selain

170 Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan,...*, hlm. 258-261

itu, masukan juga berusaha mengenali daerah permasalahan tersebut agar dapat diawasi selama berlangsungnya implementasi.

c. Evaluasi proses

Evaluasi proses adalah sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Staf perpustakaan memainkan peran yang sangat penting, karena mereka secara langsung melakukan *monitoring* terhadap desain dan prosedur pelaksanaan program, serta memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan program.

d. Evaluasi produk

Evaluasi ini berkenaan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program dalam kaitannya dengan tercapainya tujuan. Berbagai variabel yang telah diuji bergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran.

Evaluasi yang seksama sebaiknya meliputi semua komponen evaluasi tersebut. Namun, sering kali karena keadaan yang tidak memungkinkan, tidak semua komponen mendapat perhatian sepenuhnya. Administrator program harus pandai memilih aspek yang paling penting mendapatkan perhatian intensif. Berdasarkan evaluasi tersebut, akan diperoleh data dan informasi yang cukup *valid* serta dapat dipercaya dalam upaya pembuatan keputusan dan program perbaikan.

4. Model-model evaluasi kurikulum

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, ada tiga model evaluasi kurikulum yaitu:¹⁷¹ evaluasi model penelitian, evaluasi model obyektif, dan model campuran multivariasi.

171 *Ibid.*, hlm. 121-122.

- a. Evaluasi kurikulum menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. *Cooperative approach* dalam evaluasi. Salah satu pendekatan yang menggunakan eksperimen lapangan adalah mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok anak, yang menggunakan dua metode belajar yang berbeda. Rancangan penelitian ini membutuhkan persiapan yang teliti dan rinci.
- b. Evaluasi model obyektif
Perbedaan model obyektif dengan model komparatif adalah dalam dua hal. Model obyektif ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Teori ini dinamakan dengan teori fungsional. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain tetapi diukur dengan perangkat obyektif (tujuan khusus). Keberhasilan diukur dari keberhasilan siswa akan tujuan tersebut. Evaluasi ini menggunakan teori instruksional.
- c. Evaluasi model campuran multivariasi.
Evaluasi model perbandingan (*comparative approach*) dan model Tyler dan Bloom melahirkan evaluasi model campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur dari kedua pendekatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Rosda Karya, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Penilaian Program Pendidikan*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1988
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Rosda karya, 2006.
- Hasan, Hamid, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hidayati, Wiji, *Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2012.
- Mida Latifatul Muzamiroh, *Kupas Tuntas Kurikulum 2013*, Kata Pena, 2013.
- Nasution, S, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Olivia, Peter. F., *Developing The Curriculum*, USA: Harpencollin Publishers, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 1992.
- Raharja, Rahmat, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Yogyakarta: Baituna Publishing, 2012.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
- Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: PT Remadja Rosdya Karya, 2015
- Sukmadinata, Syaodih Nana, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Tim Pengembang MKPD, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

W. Jackson.P, *Handbook of Reseach on Curriculum*, New York: Mac Millan Publishing Company, 1991.

Wahyudin, Dinn, *Manajemen Kurikulum*, Bandung, PT Remadja Rosdakarya, 2014.

BAB IV

SUMBER DAYA PENDUKUNG MANAJEMEN KURIKULUM

A. Pengertian dan Komponen Sumber Daya Pendukung Kurikulum

Salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu. Adanya beberapa program pembaruan dalam bidang pendidikan nasional merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kehidupan demokratis yang mantab dalam menghadapi kemajuan zaman.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁷² Secara umum komponen sumber daya pendukung kurikulum terbagi menjadi empat yaitu; manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen sarana prasarana.

1. Manajemen kesiswaan

Secara sederhana, manajemen kesiswaan dapat dipahami melalui

172 UU No 20 Tahun 2003 BAB I Pasal I Ayat 19.

dua kata, yaitu; manajemen, dan kesiswaan. Sebagai kebutuhan untuk arti manajemen, dalam buku ini kiranya telah banyak dibahas secara terperinci pada setiap bab. Sementara untuk kesiswaan dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang menyangkut dengan peserta didik atau yang lebih populer dengan istilah siswa.¹⁷³

Sehingga, manajemen kesiswaan dapat dimaknai sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa pada suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah melalui penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan konstruktif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar atau pembelajaran yang efektif.

2. Manajemen personalia

Personalia dapat diartikan sebagai semua anggota organisasi yang berkerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Personalia organisasi pendidikan mencakup guru, pegawai, dan wakil siswa atau mahasiswa. Termasuk juga manajer pendidikan yang mungkin dipegang oleh beberapa guru.¹⁷⁴

Jadi, yang dimaksud dengan manajemen personalia adalah segenap proses penataan yang bersangkutan paut dengan masalah untuk memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Manajemen keuangan

Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah

173 Ary H Gunawa, *Administrasi Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 9.

174 Made Pidarta, *Manajeemn Pendidikan Indonesia cet II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.108.

tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun Maisyarah sebagaimana dikutip oleh Sulistiyorini menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.¹⁷⁵

Manajemen keuangan di sekolah atau madrasah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan.

Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.¹⁷⁶

4. Manajemen sarana dan prasarana

Manajemen perawatan preventif sarana dan prasarana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana

175 Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 130.

176 Sondang P. Siagian, *Audit Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 120.

untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, mebel, dan peralatan sekolah lainnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah.¹⁷⁷

UU Nomor 20 Tahun 2003 BAB XII Pasal 45 Ayat 1, memuat tentang regulasi sarana dan prasarana pendidikan yang berbunyi: Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Sehingga, keberhasilan suatu kurikulum sangat bergantung pada komponen sumber daya pendukungnya, yaitu: manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen sarana prasarana.

B. Manajemen Sekolah

Menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Sehingga, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁷⁸

Manajemen disini juga dapat diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama, yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*).

177 Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 129

178 Rusman, *Manajemen Kurikulum...*, hlm.121.

Sehingga, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan, terus menerus dan saling keterkaitan.¹⁷⁹

Hakikatnya, istilah manajemen pendidikan dan manajemen sekolah mempunyai pengertian dan maksud yang sama. Keduanya memang sukar dibedakan, lebih-lebih sering dipakai secara bergantian dalam pengertian yang sama. Apa yang menjadi *scope* manajemen pendidikan adalah juga merupakan *scope* atau bidang garapan manajemen sekolah. Demikian pula proses kerjanya ditempuh melalui fungsi-fungsi yang sama, yang diilhami dari teori administrasi dan manajemen pada umumnya.¹⁸⁰

Menurut Djam'an Satori (1980) manajemen pendidikan merupakan “keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan secara efektif dan efisien”. Sementara itu, Hadari Namawi (1992) mengemukakan bahwa “manajemen pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa lembaga pendidikan formal”.¹⁸¹

Manajemen sekolah merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematis (mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengerahan tindakan, dan pengendalian) untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Tindakan-tindakan manajemen tersebut bersumber pada kebijakan dan peraturan-peraturan yang disepakati bersama yang diwujudkan

179 *Ibid.*

180 Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 47

181 Rusman, *Manajemen Kurikulum...*, hlm.121.

dalam bentuk sikap, nilai, dan perilaku dari seluruh orang yang terlibat di dalamnya. Tindakan-tindakan manajemen tidak berlangsung dalam satu isolasi, melainkan terjadi dalam satu keutuhan kompleksitas sistem. Apabila dilihat dalam perspektif ini, maka dimensi sekolah efektif meliputi: a) layanan belajar bagi siswa; b) pengelolaan dan layanan siswa; c) sarana dan prasarana sekolah; d) program dan pembiayaan; e) partisipasi masyarakat; f) budaya sekolah.

Husaini Usman memaparkan cara agar sekolah memiliki manajemen sekolah yang efektif yaitu dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan prinsip: 1) otonomi, 2) akuntabilitas, 3) jaminan mutu, 4) transparan, 5) kemitraan, 6) partisipasi, 7) efisien, 8) demokratis, 9) adil, 10) menjunjung tinggi hak asasi manusia, 11) menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, 12) menjunjung tinggi nilai-nilai kultural, 13) menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan bangsa, 14) sistemik, 15) pemberdayaan siswa, 16) keteladanan, dan 17) pemberdayaan semua komponen masyarakat.¹⁸²

Selain itu, ia juga pernah mengungkapkan ada delapan prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah yang kemudian disingkat K8, yaitu:¹⁸³

1. Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS.
2. Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS.
3. Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak.

182 Husaini Usman, “*Manajemen Sekolah yang Efektif*”, dalam *Jurnal Pendidikan Inovatif* Volume 3, Nomor 1, September 2007, hlm 2.

183 Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Ed³, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 624.

4. Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.
5. Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan.
6. Kesadaran, guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum.
7. Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana.
8. Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholders sekolah.

Sedangkan Menurut Cheng dalam Nurkholis (2005) terdapat empat prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu; prinsip equifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip pengelolaan mandiri dan prinsip inisiatif sumber daya manusia, yang secara jelas diuraikan sebagai berikut:¹⁸⁴

1. Prinsip equifinalitas (*equifinality*). Didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan.
2. Prinsip desentralisasi (*decentralization*). Dasar teori dari prinsip desentralisasi ini adalah manajemen sekolah dalam aktivitas pengajaran menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan.
3. Prinsip sistem pengelolaan mandiri (*self-managing system*). Sistem pengelolaan mandiri (*self-managing system*) di bawah kendali kebijakan dan struktur utama, memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran dan strategi manajemen, mendistribusikan sumber daya manusia dan sumber daya lain, memecahkan masalah dan meraih tujuan menurut kondisi mereka masing-masing.

184 Husni Sabil, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMPN 11 Kota Jambi", dalam Jurnal Sain Matematika Vol 8 No 1 2014, hlm. 5.

4. Prinsip inisiatif manusia (*human initiative*). Perspektif sumber daya manusia menekankan pentingnya sumber daya manusia. Sehingga, poin utama manajemen adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia di sekolah untuk lebih berperan dan berinisiatif.

C. Pemanfaatan Sumber-Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan.¹⁸⁵ Berdasar standar nasional pendidikan, buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti.¹⁸⁶

Sedangkan dalam paradigma pendidikan konvensional, memiliki paradigma bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga dianggap orang yang paling memiliki pengetahuan. Paradigma itu kemudian bergeser menjadi guru lebih dahulu tahu. Namun, sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi bukan saja pengetahuan guru biasa sama dengan murid, bahkan murid biasa lebih dahulu tahu daripada gurunya. Itu semua dapat terjadi akibat perkembangan media informasi disekitar kita sehingga pada saat ini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, melainkan guru memiliki fungsi lebih luas yaitu sebagai penyedia fasilitas belajar agar siswa mau belajar.¹⁸⁷

Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran tidak hanya sebagai media untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai strategi, metode, dan teknik

185 Aan Komariah, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Bumi Aksara, 2009), hlm. 130

186 Pp no 23 tahun 2013 pasal 1 ayat 23.

187 Aan Komariah, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 131.

belajar.¹⁸⁸

Manfaat sumber belajar, antara lain: a) untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret tidak langsung; b) menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, memberikan informasi yang akurat dan yang terbaru, seperti buku teks, ensiklopedi, narasumber, dan lain-lain; c) membantu memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran baik dalam lingkungan makro maupun lingkungan mikro; d) memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang penggunaannya secara tepat; e) merangsang untuk berfikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut, seperti buku teks, buku bacaan, film, dan lainnya yang mengandung daya penalaran yang mampu membuat siswa terangsang untuk berfikir, menganalisis dan berkembang lebih lanjut.¹⁸⁹

Secara garis besar, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis: a) sumber belajar yang dirancang atau *learning resources by design*, yakni sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai “komponen sistem instruksional” untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal, dan b) sumber belajar yang dimanfaatkan atau *learning resources by utilization*, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, ditetapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.¹⁹⁰

Strategi dalam merancang sumber belajar, seorang guru harus mampu mengidentifikasi berbagai karakteristik sumber belajar yang digunakan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: a) guru harus mengidentifikasi karakteristik sumber belajar

188 *Ibid.*, hlm. 134.

189 *Ibid.*, hlm. 135.

190 Aan Komariah, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 137.

yang akan digunakan; b) sumber belajar yang ada sangatlah banyak, untuk itu guru harus mampu mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing sumber belajar yang digunakan; c) sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran; d) sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru; e) seorang guru harus memahami kemampuan dalam hal menggunakan sumber belajar; f) sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa; g) hal terpenting dalam merancang sumber belajar adalah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa.¹⁹¹

D. Kinerja dan Kompetensi Guru

Menurut Byars dan Rue *“performance refers to degree of accomplishment of the tasks that make up an individual’s job. It reflects how well an individual is fulfilling the requirements of a job”*. Pendapat Byars dan Rue diartikan bahwa kinerja atau performance mengacu pada derajat tingkat penyelesaian tugas yang melengkapi pekerjaan seseorang. Hal ini mencerminkan seberapa baik seseorang dalam melaksanakan tuntutan suatu pekerjaan. Persyaratan penilaian kinerja harus memenuhi ukuran atau standar tertentu. Jadi, ukuran kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja sebagai alat ukur.¹⁹²

Menurut Mitchell dan Larson,¹⁹³ *“area of performance is quality of work, promptness, initiative, capability and communication”*. Wilayah (indikator) penilaian kinerja merupakan kualitas hasil kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, inisiatif atau prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, dan komunikasi atau kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain.

191 *Ibid.*, 143.

192 Byars, L. L., & Rue, L. W., Human resources management. (3rd ed). (Boston: Irwin Inc, 1991), hlm. 250.

193 Mitchell, T. R., & Larson, J. R., jr., People in organizations, an introduction to organizational behavior (3rd ed). (Singapore : Mc Graw Hill Book Company, 1987), hlm. 491.

Penilaian kinerja seorang guru merupakan bagian penting dari seluruh proses kinerja guru yang bersangkutan. Menurut Martinis Yamin dan Maisah,¹⁹⁴ beberapa sumber penilaian tenaga kependidikan adalah: (1) penilaian atas diri sendiri; (2) penilaian oleh siswa; (3) penilaian oleh rekan sejawat; dan (4) penilaian oleh atasan langsung.

Kinerja seseorang (termasuk guru) dapat diukur melalui lima indikator berikut: 1) kualitas kerja. Indikator ini berkaitan dengan kualitas kerja guru dalam menguasai segala sesuatu berkaitan dengan persiapan perencanaan program pembelajaran dan penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran di kelas; 2) kecepatan/ketetapan kerja. Indikator ini berkaitan dengan ketepatan kerja guru dalam menyesuaikan materi ajar dengan karakteristik yang dimiliki peserta didik dan penyelesaian program pengajaran sesuai dengan kalender akademik; 3) inisiatif dalam kerja. Indikator ini berkaitan dengan inisiatif guru dalam penggunaan model pembelajaran yang variatif sesuai materi pelajaran dan penggunaan berbagai inventaris sekolah dengan bijak; 4) kemampuan kerja. Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam memimpin keadaan kelas agar tetap kondusif, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar peserta didik; 5) komunikasi. Indikator ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan guru dalam proses layanan bimbingan belajar dengan siswa yang kurang mampu mengikuti pembelajaran dan terbuka dalam menerima masukan untuk perbaikan pembelajaran.¹⁹⁵

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil penilaian kinerja guru masih berada di bawah standar kompetensi yang

194 Martinis Yamin, & Maisah, *Standarisasi kinerja guru*, (Jakarta: GP Press, 2010), hlm. 117-125.

195 Uno, H. B., & Lamatenggo, N., *Teori kinerja dan pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diorientasikan sebagai pembinaan dalam pencapaian standar kompetensi guru. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kerjanya telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan kepada pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran berkualitas dan peningkatan karir guru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru.¹⁹⁶

Pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan guru profesional, bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Guru harus mampu menumbuh-kembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga guru sebagai pembelajar abad 21 mampu mengikuti perkembangan ilmu dalam bidangnya dan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar kompetensi yang harus dimiliki peserta didik.

Usulan penilaian dan penetapan angka kredit, pemerintah telah mengaturnya dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 BAB II Pasal 2, tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang berbunyi:¹⁹⁷

196 Kemendikbud, *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan*, (Jakarta: Badan PSDMP dan PMP, 2012), hlm. 2.

197 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan

1. Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit dan disampaikan kepada atasan langsung.
2. Atasan langsung meneliti dan menyampaikan bahan penilaian angka kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
3. Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretarian tim penilai.
4. Daftar usul penetapan angka kredit untuk guru dibuat menurut contoh formulir.
5. Setiap usul penetapan angka kredit guru harus dilampiri dengan: a) surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tertentu; b) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan; c) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru.
6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus disertai dengan bukti fisik.

Selain harus mengetahui regulasi usulan penilaian dan penetapan angka kredit, guru profesional juga dituntut untuk mengetahui petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 1 Desember 2010, ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya meliputi tugas utama guru, pembagian tugas guru, pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat atau jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 BAB II Pasal 2.

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.¹⁹⁸

Petunjuk teknis ini diberlakukan secara khusus untuk guru pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tenaga fungsional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk guru, serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.¹⁹⁹

No	Jabatan Guru	Pangkat dan Golongan Ruang	Persyaratan Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan	
			Kumulatif Minimal	Per Jenjang
1	2	3	4	5
1	Guru Pertama	Penata Muda, III/a	100	50
		Penata Muda Tingkat I, III/b	150	50
2	Guru Muda	Penata, III/c	200	100
		Penata Tingkat I, III/d	300	100
3	Guru Madya	Pembina, IV/a	400	150
		Pembina Tingkat I, IV/b	550	150
		Pembina Utama Muda, IV/c	700	150

198 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 1 Desember 2010, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, hlm. 2.

199 *Ibid.*, hlm. 9.

4	Guru Utama	Pembina Utama Madya, IV/d	850	200
		Pembina Utama, IV/e	1.050	

Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional guru mencakup berbagai unsur dan sub-unsur sebagai berikut:²⁰⁰

1. 100 untuk Ijazah S-1/Diploma IV;
2. 150 untuk Ijazah S-2; atau
3. 200 untuk Ijazah S-3.

Angka kredit tersebut diperhitungkan sebagai unsur utama tugas guru. Apabila seseorang guru mempunyai gelar/ijazah lebih tinggi yang sesuai dengan sertifikat pendidik/keahlian dan bidang tugas yang diampu, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan berdasarkan gelar/ijazah lama dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut.

Penyesuaian jabatan fungsional guru ke dalam jabatan fungsional guru baru, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tanggal 22 Desember 2010, adalah sebagai berikut:²⁰¹

Nomor Urut	Jabatan/Pangkat/Golongan	
	Lama	Baru
1	Guru Pratama / Pengatur Muda, II/a	-
2	Guru Pratama TK I / Pengatur Muda TK I, II/b	-
3	Guru Muda / Pengatur, II/c	-
4	Guru Muda TK I / Pengatur TK I, II/d	-
5	Guru Madya / Penata Muda, III/a	Guru Pertama, III/a

200 *Ibid.*, hlm. 22.

201 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tanggal 22 Desember 2010, tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru ke dalam Jabatan Fungsional Guru Baru, hlm. 7.

6	Guru Madya TK I / Penata Muda TK I, III/b	Guru Pertama, III/b
7	Guru Dewasa / Penata, III/c	Guru Muda, III/c
8	Guru Dewasa TK I / Penata TK I, III/d	Guru Muda, III/d
9	Guru Pembina / Pembina, IV/a	Guru Madya, IV/a
10	Guru Pembina TK I / Pembina TK I, IV/b	Guru Madya, IV/b
11	Guru Utama Muda / Pembina Utama Muda, IV/c	Guru Utama, IV/c
12	Guru Utama Madya / Pembina Utama Madya, IV/d	Guru Utama, IV/d
13	Guru Utama / Pembina Utama, IV/e	Guru Utama, IV/e

Selanjutnya untuk kepentingan pemaknaan kompetensi, Mulyasa berpendapat bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu (tugas) yang diperoleh melalui pendidikan.²⁰² Selanjutnya, Spencer & Spencer berpendapat bahwa “*a competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation*”.²⁰³ Artinya, kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang saling berhubungan sebab akibat, sehingga merujuk pada efektivitas dan atau kinerja tinggi dalam pekerjaan atau situasi tertentu.

Kompetensi guru dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru untuk melaksanakan tugas sebagai pengajar dan pendidik. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggungjawab dan layak. Kompetensi guru dapat diukur melalui indikator sebagai berikut: 1) pengelolaan pembelajaran, berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengurutkan tujuan pembelajaran

202 Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 26.

203 Spencer, M. L., & Spencer, M. S., *Competence at Work: Models for Superior Performance*. (New York: John Wiley & Son, Inc, 1993), hlm. 9.

secara sistematis, penyesuaian media pembelajaran dengan materi yang disampaikan, penyesuaian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar, dan kemampuan guru untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki siswa.²⁰⁴ 2) penguasaan keilmuan, berkaitan dengan keilmuan guru dalam penyesuaian materi pelajaran dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, penggunaan teknik mengelola proses belajar mengajar di kelas, dan penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.²⁰⁵ 3) sikap atau kepribadian, berkaitan dengan kepribadian guru dengan menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri, dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 4) interaksi sosial, berkaitan dengan interaksi guru dengan siswa baik selama di sekolah maupun di luar sekolah, berinteraksi dengan sesama rekan kerja, berinteraksi dengan orang tua/wali siswa, dan berinteraksi dengan masyarakat lingkungan sekitar.²⁰⁶

Mengenai pendidik dan tenaga kependidikan nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB XI Pasal 39, memuat:

1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai

204 Usman, U., *Menjadi Guru Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 2.

205 Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 3.

206 Olim, A., *Modul Teori dan Praktek Pembelajaran Orang Dewasa*. (Bandung, 2013).

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
BAB XI Pasal 40, memuat:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
BAB XI Pasal 41, memuat:

1. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
2. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan

tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
4. Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB XI Pasal 42, memuat:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasinya sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
3. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB XI Pasal 43, memuat:

1. Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang

terakreditasi.

3. Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB XI Pasal 44, memuat:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen BAB IV Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, Pasal 8, memuat: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁰⁷

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen BAB IV Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi, Pasal 10 Ayat 1, memuat: kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.²⁰⁸

PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru BAB II Kompetensi, dan

207 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB IV Pasal 8.

208 *Ibid.*, Pasal 9 Ayat 1.

Sertifikasi, Pasal 2, memuat: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁰⁹

PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru BAB II Kompetensi, dan Sertifikasi, Pasal 3, memuat:

1. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
2. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
3. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.
4. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. Pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. Pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. Perancangan pembelajaran;
 - e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. Evaluasi hasil belajar; dan
 - h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

209 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru BAB II Pasal 2.

5. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
 - a. Beriman dan bertakwa;
 - b. Berakhlak mulia;
 - c. Arif dan bijaksana;
 - d. Demokratis;
 - e. Mantap;
 - f. Berwibawa;
 - g. Stabil;
 - h. Dewasa;
 - i. Jujur;
 - j. Sportif;
 - k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
6. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
 - a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

7. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
 - a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
 - b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
8. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
 - a. Standar kompetensi guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - b. Standar kompetensi guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - c. standar kompetensi guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. standar kompetensi guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
9. Standar kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, 1990, *Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Byars, L. L., & Rue, L. W., 1991, *Human resources management*. (3rd ed). Boston: Irwin Inc.
- Gunawan, Ary, H., 1996, *Administrasi Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemendikbud, 2012, *Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan*, Jakarta: Badab PSDMP dan PMP.
- Komariah, Aan, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Bumi Aksara.
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 1 Desember 2010, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya,
- Mitchell, T. R., & Larson, J. R., jr., 1987, *People in organizations, an introduction to organizational behavior (3rd ed)*. Singapore: Mc Graw Hill Book Company.
- Mulyasa, 2007, *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Rosdakarya.
- Olim, A., 2013, *Modul Teori dan Praktek Pembelajaran Orang Dewasa*, Bandung.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 BAB II Pasal 2.
- Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2013
- Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008
- Pidarta, Made, 2004, *Manajeemn Pendidikan Indonesia, cet II*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Rusman, 2014, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabil Husni, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMPN 11 Kota Jambi", dalam *Jurnal Sain Matematika* Vol 8 No 1 2014
- Siagian, Sondang, P., 2001, *Audit Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Spencer, M. L., & Spencer, M. S., 1993, *Competence at Work: Models for Superior Performance*. (New York: John Wily & Son, Inc.
- Sulistiyorini, 2009, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras.
- Undang Undang No 20 Tahun 2003
- Undang Undang No 14 Tahun 2005
- Uno, H. B., & Lamatenggo, N., 2012, *Teori kinerja dan pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman Husaini, 2011, *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Ed³, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini, "*Manajemen Sekolah yang Efektif*", dalam *Jurnal Pendidikan Inovatif* Volume 3, Nomor 1, September 2007.
- Usman, U., 2011, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yamin, Martinis, & Maisah, 2010, *Standarisasi kinerja guru*, Jakarta: GP Press.

BAB V

PROGRAM PENDIDIKAN

A. Program Pendidikan Nasional

1. Pengertian program pendidikan

Pendidikan dapat diterjemahkan sebagai usaha manusia dewasa untuk mempersiapkan generasi yang lebih muda dengan pengetahuan yang bisa digunakan pada kehidupannya di masa yang akan datang. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan *me-* sehingga menjadi *mendidik*, artinya memelihara atau memberi latihan. Memelihara atau memberi latihan perlu diajarkan, tuntunan dan perilaku akhlak dan kecerdasan pikiran. Pengertian pendidikan menurut kamus bahasa indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²¹⁰

Kihajar Dewantara sebagaimana dikutip Aman menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (*intellect*) dan jasmani anak didik. Sedangkan Malcom Knowles membedakan antara pengertian pendidikan dan belajar. Menurutnya pendidikan lebih

210 Muhibih Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hal. 10.

menekankan pada pendidik sebagai seorang agen perubahan yang memberikan rangsangan dan penguatan terhadap pembelajaran serta mendesain kegiatan pembelajaran untuk mencapai perubahan pada siswanya. Sedangkan belajar lebih banyak menekankan pada seseorang yang diharapkan menerima perubahan. Pembelajaran adalah proses dimana ada perubahan tingkah laku, pengetahuan serta keahlian.²¹¹

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²¹²

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.²¹³ Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai upaya mencerdaskan generasi-generasi bangsa yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan generasi terdahulu dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia menuju bangsa yang berbudi luhur dan berkesejahteraan sosial.

211 Ahmad Salim, "Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah (Sebuah Konsep dan Penerapannya)", dalam *Jurnal TARBAWI*, Volume 1. No. 02, Juli – Desember 2015, hlm. 4.

212 Undang-undang No 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

213 *Ibid.*, Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; 2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; 3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang demokratis, memerhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah, dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.²¹⁴

Tujuan pendidikan berfungsi bukan saja bersifat mengarahkan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan isi pelajaran, metode dan prosedur pengajaran maupun penilaian, bahkan mendasari motivasi kerja murid dan guru di sekolah. Melihat fungsi yang sedemikian penting ini, maka jelaslah bahwa tujuan pendidikan merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kurikulum.

Tujuan pendidikan dapat tercapai apabila terwujudnya kerjasama yang baik, dan saling pengertian antara ketiga lingkungan pendidikan, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekolah sebagai salah satu lingkungan pendidikan harus senantiasa memperhatikan kedisiplinan anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga, diperlukan kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa dalam rangka menumbuhkan atau membina kedisiplinan siswa, di mana ketiga komponen tersebut saling keterkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan orang tua sangat membantu dan mempengaruhi terbentuknya kedisiplinan

214 Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal.1

pada siswa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, BAB I, Ayat 1, memberikan penjelasan tentang:²¹⁵

- 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- 3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 4) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 6) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,

215 UU Nomor 20 Tahun 2003 BAB I Pasal 1.

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

- 7) Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- 8) Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- 9) Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- 10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- 11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 14) Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

- 15) Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
- 16) Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 17) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.
- 18) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 19) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 20) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 21) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 22) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 23) Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang

meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

- 24) Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- 25) Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 26) Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 27) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- 28) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 29) Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
- 30) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

2. Visi-Misi-Tujuan Pendidikan Nasional

Rencana pembangunan pendidikan nasional jangka panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan kamil/ insan paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu: cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik.

Terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan, dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya, dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Visi dan misi pendidikan nasional telah menjadi rumusan dan dituangkan pada bagian “penjelasan” atas UU 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Visi dan misi pendidikan nasional ini adalah merupakan bagian dari strategi pembaruan sistem pendidikan.

Visi pendidikan nasional

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya suatu sistem pendidikan sebagai pranata sosial, untuk memberdayakan semua warga Indonesia menjadi manusia yang beragama, berbudaya, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Misi pendidikan nasional

Berdasar visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional

mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3. Program pendidikan nasional

a. Kemendikbud

Visi: mengacu kepada nawacita dan memperhatikan visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan visi kementerian pendidikan dan kebudayaan 2019: *“terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”*.²¹⁶

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Misi: upaya untuk mencapai visi kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:²¹⁷

- 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat.
- 2) Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan.
- 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu.
- 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa.
- 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Misi renstra kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

216 Renstra Kemendikbud 2015-2019, dalam kemendikbud.go.id.

217 *Ibid.*

- 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
- 2) Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
- 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya

budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

- 1) Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
- 2) Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
- 3) Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
- 4) Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar

- yang kondusif agar anak nyaman belajar;
- 5) Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
 - 6) Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
 - 7) Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Tujuan: rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis kemendikbud tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:²¹⁸

- 1) Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan;
- 2) Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan;
- 3) Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
- 4) Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter;
- 5) Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan;
- 6) Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

b. Standar nasional pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. SNP merupakan penjabaran dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang dituangkan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

SNP meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.²¹⁹

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan (SMK) bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan

219 PP No 32 Tahun 2013.

pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan

pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai SNP secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

B. Program Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten

1. Program pendidikan

Secara konseptual, otonomi pendidikan sebenarnya memberikan peluang besar untuk membangun pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas pendidikan di daerahnya melalui sistem perencanaan

terhadap bidang garapan pendidikan yang sesuai dengan konteks daerahnya.

Kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih banyak tergantung pada komitmen daerah untuk merumuskan visi, misi dan tujuan di daerahnya masing-masing. Manakala pemerintah daerah memiliki *political will* yang kuat dan kemudian disertai dengan kebijakan dan sistem perencanaan pendidikan yang mengedepankan arti penting pendidikan sebagai upaya *human investment* di daerah, dapat dipastikan pendidikan di daerah itu akan memiliki praksis yang baik, dan kualitas pendidikan akan dapat ditingkatkan.

Namun sebaliknya, manakala visi dan misi pendidikan di daerah itu tidak dirumuskan secara jelas ke dalam sistem perencanaan yang baik, maka kemungkinan besar tidak dapat diderivasikan menjadi praksis pendidikan yang solid; dan praksis pendidikan akan berjalan secara tidak profesional, sehingga akan mendorong para praktisi pendidikan di daerah kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya secara profesional. Karena itu, pada era otonomi manajemen pendidikan dewasa ini, merupakan saat yang tepat untuk dapat membangun budaya tatakelola pendidikan di daerah melalui pengembangan sistem perencanaan pendidikan yang lebih efektif.²²⁰

Standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah provinsi diatur dalam PMPN Nomor 50 Tahun 2007, yang memuat tentang:²²¹

- a. Perencanaan program
 - 1) Pemerintah provinsi merumuskan visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan yang sejalan dengan visi,

220 Yono Bahtiar Irianto, "Perencanaan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota (Studi Evaluatif Tentang Efektivitas Sistem Pencanaan Pendidikan Menuju Tahun 2025 di Kabupaten Bandung)", artikel dalam *file.upi.edu*, hlm 13.

221 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007, Lampiran I.

- misi, dan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan.
 - 3) Pemerintah provinsi memiliki sistem informasi berbasis TIK yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistic pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir untuk daerahnya masing-masing.
 - 4) Pemerintah provinsi memutakhirkan data statistik pendidikan untuk daerahnya setiap tahun.
 - 5) Pemerintah provinsi melakukan pemetaan permasalahan pendidikan.
 - 6) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan kapasitas peningkatan mutu pelayanan pendidikan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 7) Pemerintah provinsi mengkaji, menganalisis, dan membuat model fasilitasi, asistensi, dan advokasi untuk mengatasi permasalahan bidang pendidikan yang dihadapi daerahnya.
 - 8) RPTD provinsi bidang pendidikan wajib memprioritaskan penyelesaian permasalahan pendidikan antar kabupaten/kota di daerahnya.
 - 9) RPTD provinsi bidang pendidikan.
 - 10) Pemerintah provinsi bekerja sama dengan dewan pendidikan provinsi, badan akreditasi provinsi sekolah/madrasah (BAP S/M), badan akreditasi provinsi pendidikan nonformal (BAP PNF), lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP), balai

pengembangan pendidikan nonformal dan informal (BPPNFI), lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan lainnya.

- 11) Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kantor wilayah departemen agama provinsi dalam melakukan perencanaan di bidang pendidikan.
- b. Pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan
- 1) Program wajib belajar
 - 2) Program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah
 - 3) Program pendidikan keaksaraan
 - 4) Program penjaminan mutu satuan pendidikan
 - 5) Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 6) Program akreditasi pendidikan
 - 7) Program peningkatan relevansi pendidikan
 - 8) Program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan
 - 9) Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kantor wilayah departemen agama provinsi dalam pelaksanaan rencana, fasilitasi, asistensi, dan advokasi program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.

- c. Pengawasan dan evaluasi
 - 1) Program wajib belajar
 - 2) Program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah
 - 3) Program pendidikan keaksaraan
 - 4) Program penjaminan mutu satuan pendidikan
 - 5) Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 6) Program akreditasi pendidikan
 - 7) Program peningkatan relevansi pendidikan
 - 8) Program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan
 - 9) Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kantor wilayah departemen agama provinsi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.

Standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota diatur dalam PMPN Nomor 50 Tahun 2007, yang memuat tentang:²²²

- a. Perencanaan program
 - 1) Pemerintah kabupaten/kota merumuskan visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan yang sejalan dengan

222 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007, Lampiran II.

- visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan menjadi acuan dalam penetapan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten/kota bidang pendidikan.
 - 3) Pemerintah kabupaten/kota memiliki sistem informasi berbasis TIK yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir untuk daerahnya masing-masing.
 - 4) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemetaan pendidikan.
 - 5) Pemerintah kabupaten/kota menyusun rencana operasional kabupaten/kota bidang pendidikan yang mengacu kepada rencana strategis bidang pendidikan pada pemerintah tingkat provinsi dan nasional.
 - 6) Rencana operasional kabupaten/kota bidang pendidikan memprioritaskan program:
 - a) Wajib belajar;
 - b) Peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c) Penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
 - e) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f) Akreditasi pendidikan formal dan nonformal;
 - g) Peningkatan relevansi pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- h) Beasiswa bagi anak cerdas dan berbakat dari keluarga yang kurang mampu;
 - i) Pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.
- 7) Rencana operasional kabupaten/kota bidang pendidikan:
- a) Dituangkan dalam dokumen yang menjadi panduan semua pihak dalam pengelolaan pendidikan di lingkungan kabupaten/kota;
 - b) Dijadikan dasar pengelolaan pendidikan secara efisien dan efektif;
 - c) Dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 8) Pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun organisasi satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan memperhatikan tugas dan fungsinya.
- 9) Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan dewan pendidikan kabupaten/kota dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan lainnya.
- 10) Pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan kantor departemen agama kabupaten/kota dalam melakukan perencanaan di bidang pendidikan.
- b. Pelaksanaan rencana kerja bidang pendidikan
- 1) Program wajib belajar
 - 2) Program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah
 - 3) Program pendidikan keaksaraan
 - 4) Program penjaminan mutu satuan pendidikan
 - 5) Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

- 6) Program akreditasi pendidikan
 - 7) Program peningkatan relevansi pendidikan
 - 8) Program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan
 - 9) Pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan kantor departemen agama kabupaten/kota dalam melaksanakan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.
- c. Pengawasan dan evaluasi
- 1) Program wajib belajar
 - 2) Program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah
 - 3) Program pendidikan keaksaraan
 - 4) Program penjaminan mutu satuan pendidikan
 - 5) Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
 - 6) Program akreditasi pendidikan
 - 7) Program peningkatan relevansi pendidikan
 - 8) Program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan
 - 9) Pemerintah kabupaten/kota memberikan sanksi berupa pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, satuan/penyelenggara pendidikan nonformal yang melanggar ketentuan

perundangan yang berlaku.

- 10) Pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan kantor departemen agama kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dan evaluasi program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.

2. Program pendidikan bidang kurikulum provinsi & kabupaten

Kurikulum merupakan salah satu instrumen yang diharapkan memberikan arah untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum disusun dan dikembangkan digunakan sebagai pemandu dalam mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.²²³

Usaha yang dilakukan pemerintah adalah memperbaharui kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013. Konsep baru yang muncul dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karenanya, kurikulum 2013 diarahkan pada pencapaian kompetensi dan pelaksanaannya tetap berorientasi pada

223 Lambang Subagyo, "Implementasi Kurikulum 2013 pada Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014", dalam *Jurnal Pancaran*, Vol. 3, No. 4, hal 131-144, Nopember 2014.

8 standar nasional pendidikan.

Implementasi kurikulum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian tugas dalam implementasi kurikulum 2013 adalah: 1) pemerintah pusat bertanggung-jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum, 2) pemerintah pusat bertanggung-jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional, 3) pemerintah provinsi bertanggung-jawab dalam melakukan *supervise* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait, 4) pemerintah kabupaten/kota bertanggung-jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.²²⁴

Kurikulum pendidikan antara yang dikelola oleh Kemenag dan Dikpora pada hakikatnya adalah sama. Sebab, semua kurikulum yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan harus berdasarkan standar nasional pendidikan. Jika dalam praksisnya kurikulum yang dijalankan oleh lembaga pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten berbeda dengan kurikulum yang disusun, tidak akan menjadi masalah selagi masih mengacu pada standar nasional pendidikan. Karena, setiap lembaga pendidikan pasti mempunyai pengembangan kurikulum yang berbeda sesuai iklim sosial dan budaya yang berkembang.

Penyempurnaan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 sebenarnya bukan suatu perubahan yang drastis. Implementasi kurikulum 2013 juga hampir mirip dengan kurikulum KTSP, yaitu menggunakan prinsip yang: 1) berpusat pada peserta didik, 2) mengembangkan kreatifitas peserta didik, 3) menciptakan kondisi

224 *Ibid.*

menyenangkan dan menantang, 4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan 5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.²²⁵

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Langkah-langkah pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Kondisi seperti ini, proses pembelajaran tentu saja harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah.

Standar kurikulum pada setiap satuan pendidikan yang dikelola oleh bidang kurikulum provinsi dan kabupaten, harus mengacu pada standar nasional pendidikan, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2005 bagian kerangka dasar dan struktur kurikulum.²²⁶

Pasal 6 memuat:

- 1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

225 *Ibid.*

226 PP Nomor 19 Tahun 2005 BAB III Bagian Kedua Pasal 6.

- kepribadian;
- c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d) Kelompok mata pelajaran estetika;
 - e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- 2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
 - 3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
 - 4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan atau penghayatan peserta didik.
 - 5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
 - 6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 8 memuat:

- 1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

- 2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- 3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

3. Program pendidikan bidang keuangan dan sarpras provinsi & kabupaten

Standar pembiayaan atau keuangan pada setiap satuan pendidikan yang dikelola oleh bidang keuangan provinsi dan kabupaten, harus mengacu pada standar nasional pendidikan, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2005 bagian Standar Pembiayaan:²²⁷

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan;
 - c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan

227 PP Nomor 19 Tahun 2005 BAB IX Pasal 62.

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

- d) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.

Sedangkan untuk standar sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap satuan pendidikan yang dikelola oleh bidang sarpras provinsi dan kabupaten, harus mengacu pada standar nasional pendidikan, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2005 bagian standar sarana dan prasarana.²²⁸

Pasal 42 memuat:

- 1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43 memuat:

- 1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain

228 PP Nomor 19 Tahun 2005 BAB VII Pasal 42-48

pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

- 2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- 3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- 4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- 5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44 memuat:

- 1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- 2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- 3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan

satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.

- 4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- 5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45 memuat:

- 1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- 4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- 5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- 6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46 memuat:

- 1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47 memuat:

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- 3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48 memuat: Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

4. Kewenangan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten

Kewenangan provinsi dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 BAB II Pasal 3 adalah sebagai berikut:²²⁹

- 1) Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- 2) Kewenangan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan

229 PP Nomor 25 Tahun 2000 BAB II Pasal 3

regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman dan perencanaan tata ruang Propinsi.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota, propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
- 4) Kewenangan kabupaten/kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dapat dilaksanakan oleh Propinsi dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.
- 5) Kewenangan propinsi sebagaimana dimaksud ayat (2), dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut: bidang pertanian, bidang kelautan, bidang pertambangan dan energi, bidang kehutanan dan perkebunan, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang sosial, bidang penataan ruang, bidang permukiman, bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan, bidang lingkungan hidup, bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, bidang pengembangan otonomi daerah, bidang perimbangan keuangan, bidang hukum dan perundang-undangan.

Lebih lanjut untuk kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan tingkat provinsi dapat dijabarkan sebagai berikut:²³⁰

- 1) Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan

230 PP Nomor 25 Tahun 2000 BAB II Pasal 3 Ayat 10.

atau tidak mampu.

- 2) Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- 3) Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- 4) Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- 5) Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
- 6) Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Sedangkan untuk kewenangan tingkat kabupaten/kota dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 BAB II Pasal 4 adalah sebagai berikut:²³¹ Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/kota yang tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerja sama antar kabupaten/kota, kerja sama antar-kabupaten/kota dengan propinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada propinsi;
- 2) pelaksanaan kewenangan melalui kerja sama atau penyerahan suatu kewenangan kepada propinsi harus didasarkan pada keputusan kepala daerah kabupaten/

231 PP Nomor 25 Tahun 2000 BAB II Pasal 4

- kota dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
- 3) Bupati/walikota wajib menyampaikan keputusan mengenai penyerahan kewenangan kepada propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada gubernur dan presiden dengan tembusan kepada dewan pertimbangan otonomi daerah;
 - 4) Presiden setelah memperoleh masukan dari dewan pertimbangan otonomi daerah dapat menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan tersebut;
 - 5) Apabila Presiden tidak memberikan persetujuannya, kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
 - 6) Apabila Presiden memberikan persetujuannya, pelaksanaan kewenangan tersebut diserahkan kepada provinsi;
 - 7) Apabila dalam jangka waktu satu bulan Presiden tidak memberikan tanggapan, maka penyerahan kewenangan tersebut dianggap disetujui;
 - 8) Sebagai akibat dari penyerahan tersebut, propinsi sebagai daerah otonom harus melaksanakan kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 - 9) Apabila provinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, maka Propinsi menyerahkannya kepada Pemerintah dengan mekanisme yang sama sebagaimana tercantum pada huruf c sampai dengan huruf h;
 - 10) Apabila kabupaten/kota sudah menyatakan kemampuannya menangani kewenangan tersebut, propinsi atau pemerintah

wajib mengembalikannya kepada kabupaten/kota tanpa persetujuan Presiden.

C. Program Bidang Pendidikan pada Satuan Pendidikan

1. Program bidang pendidikan/kurikulum dan pembelajaran

Kurikulum adalah jantung pendidikan (*curriculum is the heart of education*). Oleh karena itu, sudah seharusnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan kurikulum masa sebelumnya.²³²

Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan/kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus.²³³

Penyelenggara pendidikan di negeri ini melalui kementerian pendidikan nasional terus melakukan berbagai usaha guna meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya adalah dengan merumuskan kurikulum penyempurna (KTSP 2006) menjadi (KTSP 2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no 19 tahun

232 Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas. *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*; Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa (Jakarta, tp., 2010), hlm. 1.

233 Kunandar, *Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 125.

2005 tentang standar nasional pendidikan Bab XI A Pasal 77A ayat 1 bahwa kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pasal 77 B ayat 1 menyatakan bahwa struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas menegaskan penerapan kurikulum 2013 diberlakukan di sekolah-sekolah.

Menteri pendidikan dan kebudayaan Muhammad Nuh menegaskan perlu adanya perubahan dan pengembangan kurikulum KTSP 2013. Mendikbud mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan yang sangat penting, karena kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman.

KTSP 2013 didorong oleh beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah Internasional. Hasil survey “*trends in international math and science*” tahun 2007, yang dilakukan oleh *Global Institute*, menunjukkan hanya lima persen peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan soal penalaran berkategori tinggi, padahal peserta didik Korea dapat mencapai 71 persen. Sebaliknya, 78 persen peserta didik di Indonesia dapat mengerjakan soal hafalan berkategori rendah, sementara siswa Korea 10 persen.²³⁴

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter. Kreativitas anak-anak bangsa mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab

234 Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 60.

tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks. Meskipun demikian, keberhasilan kurikulum 2013 dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif dan inovatif serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif akademik serta partisipasi warga sekolah.

Kurikulum 2013 sejalan dan mengarah pada kandungan al-Quran surat Luqman ayat 12-19 yang berisi tentang kurikulum 2013. Pendidikan islam merupakan satu komponen pendidikan agama yang berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan pelajar. Implementasi kurikulum 2013 masih diwarnai minimnya sosialisasi dan persiapan guru. Sementara itu, fakta di lapangan yang peneliti peroleh sebagai gambaran awal dari penelitian ini masih banyak guru yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan untuk diklat dan pelatihan hanya guru tertentu saja yang mengikutinya, sehingga hanya sebagian guru saja yang memahami kurikulum 2013 tersebut.

Selain itu, banyak guru senior yang menganggap bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013 tersebut tidak ada bedanya dengan sistem pengajaran yang terdahulu. Mereka bertanya bagaimana mungkin kurikulum 2013 berhasil diterapkan di sekolah jika guru masih juga mengalami kebingungan dalam menangkap konsep, substansi, dan mekanisme pelaksanaan kurikulum tingkat

satuan pendidikan 2013. Konteks ini perlu dipahami bahwa pentingnya sebuah kesiapan yang harus dimiliki guru.²³⁵

Penerapan kurikulum 2013 menuntut kerjasama yang optimal di antara guru, sehingga memerlukan pembelajaran berbentuk tim, dan menuntut kerjasama yang kompak di antara guru anggota tim. Kerjasama antara guru sangat penting dalam proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Penerapan kurikulum 2013 menuntut kerjasama yang optimal dari segenap komponen di sekolah, seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa, bahwa:²³⁶ “keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan”.

Hal tersebut akan bermuara pada hubungan yang harmonis antara kurikulum dan guru sebagai pelaksananya. Keberhasilan penerapan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi harus melibatkan semua komponen (stakeholder), termasuk komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan itu sendiri. Komponen-komponen tersebut antara lain kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan sekolah/madrasah, pelaksanaan pengembangan diri peserta didik, pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan serta etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah/madrasah.

Keberhasilan kurikulum 2013 sangat tergantung kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan juga masyarakat dalam menyikapi dan

235 Lismawati, “Evaluasi Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2013 pada Pelajaran Al-Islam di SD Muhammadiyah 5 Jakarta”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 7, Nomor 2, September 2016.

236 Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi...*, hal.31.

melaksanakan Kurikulum 2013 tersebut. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak yang terkait untuk terlaksananya Kurikulum 2013 ini sangat diharapkan agar kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013 dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif.

Standar nasional pendidikan (SNP pasal 1, ayat 15) dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ayat 1 pasal 2, sebagai berikut:

- a. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
- b. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

2. Program Pendidikan Bidang Muatan Lokal dan Ekstra-kurikuler

a. Muatan lokal

Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan berbagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan berbagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.²³⁷

237 Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional dinyatakan bahwa: 1) muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; 2) muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.²³⁸

Selanjutnya, dalam Pasal 77 P antara lain dinyatakan bahwa: 1) pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan *supervise* pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; 2) pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan *supervise* pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; 3) pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan 4) seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.²³⁹

Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:²⁴⁰

- 1) Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya;
- 2) Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta

Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman kegiatan ekstrakurikuler BAB IV.

238 *Ibid.*, BAB I.

239 *Ibid.*,

240 *Ibid.*,

pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan

- 3) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Komponen Muatan Lokal²⁴¹

- 1) Ruang lingkup

Ruang lingkup muatan lokal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah.

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut adalah seperti kebutuhan untuk:

- b) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;

241 Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman kegiatan ekstrakurikuler BAB V.

- c) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah;
 - d) Meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan peserta didik dan untuk mendukung pengembangan potensi daerah, seperti potensi pariwisata; dan
 - e) Meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- 2) Lingkup isi/jenis muatan lokal.

Lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah yang bersangkutan.

- a) Prinsip pengembangan

Pengembangan muatan lokal untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK perlu memperhatikan beberapa prinsip pengembangan sebagai berikut:

- 1) Utuh

Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup.

- 2) Kontekstual

Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah.

- 3) Terpadu

Pendidikan muatan lokal dipadukan dengan

lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri.

4) Apresiatif

Hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk pertunjukkan, lomba-lomba, pemberian penghargaan) di level satuan pendidikan dan daerah.

5) Fleksibel

Jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat *fleksibel* sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.

6) Pendidikan sepanjang hayat

Pendidikan muatan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus-menerus.

7) Manfaat

Pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.

3) Strategi pengembangan muatan lokal

Terdapat dua strategi dalam pengembangan muatan lokal, yaitu:

a) Bawah ke atas (*bottom up*)

b) Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal dapat dibangun secara bertahap tumbuh di dan dari satuan-satuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan jenis muatan lokal sesuai dengan hasil

analisis konteks. Penentuan jenis muatan lokal kemudian diikuti dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan/ atau ketersediaan sumber daya pendukung. Jenis muatan lokal yang sudah diselenggarakan satuan pendidikan kemudian dianalisis untuk mencari dan menentukan bahan kajian umum/ besarannya.

- c) Atas ke bawah (*top down*)
- d) Tahap ini, pemerintah daerah sudah memiliki bahan kajian muatan lokal yang diidentifikasi dari jenis muatan lokal yang diselenggarakan satuan pendidikan di daerahnya. Tim pengembang muatan lokal dapat menganalisis *core and content* dari jenis muatan lokal secara keseluruhan. Setelah *core and content* umum ditemukan, maka tim pengembang kurikulum daerah dapat merumuskan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tentang jenis muatan lokal yang akan diselenggarakan di daerahnya.

Ekstrakurikuler

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana

dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement* dan *complements*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan.

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan di sekolah atau di luar sekolah, yang terkait dengan tugas belajar suatu mata pelajaran bukan kegiatan ekstrakurikuler.²⁴²

Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.²⁴³ Ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.²⁴⁴

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan

242 Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman kegiatan ekstrakurikuler BAB IV Pasal 1.

243 *Ibid.*, Pasal 2.

244 *Ibid.*, Pasal 3.

perkembangan peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan *sense* akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu perangkat operasional (*supplement* dan *complements*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan (seperti disebutkan pada Pasal 53, Ayat (2), Butir A, Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32, Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan) serta dievaluasi pelaksanaannya setiap semester oleh satuan pendidikan (seperti disebutkan pada Pasal 79 Ayat (2) Butir B, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan).

Komponen Kegiatan Ekstrakurikuler²⁴⁵

a. Visi dan misi

1) Visi

Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan

245 Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman kegiatan ekstrakurikuler BAB V.

adalah berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatankegiatan di luar kegiatan intrakurikuler.

2) Misi

Misi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.
- b) Menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan atau berkelompok.

b. Fungsi dan tujuan

1) Fungsi

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir.

- a) Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan.
- b) Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik.

Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.

- c) Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana *rileks*, menggembarakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik.
- d) Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas.

2) Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah:

- a) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.
- b) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya.

c. Prinsip

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut.

- 1) Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing.
- 2) Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela.
- 3) Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing.
- 4) Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik.
- 5) Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat.
- 6) Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat.

d. Jenis Kegiatan

Kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk.

- 1) Krida; meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa (LDKS), palang merah remaja (PMR), pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), dan lainnya;
- 2) Karya ilmiah; meliputi kegiatan ilmiah remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
- 3) Latihan/olah-bakat/prestasi; meliputi pengembangan

bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya; atau

4) Jenis lainnya.

e. Format kegiatan

Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk.

1) Individual; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan.

2) Kelompok; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok kelompok peserta didik.

3) Klasikal; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik dalam satu kelas.

4) Gabungan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik antarkelas.

5) Lapangan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan.

3. Sarana prasarana pendukung program pendidikan atau kurikulum dan pembelajaran

Aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek sarana prasarana. sarana dan prasarana pada pendidikan nasional telah memiliki standar nasional pendidikan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar,

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴⁶

Kewajiban satuan pendidikan terkait sarana prasarana telah diatur sebagai berikut:²⁴⁷

1. Satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43 memuat:²⁴⁸

- 1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

246 PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal BAB I Pasal I Ayat 8.

247 PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal BAB VII Pasal 42.

248 *Ibid.*, Pasal 43.

- 2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- 3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- 4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- 5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44 memuat:²⁴⁹

- 1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- 2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- 3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang

249 *Ibid.*, Pasal 44.

menjadi pengumpulan masukan peserta didik.

- 4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- 5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45 memuat:²⁵⁰

- 1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- 4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- 5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- 6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46 memuat:²⁵¹

- 1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

250 *Ibid.*, Pasal 45

251 *Ibid.*, Pasal 46

- 2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47 memuat:²⁵²

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- 3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48 memuat:²⁵³

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

D. Program Bidang Kesiswaan dan Bimbingan Konseling

1. Program pendidikan bidang kesiswaan

Kegiatan program pendidikan bidang kesiswaan dapat diartikan sebagai proses pendampingan pada peserta didik, dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal.²⁵⁴

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan

252 *Ibid.*, Pasal 47.

253 *Ibid.*, Pasal 48.

254 Ely Kurniawati, "Manajemen Kesiswaan di SMA Negeri Mojoagung Jombang", dalam *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, April 2014.

kebutuhan.²⁵⁵ Oleh karena itu, dengan proses dan metode yang tepat sasaran akan menjadikan pengelolaan pendidikan di sekolah lebih optimal dalam pencapaian tujuan yang dicita-citakan.

Kesiswaan dalam sekolah perlu untuk mengelola secara optimal agar visi, misi, dan tujuan sekolah yang diharapkan dapat tercapai. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan berperan penting dalam membantu guru dan seluruh personil sekolah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan seorang kepala sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para guru dan bawahannya.²⁵⁶

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas guru dan bawahannya yaitu dengan pelimpahan wewenang dan tugas. Pelimpahan wewenang yang dimaksudkan disini adalah wewenang yang diberikan kepada wakil kepala sekolah selaku guru yang diberi tugas tambahan dalam membantu tugas kepala sekolah terutama wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab dibidang kesiswaan.²⁵⁷

Mengenai kegiatan siswa, dalam hal ini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan bertanggung jawab untuk membantu kepala sekolah. Sehingga, segala sesuatu yang berkaitan dengan siswa merupakan tanggung jawab wakil kepala sekolah bidang kesiswaan baik dibidang peningkatan kualitas disiplin, pengembangan bakat dan membentuk siswa-siswi yang taat serta patuh terhadap aturan-

255 Budiman N. N, *Etika Profesi Guru*, (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012), h. 125.

256 Imam Musbikin, *Menjadi Kepala Sekolah Yang Hebat*, (Pekanbaru Riau: Zanafa Pulishing, 2013), h. 2.

257 Nur Komariah & Rohana, “Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dalam Meningkatkan Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tembilahan”, dalam *Jurnal Al-Afkar*, Vol III, No 2, Oktober 2015.

aturan sekolah. Sangat perlu untuk menerapkan kedisiplinan yang tinggi di sekolah, karena sekolah yang tidak disiplin itu ibarat kincir tak berair.²⁵⁸ Sehingga, kedisiplinan siswa menjadi salah satu indikator ketercapaian dan keberhasilan pendidikan.

Perlu adanya manajemen kesiswaan agar program dan kegiatan siswa dapat terkontrol dan terkelola dengan baik. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Program kegiatan bidang kesiswaan dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁵⁹

- a. Kehadiran siswa di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan dengan siswa.
- b. Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukkan siswa kepada kelas dan program studi.
- c. Evaluasi dan pelaporan kemajuan siswa.
- d. Supervisi program-program bagi siswa yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran luar biasa.
- e. Mengendalikan disiplin siswa.
- f. Program bimbingan.
- g. Program kesehatan dan keamanan, dan
- h. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional siswa.

-
- 258 Piet A. Sahertian, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 125.
- 259 Nur Komariah & Rohana, "Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dalam Meningkatkan Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tembilahan", dalam *Jurnal Al-Afkar*, Vol III, No 2, Oktober 2015.

Adapun tugas pokok wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu:²⁶⁰

- a. Rumusan tugas, yakni membantu kepala sekolah dalam urusan kesiswaan.
- b. Uraian tugas/pekerjaan
 - 1) Menyusun program kerja pembinaan siswa dan mengkoordinir pelaksanaannya.
 - 2) Menyusun program kerja 7K (kebersihan, kekeluargaan, keamanan, ketertiban, keindahan, kerindangan, dan keimanan) serta mengkoordinasi pelaksanaannya dengan koordinator 7K.
 - 3) Mengkoordinir pelaksanaan pemilihan pengurus OSIS, Pramuka, dan PMR serta kegiatan-kegiatan ekstra siswa.
 - 4) Membimbing dan mengawasi kegiatan OSIS, Pramuka, dan PMR serta kegiatan-kegiatan ekstra siswa.
 - 5) Membina kepengurusan OSIS.
 - 6) Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pemilihan calon siswa teladan, penerima beasiswa dan paskibra.
 - 7) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan luar sekolah.
 - 8) Mengkoordinir kegiatan upacara sekolah, upacara hari nasional, apel pagi, kebersihan dan senam.
 - 9) Membuat laporan berkala dan insidentil.
- c. Hasil kerja
 - 1) Telah tersusun program kerja dan pelaksanaannya.

260 *Ibid.*

- 2) Terbentuknya pengurus OSIS, Pramuka, dan PMR.
 - 3) Berhasilnya kegiatan-kegiatan siswa.
 - 4) Terpilihnya calon siswa teladan, beasiswa, pertukaran pelajar dan paskibra.
 - 5) Keberhasilan kegiatan luar sekolah.
 - 6) Terlaksananya upacara sekolah apel pagi, kebersihan dan senam jasmani dengan baik dan benar.
 - 7) Terwujudnya laporan berkala dan rutin.
 - 8) Adanya buku pembinaan siswa.
 - 9) Adanya data kehadiran siswa setiap bulan.
 - 10) Adanya daftar siswa sebagai petugas upacara dan petugas kebaktian.
 - 11) Adanya peta kapvling tiap kelas.
 - 12) Adanya lembar/surat keterangan siswa yang permissi/pulang.
 - 13) Adanya rekapitulasi absensi siswa tiap bulan.
 - 14) Adanya srtuktur organisasi OSIS.
 - 15) Adanya koordinasi yang jelas dengan guru BP/BK serta koordinator 7K.
- d. Wewenang
- 1) Mewakili Kepala Sekolah apabila tidak ada di tempat.
 - 2) Menyusun daftar pembagian tugas siswa untuk memelihara kebersihan sekolah.
 - 3) Menyusun daftar pembagian tugas guru untuk tugas pengawas kebersihan dan ketertiban sekolah.
 - 4) Memilih siswa untuk penerimaan beasiswa, paskibra serta siswa teladan.
 - 5) Menyiapkan siswa untuk kegiatan ekstrakurikuler.

- 6) Membuat daftar pelaksana upacara di sekolah.
- 7) Mengkoordinir pelaksana upacara sekolah.
- e. Tanggung jawab
 - 1) Melaksanakan tugas harian sesuai dengan surat tugas dari Kepala Sekolah.
 - 2) Memelihara 7K di sekolah.

Berdasarkan poin-poin di atas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan memegang peranan penting dalam melaksanakan pembinaan terhadap siswa di sekolah. Namun, sepenuhnya perlu keterlibatan dan kerjasama seluruh guru dan staf yang ada di lingkungan sekolah agar tercapai tujuan yang di harapkan.

Adapun tugas-tugas bidang kesiswaan dapat dirinci sebagai berikut:²⁶¹

- a. Menyusun program pembinaan kesiswaan/osis.
- b. Melaksanakan bimbingan, pegarahan, pengendalian kegiatan siswa atau osis dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus.
- c. Pembinaan pengurus osis dalam berorganisasi.
- d. Menyusun program dan jadual pembinaan siswa secara berkala dan *incidental*.
- e. Membina dan melaksanakan koordinasi keamanan, kesehatan, kebersihan, ketertiban, kerindangan, keindahan, dan kekeluargaan (7K).
- f. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon-calon siswa penerima beasiswa.
- g. Pengadaan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam

261 Staff UNY, "Tugas-Tugas Kesiswaan dan Tugas-Tugas Guru BK di Sekolah", dalam www.Staff.uny.ac.id, akses tanggal 2 Desember 2017.

kegiatan di luar sekolah.

- h. Mengatur mutasi siswa.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan.
- j. Menyusun program kegiatan ekstrakurikuler.

2. Program Pendidikan Bidang Bimbingan Konseling

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu secara berkesinambungan agar yang bersangkutan dapat memahami dirinya, sanggup mengarahkan diri, dan bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga, serta masyarakat (Winkel, 1997; Nirwana, 2012). Kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi pengumpulan data siswa, layanan informasi, konseling, penempatan, dan layanan tindak lanjut (Belkin, 1981; Sunawan dkk., 2012). Sebagai kepentingan operasional di sekolah (Dirjen Dikdasmen, 1994), secara khusus layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.

Sekolah sebagai pranata pendidikan yang melayani kepentingan dan harapan banyak pihak mempunyai peran strategis. Sekolah harus mampu memelihara, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam sistem yang komprehensif. Diperlukan kepala sekolah dengan kualitas yang baik untuk menyelenggarakan seluruh program sekolah secara efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan, memegang peranan sangat penting, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan seluruh komponen sistem sekolah. Secara kelembagaan, kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral, dan oleh karenanya harus memahami tugas dan fungsinya, dengan

memiliki kepedulian kepada staf dan siswa untuk keberhasilan sekolah beserta lulusan (Wahjosumidjo, 1999).

Ukuran kualitas lulusan tidak hanya diukur dari kesiapan kognitif saja, akan tetapi ukuran seorang peserta didik bisa dikatakan berkualitas apabila dia sudah siap secara emosional, sosial, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dapat mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya, dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan juga yang paling penting yaitu kesiapan moral, siswa bisa dikatakan berkualitas jika dia memiliki moral yang baik, baik itu moral yang berlandaskan kepada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun moral yang ada dalam Agama.²⁶²

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Konseling dalam hal ini dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut konseling dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang (Tolbert, dalam Prayitno 2004:101).

Adapun tugas-tugas bidang bimbingan dan konseling dapat dirinci sebagai berikut:²⁶³

- a. Melakukan studi kelayakan dan *needs assessment* pelayanan bimbingan dan konseling.

262 Hendri Almawijaya, "Analisis Manajemen Bimbingan Konseling dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa", dalam *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 5, November 2015.

263 Staff UNY, "Tugas-Tugas Kesiswaan dan Tugas-Tugas Guru BK di Sekolah", dalam www.Staff.uny.ac.id, akses tanggal 2 Desember 2017.

- b. Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling yang meliputi waktu kegiatan, metode bimbingan konseling, serta pengolahan data hasil bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling dilaksanakan untuk satuan-satuan waktu tertentu. Program-program tersebut dikemas dalam program harian/mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan.
- c. Melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling.
- d. Menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling.
- e. Menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling.
- f. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling.
- g. Mempersiapkan diri, menerima dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepengawasan oleh pengawas sekolah/madrasah bidang bimbingan dan konseling.
- h. Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas serta pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling.
- i. Mengadakan koordinasi dengan wali kelas, guru bidang studi dan ketua jurusan serta urusan kesiswaan dalam rangka pembinaan siswa dan orangtua wali murid.
- j. Bersama wali kelas dan kesiswaan dalam menangani kesiswaan yang berkaitan secara psikis dengan kenakalan siswa, penyimpangan disiplin dan gangguan belajar.
- k. Mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minat siswa.

- l. Mengembangkan potensi siswa dalam pengenalan lingkungan dan dunai kerja.
- m. Memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa secara individu yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh lingkungan, kesukaran belajar dan sebagainya.
- n. Mengadministrasikan kegiatan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakannya.
- o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah/madrasah.
- p. Membuat laporan berkala kepada kepala sekolah.

E. Program Pendidikan Bidang Pengembangan SDM

1. Tenaga pendidik

Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan adalah pendidik atau guru. Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada di garis depan berhadapan dengan siswa yang dituntut memiliki kompetensi yang memadai karena seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 ayat 2 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.²⁶⁴

Pendidik dari segi bahasa diartikan sebagai orang yang

264 *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 27.

mendidik.²⁶⁵ Pendidik juga dapat diartikan sebagai pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak tokoh dan pemimpin umat. Jadi, keteladanan guru adalah contoh yang baik dari guru, baik yang berhubungan dengan sikap, perilaku, tutur kata, mental maupun yang terkait dengan akhlak dan moral yang patut dijadikan contoh bagi peserta didik.²⁶⁶

Unsur sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting terhadap maju dan mundurnya suatu organisasi. Hadari Nawawi menegaskan bahwa manusia merupakan faktor sentral yang menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap perusahaan dalam menjalankan bisnis. Manusia adalah subyek dan bukan obyek dalam menjalankan pekerjaan, yang dalam hubungan kerja harus saling memperlakukan satu dengan yang lain secara manusiawi.²⁶⁷

Adapun standar pendidik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang SNP Pasal 28, yaitu:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan

265 WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 250.

266 Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter: Teori, Praktik, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 148.

267 Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 1

perundang-undangan yang berlaku.

- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) kompetensi pedagogik, b) kompetensi kepribadian, c) kompetensi profesional, dan d) kompetensi sosial.
- d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat (1), kriteria pendidik dapat dikatakan kompeten apabila pendidik telah menguasai empat kompetensinya: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- a. Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Seorang pendidik dikatakan mempunyai kompetensi pedagogik minimal apabila telah menguasai bidang studi tertentu, ilmu pendidikan, metode pembelajaran, maupun pendekatan pembelajaran. Selain itu, kemampuan kemampuan pedagogik juga ditentukan dalam kemampuan pendidik untuk membantu, membimbing, dan memimpin.²⁶⁸

268 Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik (Menurut UU Guru dan Dosen)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006),

- b. Kemampuan kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik.²⁶⁹

Oleh karena itu, pendidik khususnya guru pendidikan agama islam sebagai pengemban amanat pembelajaran pendidikan agama islam harus orang yang memiliki kepribadian yang shaleh. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena dialah yang akan mencetak anak didiknya menjadi anak shaleh. Seorang pendidik agama islam diharuskan memiliki sifat-sifat yang dijelaskan oleh tokoh islam, Muhammad Athiyah al-Abrasyi, yang dikutip oleh Sanusi Uwes dalam bukunya manajemen pengembangan mutu dosen, seorang pendidik islam itu harus memiliki sifat-sifat antara lain:²⁷⁰

- 1) Memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar untuk mencari keridhoan Allah SWT.
- 2) Seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat ria (mencari nama), dengki, permusuhan, perselisihan, dan sifat tercela yang lain.
- 3) Ikhlas dalam pekerjaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaan merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di dalam tugas dan suksesnya murid-murid.
- 4) Seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya, ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang

hlm. 63.

269 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: 2005), hlm. 59.

270 Sanusi Uwes, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 28.

- hati, banyak sabar, dan jangan pemaarah karena sebab-sebab kecil, berpribadi dan mempunyai harga diri.
- 5) Seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri, dan memikirkan keadaan mereka seperti ia memikirkan anaknya sendiri.
 - 6) Seorang guru harus mengetahui tabi'at, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa dan pemikiran-pemikiran muridnya agar ia tidak keliru dalam mendidik muridnya.
 - 7) Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya, serta memperdalam pengetahuannya, tentang itu sehingga mata pelajaran itu tidak akan bersifat dangkal.
- c. Kompetensi professional, yaitu kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam.²⁷¹
- Sistem pendidikan harus ditata dan dirancang oleh orang-orang yang ahli dibidangnya, yang ditandai dengan kompetensi persyaratannya untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Pendidik harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta sikap yang mantap dan memadai, sehingga mampu mengelola proses pembelajaran yang efektif.
- d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.²⁷²

271 *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 56.

272 *Ibid.*, hal. 57.

Kompetensi sosial juga bisa diartikan kemampuan pendidik dalam membina dan mengembangkan interaksi sosial baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai anggota masyarakat. Seharusnya seorang pendidik tidak hanya tanggung jawab di dalam kelas saja, tetapi harus mewarnai perkembangan anak didik di luar kelas. Pendidik tidak sekedar orang yang hadir di depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, tetapi juga menjadi anggota masyarakat yang harus ikut aktif dalam mengarahkan perkembangan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia begitu cepat. Sehingga, jika kita berhenti belajar yang terjadi adalah kita menjadi orang “ketinggalan jaman”. Perlu terus belajar dan berlatih untuk selalu meng-*update* informasi dan meng-*upgrade mindset*. Begitu pun bagi pendidik, perlu selalu belajar dan berlatih agar ilmunya selalu selaras dengan perkembangan zaman.

Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada diseluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan (sekolah). Tujuan dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berfikirnya, sikap terhadap berfikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan.²⁷³

Sudarwan Danim mengatakan bahwa, meningkatkan

273 Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI, 2003), hlm. 107-108.

dan mengembangkan kualitas atau mutu pendidik dan tenaga kependidikan perlu mengusahakan dengan berbagai upaya, antara lain melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan teknis yang dilakukan dengan cara berkesinambungan di sekolah dan di wadah-wadah pembinaan profesional seperti kelompok kerja guru (KKG), kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) dan kelompok kerja penilik sekolah (KKPS).²⁷⁴

Program peningkatan kemampuan profesional pendidik serta mutu pendidik di sekolah, sebaiknya melalui langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:²⁷⁵

- a. Mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kesulitan atau masalah-masalah yang seringkali dimiliki atau dialami pegawai.
- b. Menetapkan program pengembangan yang sekiranya diperlukan untuk mengatasi kekurangan, kelemahan, kesulitan, dan masalah-masalah yang seringkali dihadapi dan dialami pendidik.
- c. Merumuskan tujuan program pengembangan yang diharapkan dapat dicapai pada akhir program pengembangan.
- d. Menetapkan dan merancang materi dan media yang akan digunakan dalam pengembangan.
- e. Menetapkan dan merancang metode dan media yang akan digunakan dalam pengembangan.
- f. Menetapkan bentuk dan mengembangkan bentuk

274 Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet.I, hlm. 91.

275 Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Sekolah Dasar; dalam Rangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 45.

instrumen penilaian yang akan digunakan dalam mengukur keberhasilan program pengembangan.

- g. Menyusun dan mengalokasikan anggaran program pengembangan.
- h. Melaksanakan program pengembangan dengan materi, metode dan media yang telah ditetapkan.
- i. Mengukur keberhasilan program pengembangan.
- j. Menetapkan program tindak lanjut pengembangan pegawai pada masa yang akan datang.

Banyak cara dalam membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan melalui penataran (*inservice training*) baik dalam rangka penyegaran (*refreshing*) maupun dalam rangka peningkatan kemampuan mereka (*up-grading*). Cara-cara lainnya ini dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama, misalnya mengikuti kegiatan atau kesempatan; *ore-service training*, *on the job training*, seminar, *workshop*, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi dan sebagainya.²⁷⁶

2. Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud di sini adalah pegawai profesional yang bekerja di lingkungan pendidikan/sekolah yaitu kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan.²⁷⁷

Pasal 1 ayat 5 UU Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa; “tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang

276 Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI, 2003), hlm. 108.

277 *Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 2.

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”.²⁷⁸ Tenaga kependidikan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pengembangan tenaga kependidikan ini, yaitu:²⁷⁹

- a. Pengembangan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggara pendidikan.
- b. Pengembangan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing.
- c. Pengembangan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah, dan menyediakan bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan dan insentif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya segala secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial psikologi.
- d. Pengembangan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan/

278 *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 27.

279 Tim Dosen Administrasi Pendidikan, *Pengelolaan Pendidikan...*, hlm. 108.

posisi di masa yang akan datang.

- e. Pengembangan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motifasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan.
- f. Khusus menyangkut pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga pendidikan itu sendiri. Karir seseorang dapat saja menempuh penugasan yang silih berganti antara struktural dan fungsional hingga ke puncak karirnya. Hal tersebut tentu ditempuh dengan prosedur-prosedur yang tidak mengurangi arti profesionalisme yang hendak diwujudkan.

3. Program adiwiyata

Agenda lingkungan hidup kini sudah menjadi agenda internasional di segala bidang, baik politik, perdagangan dan industri. Agenda ini muncul dan semakin menguat karena kesadaran lingkungan kini semakin merata justru karena kekhawatiran yang semakin besar dengan terancamnya kualitas bumi kita sebagai satu-satunya tempat hidup di alam semesta. Isu lingkungan merupakan masalah yang sudah menjadi masalah global (mendunia). Memasuki abad ke-21, dunia sebenarnya sedang memasuki zaman lingkungan, tepatnya era restorasi lingkungan yang didasari oleh cinta pada bumi dan segenap kehidupan di dalamnya. Gencarnya pembangunan berbasis industri disegala sektor telah menggantikan lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan kelestarian lingkungan.

Menurut Widaningsih (2010) secara formal pendidikan

lingkungan hidup menjadi salah satu *alternative* yang rasional untuk memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum. Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan juga menjadi sarana yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Nurjhani dan Widodo (2009) pendidikan lingkungan dibutuhkan dan harus diberikan kepada anak sejak dini agar mereka mengerti dan tidak merusak lingkungan. Hal ini dipengaruhi beberapa aspek antara lain:

Aspek kognitif, pendidikan lingkungan hidup mempunyai fungsi untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan lingkungan, juga mampu meningkatkan daya ingat, penerapan, analisis, dan evaluasi.

- a. Aspek afektif, pendidikan lingkungan hidup berfungsi meningkatkan penerimaan, penilaian, pengorganisasian dan karakteristik kepribadian dalam menata kehidupan dalam keselarasan dengan alam.
- b. Aspek psikomotorik, pendidikan lingkungan hidup berperan dalam meniru, memanipulasi dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya dalam upaya meningkatkan budaya mencintai lingkungan.
- c. Aspek minat, pendidikan lingkungan hidup berfungsi meningkatkan minat dalam diri anak.²⁸⁰

Pendidikan lingkungan adalah salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan lingkungan di kalangan pelajar sekolah.

280 Ellen Landriany, "Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang", dalam *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 2, Nomor 1, Januari

Hal ini ditujukan dengan asumsi bahwa jika pengetahuan tentang lingkungan meningkat, maka perilaku peduli lingkungan juga meningkat dan akan mengurangi kerusakan lingkungan di masa yang akan datang. Menurut Akpan et al. (2003) menyatakan konsep dasar dalam membentuk perilaku peduli lingkungan dibutuhkan tiga unsur, yaitu faktor institusional, strategi pendidikan, serta pengetahuan dan nilai. Ketiga faktor tersebut berkaitan satu dan yang lainnya. Faktor institusi berhubungan dengan kebijakan politik, ketersediaan dana dan fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Strategi pendidikan adalah salah satu hasil dari kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan nilai yang nantinya akan mempengaruhi perilaku peduli lingkungan.²⁸¹

Program adiwiyata dapat dilaksanakan secara optimal sejak tahun 2010 seiring dengan adanya kebijakan baru yang menggantikan kebijakan sebelumnya antara menteri lingkungan hidup dan menteri pendidikan nasional melalui Kesepakatan Bersama No.03/MenLH/02/2010. Hal ini kemudian dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program adiwiyata. Tujuan dari program adiwiyata berdasarkan pada peraturan tersebut, yaitu untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, pelaksanaannya berdasarkan tiga prinsip yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Program adiwiyata adalah program yang komprehensif

2014.

- 281 Rizky Dewi Iswari, "Evaluasi Penerapan Program Adiwiyata untuk Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan di Kalangan Siswa (Kasus: SMA Negeri 9 Tangerang Selatan dan MA Negeri 1 Serpong)", dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan* Volume 15, Issue 1, Tahun 2017.

melibatkan semua *stakeholders* baik di sekolah dan masyarakat untuk membantu meningkatkan kepedulian lingkungan, khususnya siswa. Menurut Permen Adiwiyata Nomor 5 Tahun 2013 tujuan program yang hendak dicapai dijabarkan dalam empat komponen utama, yaitu: (1) aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan; (2) aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan; (3) aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif; dan (4) aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Komponen 1 dan 2 merupakan kewenangan dan kebijakan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan sedangkan komponen 3 dan 4 merupakan kewenangan dan kebijakan kementerian lingkungan hidup.

Pendidikan lingkungan hidup merupakan mata pelajaran yang implikasinya dapat diwujudkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan individu itu berada. Selanjutnya, secara spesifik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud (2011, hlm. 3) menyatakan bahwa tujuan program adiwiyata yang tertuang dalam buku panduan adiwiyata 2011 adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.²⁸²

4. Program penguatan karakter

Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai Negara. Pandangan pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter

282 Mohammad Dendy Fathurahman Bahrudin, "Pelaksanaan Program Adiwiyata dalam Mendukung Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di SMA Negeri 4 Pandeglang, dalam *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 17, Nomor 1, April 2017.

sejak lama. Sejatinya, pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang menjadi tugas sekolah, tetapi selama ini kurang perhatian. Akibat minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter dalam ranah persekolahan, sebagaimana dikemukakan Lickona, telah menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit sosial ditengah masyarakat.

Seyogyanya, sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan pencapaian akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam pembentukan karakter yang baik merupakan dua misi integral yang harus mendapat perhatian sekolah. Namun, tuntutan ekonomi dan politik pendidikan menyebabkan penekanan pada pencapaian akademis mengalahkan idealitas peranan sekolah dalam pembentukan karakter.

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang *religius*, nasionalis, produktif, dan kreatif.²⁸³

Indonesia melalui menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah mencanangkan program penguatan pendidikan karakter (PPK) untuk mengatasi krisis nilai karakter. Mendikbud menyampaikan, penguatan pendidikan karakter merupakan poros utama perbaikan pendidikan nasional yang berkaitan erat dengan berbagai program prioritas pemerintah. Lima nilai utama karakter yang menjadi prioritas PPK, berkaitan erat dengan berbagai program prioritas Kemendikbud di bidang

283 Zubaiedi, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Kharisma Putera Utama, 2011), hlm. 14-18.

pendidikan dan kebudayaan. Lima nilai utama itu adalah *religijs*, nasionalis, mandiri, intergritas, dan gotong royong.²⁸⁴

Program penguatan pendidikan karakter diharapkan menjadi ruh dari pendidikan nasional. Nilai utama karakter PPK tidak hanya menysar siswa tetapi juga pendidik, masyarakat dan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama.

Program Mendikbud tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti oleh Presiden RI Joko Widodo dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 pada tanggal 06 September 2017. Ketetapan tersebut pada BAB I Pasal 1 Nomor 1 tertulis, penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental (GNRM).

Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (*kognitif, afektif, psikomotorik*) dan fungsi totalitas sosiokultural pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural dapat dikelompokkan dalam: 1) olah hati; 2) olah pikir; 3) olah raga/kinestetik; dan 4) olah rasa dan karsa. Proses itu secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masingnya secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai.

284 Mendikbud: *Pendidikan Karakter dan Poros Perbaikan Pendidikan Nasional*, dalam <http://kemendikbud.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Almawijaya, Hendri, “Analisis Manajemen Bimbingan Konseling dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa”, dalam *Jurnal Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 5, November 2015*.
- Bafadal, Ibrahim, 2006, *Peningkatan Profesionalisme Sekolah Dasar; Dalam Rangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan, 2003, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dendy, Mohammad, dan Fathurahman, Bahrudin, “Pelaksanaan Program Adiwiyata dalam Mendukung Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di SMA Negeri 4 Pandeglang, dalam *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 17, Nomor 1, April 2017*.
- Hasbullah, 2007, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irianto, Yono, Bahtiar, “Perencanaan Pendidikan Tingkat Kabupaten/ Kota (Studi Evaluatif Tentang Efektivitas Sistem Pencanaan Pendidikan Menuju Tahun 2025 di Kabupaten Bandung)”, artikel dalam *www.file.upi.edu*,
- Iswari, Rizky, Dewi, “*Evaluasi Penerapan Program Adiwiyata untuk Membentuk Perilaku Peduli Lingkungan di Kalangan Siswa (Kasus: SMA Negeri 9 Tangerang Selatan dan MA Negeri 1 Serpong)*”, dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 15, Issue 1, Tahun 2017*.
- Komariah, Nur, & Rohana, “Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dalam Meningkatkan Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tembilahan”, dalam *Jurnal Al-Afkar_ Vol III, No 2, Oktober 2015*.

- Kunandar, 2007, *Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati, Ely, “Manajemen Kesiswaan di SMA Negeri Mojoagung Jombang”, dalam *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, April 2014.
- Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman kegiatan ekstrakurikuler.
- Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Pedoman kegiatan ekstrakurikuler.
- Landriany, Ellen, “Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang”, dalam *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.
- Lismawati, “Evaluasi Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2013 pada Pelajaran Al-Islam di SD Muhammadiyah 5 Jakarta”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 7, Nomor 2, September 2016.
- Mendikbud: *Pendidikan Karakter dan Poros Perbaikan Pendidikan Nasional*, dalam <http://kemendikbud.go.id>
- Mulyasa, 2006, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musbikin, Imam, 2013, *Menjadi Kepala Sekolah Yang Hebat*, Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing.
- N, Budiman, N., 2012, *Etika Profesi Guru*, Yogyakarta: Mentari Pustaka.
- Nawawi, Hadari, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007.
- PP No 32 Tahun 2013.
- PP Nomor 19 Tahun 2005
- PP Nomor 25 Tahun 2000
- Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas. 2010, *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*; Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa, Jakarta: tp.
- Renstra Kemendikbud 2015-2019, dalam www.kemendikbud.go.id.
- Sahertian, Piet, A., *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional
- Salim, Ahmad, “Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah (Sebuah Konsep dan Penerapannya)”, dalam Jurnal TARBAWI Volume 1. No. 02, Juli – Desember 2015.
- Staff UNY, “*Tugas-Tugas Kesiswaan dan Tugas-Tugas Guru BK di Sekolah*”, dalam www.Staff.uny.ac.id, akses tanggal 2 Desember 2017.
- Subagyo, Lambang, “Implementasi Kurikulum 2013 pada Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014”, dalam Jurnal Pancaran, Vol. 3, No. 4, hal 131-144, Nopember 2014.
- Syah, Muhibih, 2004, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan, 2003, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI.
- Trianto, dan Titik, Triwulan, Tutik, 2006, *Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik (Menurut UU Guru dan Dosen)*, Jakara: Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Bandung: Citra Umbara, 2006

Uwes, Sanusi, 1999, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yaumi, Muhammad, 2014, *Pendidikan Karakter: Teori, Praktik, dan Implementasi*, Jakarta: Kencana.

Zubaiedi, 2011, *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta: Kharisma Putera Utama.

BIOGRAFI PENULIS

Dra. Hj. Wiji Hidayati, M.Ag., Lahir di Pati, 23 Mei 1965, Menamatkan pendidikan dasar Di MI dan MTs Nahjatul Falah Bulumanis Kidul Margoyoso Pati, pendidikan menengah MAN di MAN Yogyakarta I, pendidikan Tinggi S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Pendidikan Agama Islam lulus tahun 1989, S2 di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Pendidikan Islam, konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam lulus tahun 2003, sedang menyelesaikan studi S3 di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Kependidikan Islam.

Menjadi bagian Aparatur Sipil Negara di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak Maret tahun 1991 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga saat ini Mei 2017, merupakan anugerah dari Allah SWT. mengemban tugas sebagai dosen di program studi Kependidikan Islam yang sekarang menjadi program studi Manajemen Pendidikan Islam FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, alamat Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, secara bertahap mencapai golongan/jabatan fungsional, IV/a/lektor kepala. Sedang proses jabatan fungsional IV/b

Beberapa Karya Ilmiah berbentuk buku dan hasil penelitian kemudian ditulis menjadi artikel jurnal dipublikasikan. Karya buku berjudul ‘Psikologi Perkembangan’ penerbit Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 2008); ‘Telaah Kurikulum Sejarah Kebudayaan Islam’ (tahun 2009). Pengembangan Kurikulum (2012). Karya artikel jurnal dipublikasikan diantaranya (**Tahun 2010**) “Manajemen Pengembangan Kurikulum Madrasah Tahun 2008 * Dalam *Antologi Kependidikan Islam*” Diterbitkan Jurusan Kependidikan

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga; **(Tahun 2012)**, artikel “ The Integration Of Cultural Values and Chacacter Education in Learning Moral in the school” Dalam *Proceedings Workshop on Quality of Education* , p. 323-337, 7 March 2012, artikel “ Peran Guru Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Di Lingkungan Pendidikan Formal” dalam *proceeding Seminar Nasional Pendidikan Karakter -Spiritual Anak Sebagai Pilar Membangun Masyarakat yang beradab*, Mei 2012, artikel “ Implementasi Diferensiasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas Akselerasi SMPN 5 Yogyakarta “ Dalam *Jurnal Kependidikan Islam* Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2012; **(Tahun 2013)** Artikel “ Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Religius Konservatif dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran al-Ghazali)” dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sintesa*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2013; **(Tahun 2015)** artikel “ Muatan Keilmuan Integrasi Interkoneksi Pendidikan Agam Islam dan Budi Pekerti (Telaah Kurikulum 2013 Jenjang SMA) dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume XII, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1-14, artikel “ The Correlation of Students Character With Scientific Learning Skill (Study On Basic School In Indonesia)” dalam *IOSR Journal of Research and Method in Education* Volume: 5, Issue 3, Ver III (May-Jun 2015) PP. 29-33); **(Tahun 2016)** Artikel “Implementation Of Curriculum 2013 In Primary School Sleman Yogyakarta “dalam *IOSR Journal of Research and Method in Education* Volume: 6, Issue 2, Ver II (Mar-Apr 2016) PP. 06-12, artikel “Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Jenjang SMA Bermuatan Keilmuan integrasi Interkoneksi” dalam, *Manageria*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume: 1, Nomor 2, Nov 2016. **(Tahun 2017)** Artikel” Peran Sekolah dalam membentuk Ketrampilan Wirausaha Berbasis Tauhid di SD Entrepeneur Muslim Alif-A Piyungan Bantul Yogyakarta’ dalam *Manageria*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume: 2, Nomor 2, Nov 2017. (April Tahun 2018) Artikel di Proceeding The 1 Annual Conference on Islamic

Education Management “Implementasi Trilogi Ki Hajar Dewantoro dalam kepemimpinan kepala sekolah sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan guru di SMK Taman Siswa 1 Imogiri Yogyakarta.

Yogyakarta, Mei 2021

Penulis

Dra. Hj. Wiji Hidayati, M.Ag

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Syaefudin, M.Pd, anak “desa” ini telah mendedikasikan hidupnya pada dunia pendidikan dan tulis-menulis. Semula, ia tertarik pada tema-tema hukum dan politik. Namun, panggilan hatinya sebagai akademisi yang dilahirkan dari kampus di kota pelajar (S1-S2), membuat ia memilih menekuni tema-tema dan apa saja yang terkait dengan pendidikan. Lahir di Purworejo pada hari Rabu Kliwon, 04 Oktober 1989. Syaefudin merupakan putra pertama dari pasangan Salim dan Sri Mulyati.

Jenjang pendidikan dasar ditempuh di SDN Pogung Jurutengah, melanjutkan ke SMPN 10 Purworejo, dan MAN Purworejo. Pendidikan S1 diselesaikannya di Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sementara jenjang S2 diselesaikan di Kampus yang sama, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Syaefudin ini aktif dalam penelitian dan penulisan demi memuaskan hasrat kritisnya. Pada tahun 2014, ia tergabung sebagai peneliti dalam proyek “Survey Nasional Pemilu Presiden” lembaga survey POLTRACKING Institute. Serta, dilanjutkan sebagai “Tim Quic Count Pemilu Presiden” pada lembaga yang sama. Pada tahun 2015, ia ditunjuk sebagai Supervisor Lapangan proyek “Study Pemberdayaan Pekerja Migran” pada lembaga survey SURVEY METER Yogyakarta.

Adapun tulisan terbaru yang telah terbit adalah jurnal yang berjudul: “Tipologi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pembentukan Karakter Cinta Damai Siswa SMP PIRI 1 Yogyakarta”, pada *JURNAL MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018/4939, hlm 47-67. Jurnal berjudul: “Kesadaran Keluarga

Petani Terhadap Pentingnya Pendidikan Formal”, pada Jurnal Psikologi Integratif Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga, Vol. 6, Nomor 1, 2018, hlm 62-80. Jurnal berjudul: “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu pada Lembaga Pendidikan Islam”, pada Jurnal Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Vol. 15 No. 2 Desember 2018, hlm 226-244.

Sejak Maret 2019 Syaefudin menjadi CPNS di almamater tercinta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta formasi Dosen Filsafat Pendidikan. Selain mengajar, ia juga aktif dalam organisasi keagamaan Nahdlotul Ulama (NU). Penulis dapat dihubungi melalui @mail: syaefudin@uin-suka.ac.id.

Yogyakarta, Mei 2021

Penulis

Syaefudin, M.Pd

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Umi Muslimah, M.Pd., merupakan gadis pesisir yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 3 Maret 1993. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di daerah kelahirannya.

Adapun riwayat pendidikan formalnya dimulai dari SDN 2 Tlogodepok hingga tahun 1999, kemudian dilanjutkan di SMPN 1 Mirit hingga tahun 2005, dan MAN 2 Kebumen hingga tahun 2008.

Program Sarjana ditempuhnya pada Program Studi Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga tahun 2011. Hasrat belajar menuntunnya untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pasca-Sarjana, Program Studi Pendidikan Agama Islam konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga tahun 2019.

Riwayat pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Darussalam Kebumen pada tahun 2008, dan di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Yogyakarta tahun 2011, membuatnya lengkap dalam keterpaduannya sebagai insan yang beriman kepada Tuhan YME, dan berwawasan luas dalam ilmu pengetahuan.

Umi Muslimah menjadi staf pengajar al-Qur'an dan al-Hadits di MAN 2 Bantul sejak tahun 2017. Ia juga pernah menjadi penulis mata pelajaran baca tulis al-Qur'an di SD Glagah tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui Telp: 085725967010.

Yogyakarta, Mei 2021

Penulis

Umi Muslimah, M.Pd.



Dewasa ini pengembangan keilmuan manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan mengalami berbagai tantangan. Basis epistemologis kurikulum pendidikan hingga pengembangan metode, strategi, dan sistem pengelolaan lembaga pendidikan menjadi sesuatu yang belum mapan. Rumusan konseptual manajemen kurikulum seolah hanya mengubah, memodifikasi, dan menjustifikasi konsep rumusan manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilihat melalui tidak berkembang atau sedikitnya teori-teori manajemen kurikulum untuk menjawab berbagai persoalan pada lembaga pendidikan.

Efek lanjutan dari kemelutnya kerangka epistemologis tersebut adalah praktik pendidikan yang meliputi proses pendidikan, pengembangan, dan manajemen pendidikan. Terkait pengembangan kurikulum pendidikan, regulasi telah dirumuskan dalam UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X Pasal 38, yang berbunyi: 1) Kerangka Dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah; 2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan; 3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh PT yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi; 4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh PT yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Serta, menurut James A. Beane (1944), terdapat tiga fondasi atau landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis.

Dalam konteks inilah buku Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan (Konsep dan Strategi Pengembangan) diterbitkan. Buku ini hadir dan berusaha untuk menyajikan regulasi, konsep, & pemikiran tokoh bidang manajemen kurikulum dan program pendidikan. Serta, diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan yang hadir dalam manajemen kurikulum dan program pendidikan.

Buku ini memberikan berbagai prespektif dalam usaha memecahkan berbagai persoalan Manajemen Pendidikan yang di hadapi di Indonesia

Dr. Imam Machali, M.Pd.

Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

